



ECONUSA
NATURE • CULTURE • CONSERVATION

PEMUTAHIRAN PEMETAAN DAN KAJIAN RANTAI PASOK KAYU DI REGIONAL MALUKU DAN PAPUA 2020

Oleh:

Rifqi Rahmat Hidayatullah, S.Hut., M.Si.

Novi Andareswary, S.Si., M.Si.

Darkono Tjawikrama, S.Hut., M.Si.

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN	3
2.	LATAR BELAKANG	3
3.	METODOLOGI	6
4.	RUANG LINGKUP STUDI	8
5.	PEMBAHASAN REGIONAL MALUKU	8
5.1	Kepemilikan IUPHK-HA dan HT Provinsi Maluku	9
5.2	Kepemilikan IUPHK-HA dan HT Provinsi Maluku Utara	22
5.3	Alur Perdagangan Kayu dan Provinsi Maluku dan Maluku Utara	35
5.4	Sertifikasi IUPHHK-HA dan HTI Provinsi Maluku dan Maluku Utara	38
6.	PEMBAHASAN REGIONAL PAPUA	39
6.1	Kepemilikan IUPHHK-HA dan HT Provinsi Papua	39
6.2	Kepemilikan IUPHHK-HA dan HT Provinsi Papua Barat	58
6.3	Alur Perdagangan Kayu dari Provinsi Papua dan Papua Barat	66
6.4	Sertifikasi IUPHHK-HA dan HTI Provinsi Papua dan Papua Barat	67
	DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Konsesi Perusahaan-Perusahaan Kayu di Region Maluku	7
Gambar 2. Peta Konsesi Perusahaan-Perusahaan Kayu di Region Papua	7
Gambar 3. Pengumpulan dan pengolahan data terkait peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan ekspor	8
Gambar 4. Peta Konsesi Koperasi Wailo Wana Lestari	8
Gambar 5. Peta Konsesi PD. Panca Karya	11
Gambar 6. Peta Konsesi PT.Albasi Priangan Lestari	12
Gambar 7. Peta Konsesi PT. Bintang Lima Makmur	13
Gambar 8. Peta konsesi PT. Gema Hutani Lestari	14
Gambar 9. Peta Konsesi PT. Karya Jaya Berdikari	14
Gambar 10. Peta Konsesi PT. Nusapadma Corp	16
Gambar 11. Peta Konsesi PT. Strata Pasific	17
Gambar 12. Peta Konsesi PT. Wana Potensi Nusa	18
Gambar 13. Peta Konsesi PT. Wana Sejahtera Abadi	18
Gambar 14. Peta Konsesi PT. Reminal Utama Sakti	21
Gambar 15. Peta Konsesi Bela Group	23
Gambar 16. Struktur Pemegang Saham PT. Widuri Utama Timber	24
Gambar 17. Struktur Pemegang Saham PT. Tunas Pusaka Mandiri	24
Gambar 18. Struktur Pemegang Saham PT. Nusa Niwe Indah	25
Gambar 19. Struktur Pemegang Saham PT Bela Berkat Anugerah	26
Gambar 20. Peta Konsesi Nusapadma Corps	27
Gambar 21. Struktur Pemegang Saham PT. Wana Kencana Sejati	27
Gambar 22. Struktur Pemegang Saham PT. Nusapadma	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 24. Struktur Pemegang Saham PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries	29
Gambar 25. Barito Pacific Group	30
Gambar 26. Struktur Pemegang Saham PT. Mangole Timber Production	31
Gambar 27. Peta Konsesi PT. Poleko Yubarsons Trading Coy	32
Gambar 28. Peta Konsesi PT. Telaga Bhakti Persada	33
Gambar 29. Peta Konsesi PT. Mohtra Agung Persada	34
Gambar 30. Peta Konsesi PT. Mahakarya Agra Pesona	34
Gambar 31. Peta Konsesi PT. Semarak Dharma Timber	44
Gambar 32. Peta Konsesi PT. Wapoga Mutiara Industries	46
Gambar 33. Peta Konsesi PT. Mondialindo Setya Pratama	55
Gambar 34. Peta Konsesi PT. Papua Hutan Lestari Makmur	56
Gambar 35. Peta Konsesi PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1 IUPHHK-HA di Provinsi Maluku	9
Tabel 2 IUPHHK-HA Provinsi Maluku Utara	22
Tabel 3 Industri penerima bahan baku dari IUPHHK Provinsi Maluku	35
Tabel 4 Industri penerima bahan baku dari IUPHHK Provinsi Maluku	36
Tabel 5 Alur Penjualan Kayu Teridentifikasi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara	37
Tabel 6. Funding yang teridentifikasi	38
Tabel 7 Sertifikasi IUPHHK-HA Provinsi Maluku	38
Tabel 8. Sertifikasi IUPHHK-HA Provinsi Maluku Utara	39
Tabel 9. Kepemilikan dan luas konsesi IUPHHK-HA Provinsi Papua	40
Tabel 10. Kepemilikan dan luas konsesi IUPHHK-HA Provinsi Papua Barat	58
Tabel 11. Industri penerima bahan baku dari IUPHHK Provinsi Papua	66
Tabel 12. Industri penerima bahan baku dari IUPHHK Provinsi Papua Barat	67
Tabel 13. Kepemilikan sertifikat SVLK, PHPL dan FSC di Provinsi Papua	67
Tabel 14. Kepemilikan sertifikat SVLK, PHPL dan FSC di Provinsi Papua Barat	69

1. Pendahuluan

Yayasan Econusa merupakan salah satu mitra pembangunan di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Yayasan Econusa bekerjasama dengan pemerintah propinsi untuk peningkatan tata kelola sumber daya alam, khususnya sumber daya hutan, melalui pendekatan perencanaan pembangunan Rendah Karbon yang disinergikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mendukung inisiatif ini adalah melakukan kajian untuk menelusuri peredaran dan rantai pasok kayu ke industri kayu dan pulp yang bersumber dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan gambaran terkait pemanfaatan, penjualan dan peredaran kayu sehingga mampu mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keberadaan hutan alam tersisa di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku.

2. Latar Belakang

Salah satu kegiatan dalam rangka peningkatan tata kelola sumber daya alam kayu dan pulp adalah melakukan penelusuran rantai pasok industri kayu dan pulp yang berpotensi besar mengancam keberadaan hutan alam di Kepulauan Maluku. Tidak dapat dinafikan meskipun saat ini telah terdapat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai bentuk pengendalian ekstraksi hasil kayu secara ilegal dan masif, praktik illegal logging masih terjadi di Indonesia dan dimungkinkan juga terjadi di Kepulauan Maluku dan Papua yang sekitar 83% tanahnya masih berupa tutupan hutan hujan tropis yang sangat kaya keanekaragaman hayatinya.

Provinsi Maluku memiliki luas 62.946,04 km². Secara astronomi Provinsi Maluku berada antara 2°30'-9° Lintang Selatan dan 124°-136° Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Seram, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia dan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Papua dan sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi/laut Sulawesi. Secara astronomi Provinsi Maluku Utara terletak antara 3° Lintang Utara - 3° Lintang Selatan dan 124° - 129° Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi Maluku yang resmi berpisah pada tanggal 12 Oktober 1999 dengan luas 145.801,10 km².

Luas hutan produksi di Provinsi Maluku adalah 2.862.823 ha (Hutan Produksi Terbatas 894.258 ha, Hutan Produksi Tetap 643.699 ha dan Hutan Produksi Konversi 1.324.866 ha). Sedangkan luas hutan produksi di Provinsi Maluku Utara adalah 1.712.663 ha (Hutan Produksi Terbatas 666.851 ha, Hutan Produksi Tetap 481.730 ha dan Hutan Produksi Konversi 564.082 ha).

Pada tahun 2013 Maluku Utara memiliki hutan alam seluas 1.67 juta hektar. Pada tahun 2016 hanya tersisa sekitar 1.51 juta hektar dengan laju deforestasi dari 3.3 ribu hektare/tahun menjadi 4,8 ribu hektare/tahun (Barri, Setiawan, Oktaviani, Prayoga, & Ichsan, 2018).

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) sepanjang 2020-2021 melakukan pemantauan dan menemukan bersama masyarakat adat dan lokal di lima provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa

Timur, dan Jawa Tengah dan menemukan ada unit manajemen pemegang sertifikat legalitas kayu masih ditemukan menebang kayu di luar rencana kerja tahunan dan di luar izin konsesinya (Kompas.id, 2021).

Secara astronomis Pulau Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) terletak posisi 0°20' Lintang Selatan (LS) sampai 10°42' LS dan membentang dari 131° Bujur Timur (BT) hingga 151° BT. Pulau Papua yang memiliki luas 785,753 km² ini didiami ratusan suku bangsa. Pulau ini juga terkenal dengan hutan hujan tropis yang menjadi rumah bagi puluhan ribu jenis flora dan ratusan tumbuhan endemik. Selain itu beragam hewan eksotis juga bisa dijumpai di pulau ini antara lain burung cendrawasih, kasuari, Kuskus scham-scham, dingiso, dan labi-labi moncong babi.

Diacu dari (Jubi, 2018) dari masa sebelum penjajahan ketika semua tanah menjadi milik orang Papua melalui sistem kepemilikan kolektif seperti suku-suku dan marga-marga (kèret). Situasi dan pola kepemilikan seperti ini sedikit berubah ketika misi Kristen dan pemerintah Belanda datang dan menguasai Tanah Papua.

Setelah proses pemetaan besar-besaran yang dilakukan oleh tentara Belanda dari tahun 1907 hingga 1920-an, Belanda memulai program kolonisasi di tahun 1930-an. Transmigran Eropa dari Belanda dan orang Indo-Belanda dari Jawa didatangkan. Perkebunan-perkebunan kolonial mulai dibuka di Merauke, Manokwari, dan Jayapura dengan melibatkan investor transnasional. Pada tahun 1932, pemerintah Belanda menyewakan 6000 hektar tanah Papua ke perusahaan perkebunan Jepang Nanyo Kohatsu Kaisha. Konsesi mereka terletak di pantai utara Tanah Papua, dari Jayapura hingga Sarmi. Pada tahun 1937 perusahaan karet Negumij (Nederlandse Maatschappij voor Nieuw-Guinea) membuka kebun di dekat Jayapura. Di Ransiki dekat Manokwari, Negumij juga memegang konsesi perkebunan seluas 1000 hektar.

Pada tahun 2011, pemerintah meluncurkan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) setelah tertunda dan diprotes selama bertahun-tahun. Proyek MIFEE ini diperkirakan telah dan akan mengambil lahan orang asli Papua seluas 2,5 juta ha.

Pada tahun 2016, pemerintahan Joko Widodo memperkenalkan program reforma agraria. Program ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan lahan dan persoalan kemiskinan di Indonesia. Melalui program ini, Jokowi menerbitkan sebuah kebijakan bernama TORA (tanah objek reforma agraria). TORA adalah kawasan hutan dan tanah negara yang dianggap 'tanah terlantar' dan akan dilepaskan untuk hak kepemilikan (sertifikasi). Namun, kebijakan ini juga menetapkan bahwa 20% dari area pelepasan melalui TORA akan digunakan untuk perkebunan. Di Tanah Papua, bukannya menyasar tanah terlantar, program reforma agraria justru menyasar hutan primer. Hingga saat ini, luas hutan Papua yang SK pelepasannya sudah keluar melalui TORA mencapai 1.124.975,35 hektar. Artinya, TORA dan program reforma agraria bukannya mengatasi kemiskinan di Papua, justru memperparah kemiskinan penduduk asli. Program ini juga berarti formalisasi program pencaplokan hutan rakyat. Sejak program ini diluncurkan, Papua juga melihat peningkatan jumlah perusahaan kelapa sawit dan tebu yang mendapat konsesi di Papua, yaitu 48 perusahaan. TORA di Papua juga mengembalikan program transmigrasi yang sempat dihentikan sejarak reformasi. Hingga tahun ini, pemerintah telah melepaskan tanah seluas 84.554,51 hektar untuk program transmigrasi baru.

Menurut (Wahyudi, 2015) pemerataan pembangunan Kehutanan di tanah Papua (pada waktu itu masih Irian Jaya), ditandai dengan beroperasinya Perusahaan Perseroan (Persero) Eksploitasi dan Industri Hutan atau PT. Inhutani

II/Kesatuan Usaha Manokwari pada bulan Januari 1979, dan pada tanggal 19 Maret 1979 dilakukan ekspor kayu Log jenis Matoa (*Pometia spp*) sebanyak 5400 m³ dengan Negara tujuan Jepang. Pada tahun 1980, PT Inhutani diberi kewenangan untuk mengelola dan mengambil alih bekas areal kerja dari Perusahaan Kayu Negara (PKN) Manokwari, dan mengoperasikan penggergajian kayu (*sawmill*). Setelah sembilan tahun, tepatnya tahun 1989, PT Inhutani II menyerahkan kembali areal bekas PKN tersebut, karena telah beralih fungsi sebagai daerah Transmigrasi, memiliki topografi terjal, dan potensi tegakan yang kurang.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 1970 junto PP Nomor 18 tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), maka mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan kayu (*timber extraction*) secara besar-besaran dilakukan di Irian Jaya, Tanah Papua/Papua dan Papua Barat, oleh pemilik modal asing maupun modal dalam negeri (Wahyudi, 2015).

Berdasarkan Bab I pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970, dinyatakan bahwa Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan Hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan azas kelestarian hutan dan azas perusahaan. Sedangkan pada pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa "Hak Pemungutan Hasil Hutan" adalah hak untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) ha untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat ijin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Sehingga, di Tanah Papua aktifitas-aktifitas pengusahaan hutan, baik oleh HPH maupun HPHH, pada intinya meliputi tiga kegiatan utama, yaitu Penebangan (*logging*), pengangkutan, dan pengolahan/pengkonversian kayu (*wood processing industry*). Sampai dengan akhir tahun 2001, jumlah pemegang ijin HPH dan HPH Hutan Tanaman Industri (HTI) di tanah Papua sebanyak 58, dengan rincian 48, HPH aktif dengan total luas areal konsesi 10.279.613 ha, dan HPH-HTI sebanyak 10 unit dengan total areal konsesi seluas 1.146.200 ha. HPH yang beroperasi tersebut, melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu, dengan menghasilkan produk-produk olahan kayu primer, seperti kayu gelondongan (*log*), kayu gergajian (*Sawntimber*) dan kayu lapis (*Plywood*) (Wahyudi, 2015).

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menunjukkan bahwa di Tanah Papua, untuk keanggotaan 2011-2016, terdapat 49 pemegang ijin IUPHHK-HA dan 3 pemegang ijin IUPHHK-HT. Dimana, Provinsi Papua memiliki 26 pemegang ijin IUPHHK-HA, dengan total luasan adalah 4.324.975 ha. Sumber lain menyatakan bahwa di Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2011 terdapat 20 pemegang IUPHHK, dengan luas 3.568.080 ha, dimana yang aktif hanya 19 IUPHHK dengan luasan 3.413.080 ha. Sedangkan data sumber lainnya menyatakan bahwa sampai dengan tahun 2014, pemegang ijin IUPHHK-HA di Provinsi Barat mencapai 29 unit, dengan total luasan mencapai 4.654.212 ha. Provinsi Papua Barat memiliki kawasan hutan seluas kurang lebih 9.427.600,57 ha, dengan rincian yaitu hutan Lindung (HL) seluas 1.648.227,57 ha, Kawasan Suaka Alam (KSA) dengan luas 1.751.648,35 ha, Hutan Produksi (HP) memiliki luas 1.866.284,39, Hutan Produksi Terbatas (HPT) yaitu 1.847.243,96, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 2.314.144,79 ha (Wahyudi, 2015).

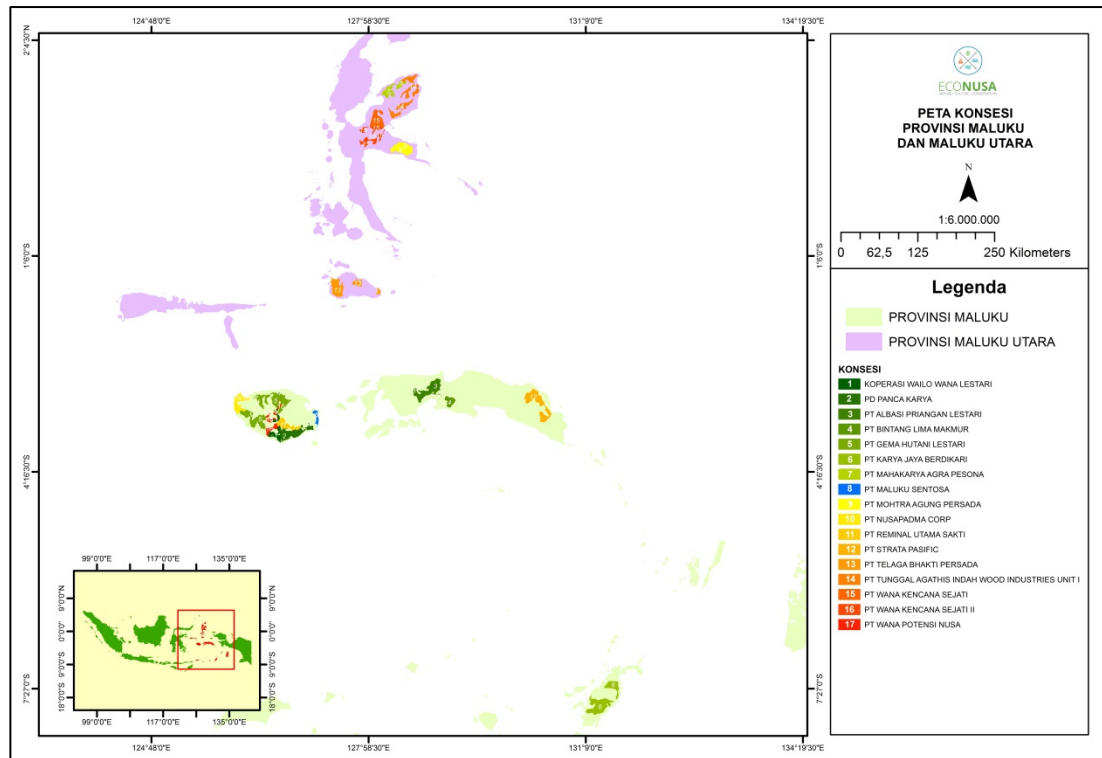
Adapun tujuan dari kegiatan ini ialah (1) pemutahiran data dan informasi dan melengkapi penyusunan database supply chain (alur perdagangan) industri kayu dan pulp di Regional Maluku dan Maluku; (2) mendapatkan data kepemilikan perusahaan (akta notaris) untuk perusahaan yang tidak tersedia secara bebas.

3. Metodologi

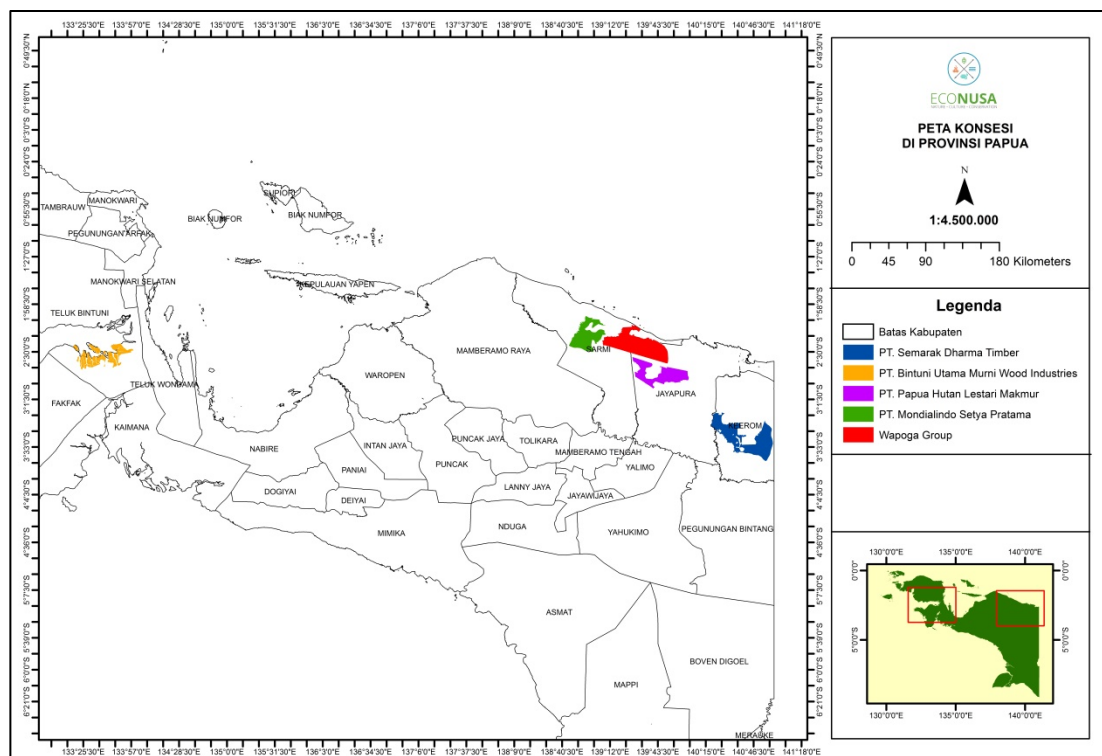
Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (desk analysis) dengan melakukan penelusuran data dan informasi sekunder tentang peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan pulp yang bersumber dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku. Data dan informasi yang dikumpulkan dari sumber informasi yang bisa diakses oleh publik, yang tersedia di instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga lainnya yang terkait. Beberapa sumber informasi seperti dokumen studi, situs perusahaan, situs KLHK, dokumen yang dipublikasi oleh perusahaan, dokumen rencana pemenuhan bahan baku industri, dokumen-dokumen publik lainnya. Selain itu, proses pengumpulan data dilakukan dengan pembelian data di Kementerian Hukum dan HAM terkait data kepemilikan perusahaan (akta notaris).

Informasi yang sudah terkumpul, kemudian akan diolah dengan menggunakan tabulasi sebagai database sederhana untuk mempermudah dalam melakukan analisis data. Setidaknya informasi yang akan diolah, diantaranya: nama perusahaan, jenis perusahaan, SK perusahaan, luas konsesi, lokasi konsesi (kabupaten dan provinsi), jenis sertifikasi yang dimiliki, tujuan penjualan kayu (nama perusahaan industri, lokasi, rencana dan realisasi penjualan kayu, tahun), dan termasuk group, pemilik perusahaan, dan pemodal. Peneliti juga melakukan serangkaian wawancara untuk melakukan verifikasi data yang telah dikumpulkan dan sekaligus untuk melengkapi pengumpulan data dan informasi yang masih diperlukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Setelah data-data tersebut diolah, maka selanjutnya akan dianalisis sebagai bahan penyusunan laporan studi tentang peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan pulp dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku yang diperdagangkan dan dibeli oleh para konsumen di pasar internasional. Peta konsesi perusahaan-perusahaan kayu di Region Maluku dan Papua dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.



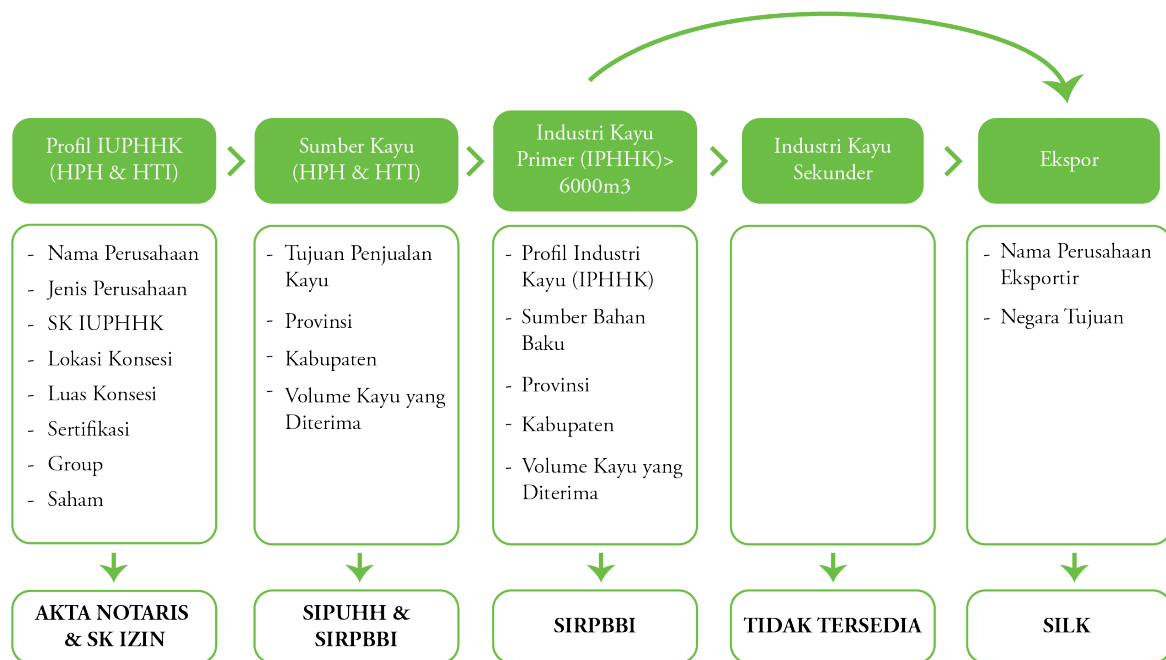
Gambar 1. Peta Konsesi Perusahaan-Perusahaan Kayu di Region Maluku



Gambar 2. Peta Konsesi Perusahaan-Perusahaan Kayu di Region Papua

4. Ruang Lingkup Studi

Studi peredaran dan rantai pasok kayu ke industri kayu dan pulp ini, akan mengumpulkan dan mengolah data-data mengenai: perusahaan kayu sebagai pemasok kayu, industri kayu dan pulp sebagai penerima (pengonsumsi) bahan baku kayu yang berasal dari Tanah Papua dan Kepulauan Maluku, sampai kepada industri sekunder atau para konsumen sebagai pembeli produk kayu di pasar internasional.



Gambar 3. Pengumpulan dan pengolahan data terkait peredaran kayu dan rantai pasok ke industri kayu dan ekspor

Studi ini akan dimulai dengan menyusun database sederhana (dalam bentuk excel) terkait tentang alur peredaran kayu dari perusahaan kayu ke industri kayu dan pulp yang berada di Tanah Papua dan Kepulauan Maluku dengan mengumpulkan data-data yang tersedia dalam rentang tahun 2021 – 2022.

5. Pembahasan Regional Maluku

Pada tanggal 10 Juni 2019 Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Murad Ismail mengeluarkan kebijakan moratorium melalui surat bernomor 552/1850 tanggal 10 Juni 2019 kepada 13 perusahaan pemegang IUPHHK-HA dan HT di Provinsi Maluku, dengan alasan perusahaan tersebut tidak berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat Maluku (Patty, 2019). Kemudian pada tanggal 9 September 2019 moratorium dicabut melalui SK Nomor 522/30.48 pada tanggal 9 September 2019. Pencabutan tersebut memiliki syarat yaitu perusahaan harus memenuhi kewajiban dalam bidang reboisasi dan sosial seperti anggaran CSR. Jika kewajiban tidak dilaksanakan maka Gubernur Maluku akan mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar ijin dicabut secara permanen (Leonard, 2019).

5.1 Kepemilikan IUPHK-HA dan HT Provinsi Maluku

IUPHHK-HA di Provinsi Maluku berjumlah 17 yaitu Koperasi Wailo Wanalestari, PD. Panca Karya, PT. Albasi Priangan Lestari, PT. Bintang Lima Makmur, PT. Gema Hutan Lestari, PT. Karya Jaya Berdikari, PT. Maluku Sentosa, PT. Nusapadma Corporation, PT. Prima Bumi Sakti, PT. Strata Pasific, PT. Talisan Mas, PT. Wana Potensi Nusa, PT. Wana Sejahtera Abadi, PT. Waenibe Wood Industries, PT. Katingan Timber Celebes dan PT. Reminal Utama Sakti (Tabel 1).

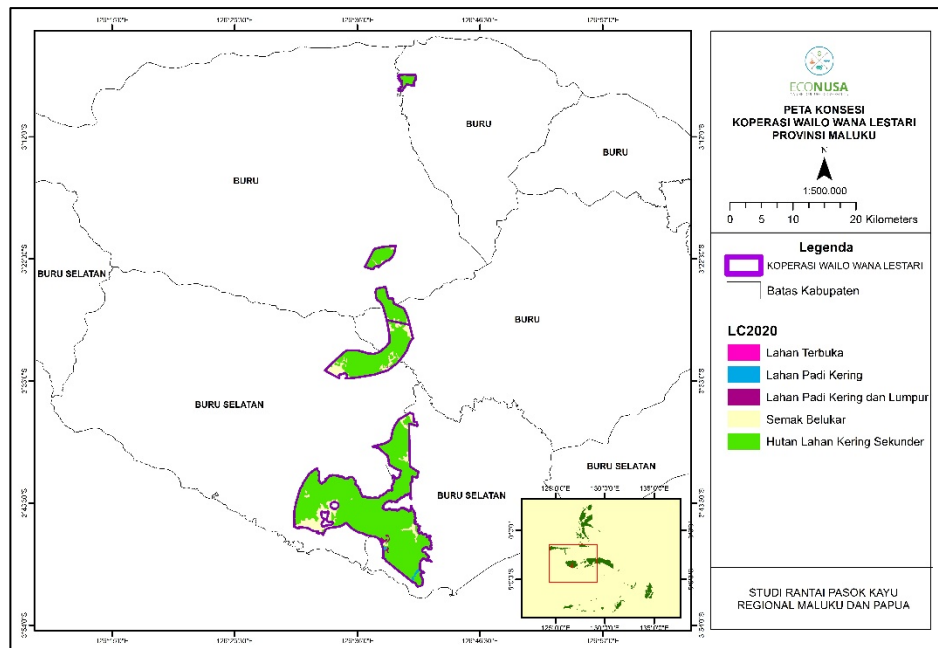
Tabel 1 IUPHHK-HA di Provinsi Maluku

No	Nama Perusahaan	Group	Pemilik Grup	Luas Konsesi (ha)
1	Koperasi Wailo Wanalestari	Non Gorup	Koperasi Wailo Wanalestari	29.955
2	PD. Panca Karya	Pemrpov. Maluku	Pemerintah Provinsi Maluku	63.440
3	PT. Albasi Priangan Lestari	Non Group	Boy Denny Wijaya	64.690
4	PT. Bintang Lima Makmur	Non Group	Putri Permatasari Kardinal	24.550
5	PT. Gema Hutan Lestari	Gama/Ganda	Andy Indigo dan Jacqueline Sitorus	150.664
6	PT. Karya Jaya Berdikari	Non Group	Kevin Tobing dan Sik Romi Wongso	93.980
7	PT. Maluku Sentosa	Non Group	Fery Tanaya	12.600
8	PT. Nusapadma Corporation	Nusapadma Corp	Rusli Loshito	39.920
10	PT. Prima Bumi Sakti	Tidak ditemukan	Tidak ditemukan	
11	PT. Strata Pasific	Non Group	Budi Yulianto dan Putri Permatasari Kardinal	73.365
12	PT. Talisan Mas	Non Group	Suzana Theodoria dan Sally Marisa Silitonga	54.750
13	PT. Wana Potensi Nusa	Non Group	Nugroho Hendarto	28.950
14	PT. Wana Sejahtera Abadi	Non Group	Johaners Setiawan Santosa	54.560
15	PT. Waenibe Wood Industries	Non Group	Fery Tanaya	33.245
16	PT. Katingan Timber Celebes	Ganda/Gama	Andy Indigo dan Jacqueline Sitorus	32.960
17	PT. Reminal Utama Sakti	Non Group	Amir Gaos Latuconsina	32.385

Koperasi Wailo Wanalestari

Berdasarkan SK IUPHHK-HA Nomor: 552.11-26 Tahun 1999, Tanggal 30 November 1999, Addendum SK Nomor: 552.11-53 Tahun 2001, Tanggal 8 Juni 2001 Koperasi Wailo Wanalestari memiliki luas konsesi 29.955 ha

di Kabupaten Buru Selatan. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Koperasi Wailo Wanalestari. Peta konsesi Koperasi Wailo Wanalestari dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Konsesi Koperasi Wailo Wana Lestari

Pada tahun 2016 Lambodja Sertifikasi mengumumkan hasil SVLK Koperasi Wailo Wanalestari (Laboja Sertifikasi, 2016). Selain Koperasi Wailo Wanalestari memiliki sertifikat PHPL dengan Nomor : 190/A-SERT/III/2018 dan hasilnya baik (Ayamaru Sertifikasi, 2018). Kayu bulat produksi Koperasi Wailo Wanalestari periode September 2014 s/d Agustus 2015 digunakan PT. Waenibe Wood Industries (Lamboja Sertifikasi, 2015). Selain kepada PT. Waenibe Wood Industries kayu dari Koperasi Wailo Wanalestari digunakan oleh PT. Surya Saritama (Srianto, 2016).

PT Surya Saritama memiliki IUIPHHK dan berlokasi di Jalan Margomulyo 68 Kav. 11 - 15 Surabaya, Jawa Timur (JPIK, 2016). Berdasarkan sertifikat No. BRIK-VLK-0012, PT. Surya Saritama mendapatkan ijin Industri Primer IUIPHHK Nomor SK.704/Menhut-II/2010 dan Industri Lanjutan (IUI) Nomor P2T/007/IUI/118-03/2010 dan NIB 9120308381014, dengan kapasitas *Sawn Timber* 12.000 m³/tahun, *Moulding, FLJ, Solid* dan *Laminating* 18.000 m³/tahun.

PT. Surya Saritama telah sertifikat produk yang bersumber dari hutan alam dari jenis Keluarga Meranti, Keluarga Rimba Campuran dll. Dari pemantauan terhadap bahan baku kayu PT. Surya Saritama didapatkan bahwa bahan baku yang tercantum didalam dokumen IPHHK menunjukkan bahwa bahan baku kayu yang tergolong IUPHHK Pada Hutan Alam berasal dari (1) PT. Borneo Karya Indah Mandiri, Kalimantan Timur, (2) Koperasi Wailo Wanalestari, Maluku, (3) PT. Maluku Sentosa, Maluku, (4) PT. Utama Damai Indah Timber, Kalimantan Timur, dan (5) PT. Wana Potensi Nusa, Maluku (JPIK, 2016).

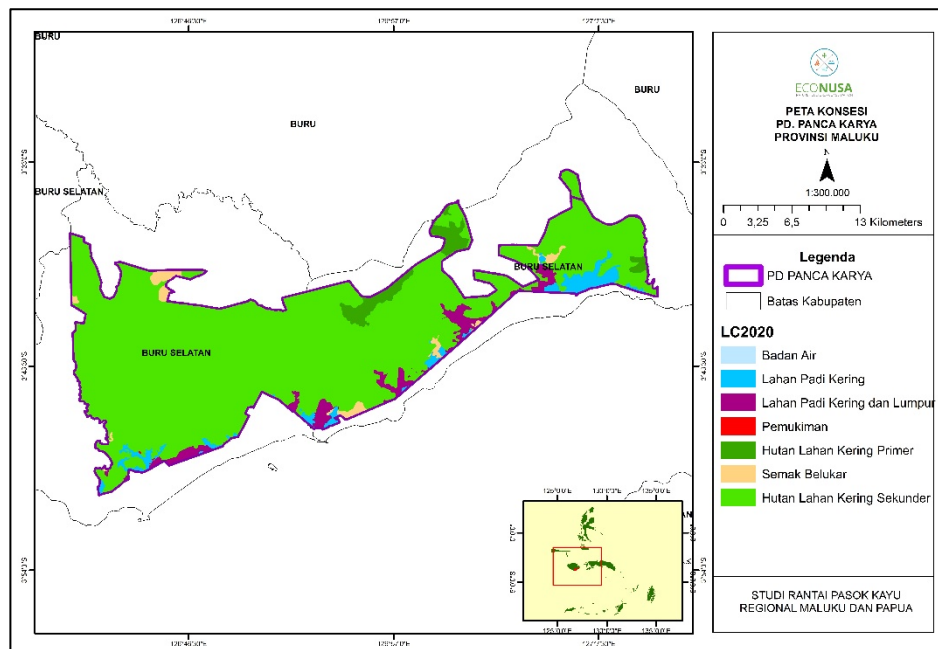
Hasil pemantauan PPLH Mangkubumi beberapa asal bahan baku PT. Surya Saritama berdasarkan RPBBI tahun 2015 antara lain berasal dari PT. Alam Lestari Jaya Salbach, PT. Kayan Jaya Tanjung, CV. Wana Artha Sejahtera dan PT.

Inti Prospek Sentosa ditemukan beberapa kayu bulat yang tidak memiliki tanda *V-Legal* (JPIK, 2017). Hasil pemantauan menemukan adanya ketidaksesuaian Indikator Implementasi Tanda V-Legal. Ditemukan beberapa kayu bulat yang tidak menggunakan Tanda V-Legal yang diangkut oleh PT. Surya Saritama (JKPP, 2019).

PD. Panca Karya

PD. Panca Karya adalah perusahaan plat merah milik Pemerintah Provinsi Maluku. Perusahaan ini diketahui memiliki banyak masalah (Kejaksaaan Tinggi Maluku, 2021). Mulai dari dugaan korupsi (Siwaluma, 2020) sampai terkait pembayaran kariawan (Linansera, 2021).

Ijin UPHHK-HA PD. Panca Karya diperbaharui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 14/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 12 September 2017 dengan luas ± 59.515 ha. PD. Panca Karya adalah salah satu pemegang saham IUPHHK-HA PT. Gema Hutan Lestari. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Buru Selatan. Gambar 5 menunjukkan peta konsesi PD. Panca Karya.

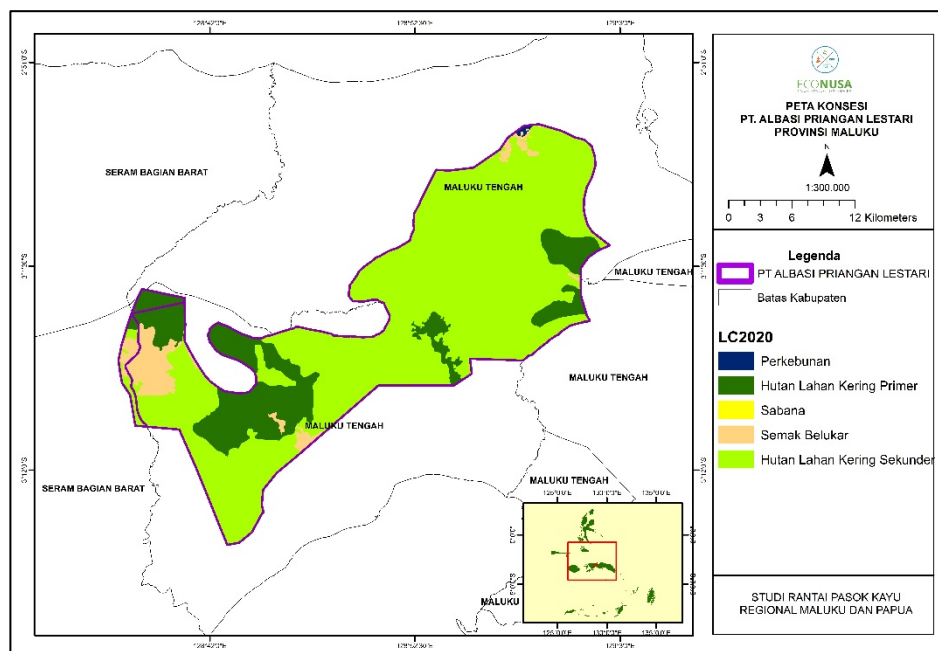


Gambar 5. Peta Konsesi PD. Panca Karya

PD. Panca Karya memiliki sertifikat PHPL dengan Nomor: 693/SIC/Dirut/IX/2017 PD. Panca Karya melalui konsultan Sarbi Penyampaian Permohonan Pengumuman Rencana Penilikan III Kinerja PHPL dan VLK IUPHHK-HA PD Panca Karya, Provinsi Maluku kepada Sekretaris Direktorat Jenderal PHL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lt. V, Jakarta dengan nomor surat 884/SIC/Dirut/X/2021 pada tanggal 12 Oktober 2021.

PT. Albasi Priangan Lestari

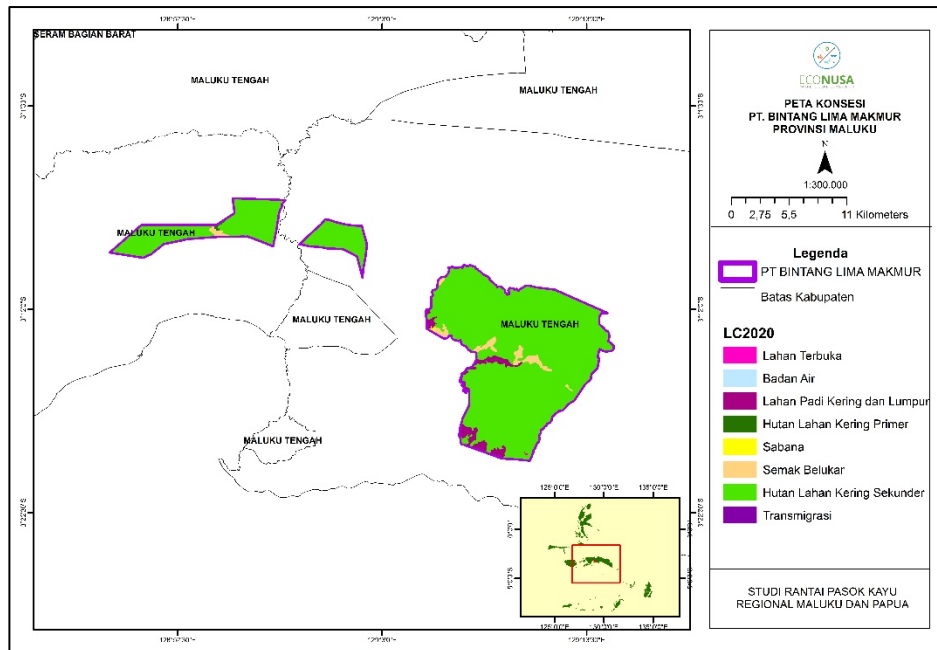
IUPHHK-HA PT. Albasi Priangan Lestari memiliki ijin nomor 230/Menhut-II/2011 tanggal 20 April 2011 yang berlokasi di Kabupaten Seram Provinsi Maluku. Hasil pengambilan keputusan: IUPHHK-HT PT. Albasi Priangan Lestari telah "memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS". Verifikasi Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) dengan Nomor: SLK.112/ASERT/LVLK-O11-IDN, masa berlaku 5 Desember 2017 sampai dengan 4 Desember 2020. Perusahaan ini berencana sedang melaksanakan audit PHPL oleh Ayamaru. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Denny Wijaya. Peta konsesi PT. Albasi Priangan Lestari dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Peta Konsesi PT. Albasi Priangan Lestari

PT. Bintang Lima Makmur

IUPHHK-HA PT. Bintang Lima Makmur melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.537/Menhut-II/2012, Tanggal 26 September 2012 memiliki konsesi seluas ± 24.550 ha di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Saham mayoritas perusahaan ini adalah Putri Permatasari Kardinal. Gambar 7 menunjukkan peta konsesi PT. Bintang Lima Makmur.

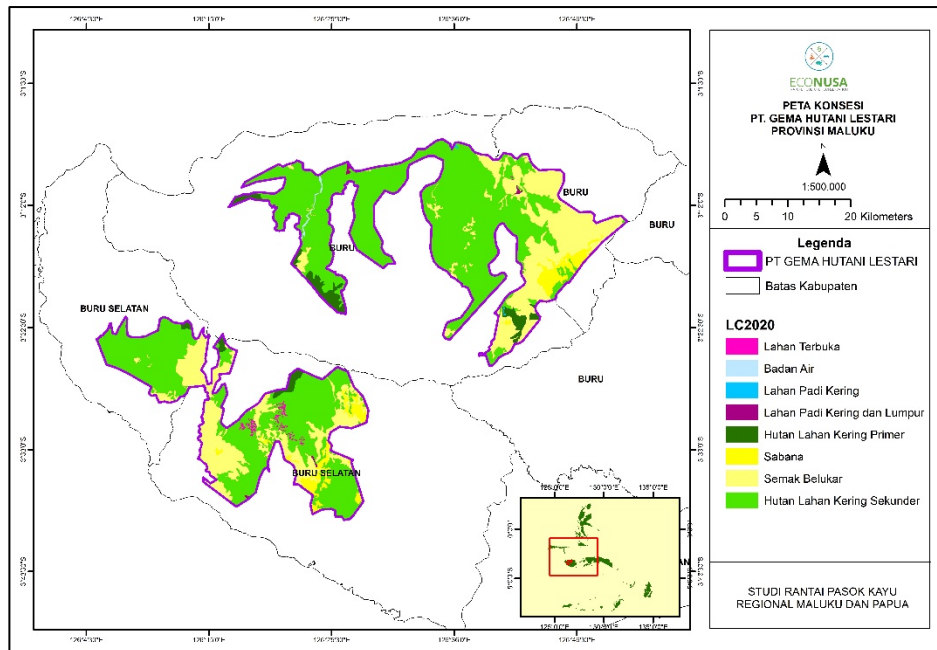


Gambar 7. Peta Konsesi PT. Bintang Lima Makmur

LPPHPL Garda Mutu Prima melaksanakan kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap PT. Bintang Lima Makmur Berdasarkan hasil pengambilan keputusan, bahwa Auditee tersebut dinyatakan “MEMENUHI” standar penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 dengan predikat “SEDANG“, sehingga layak diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh di Bogor, 28 Juli 2021 oleh PT. Garda Mutu Prima.

PT. Gema Hutan Lestari

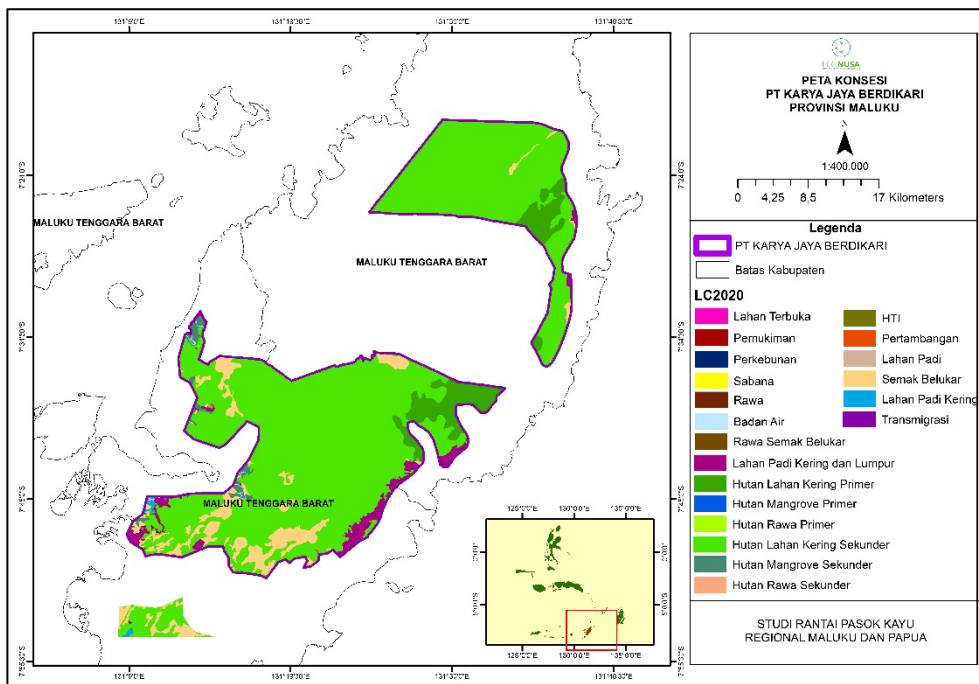
Ijin IUPHHK- HA PT. Gema Hutani Lestari melalui Nomor: SK.951/Kpts-II/1999 Tanggal 14 Oktober 1999 dengan luas Areal ± 148.450 ha. Dokumen Penilaian kinerja PHPL yang ditemukan hanya tahun 2014. Pemegang saham terdiri dari PT. Gema Sanubari, PT. Inhutani I (BUMN), PD. Panca Karya, Koperasi Serba Usaha Likuspera, Koperasi Gema Persada Leisela, Omperasi Satria Madang Pura dan Koperasi Karyawan Gema Usaha. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Andy Indigo dan Jacqueline Sitorus sehingga PT. Gema Hutani Lestari diindikasikan berafiliasi dengan Gama Group. Peta konsesi PT. Gema Hutani Lestari dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Peta konsesi PT. Gema Hutani Lestari

PT. Karya Jaya Berdikari

PT. Karya Jaya Berdikari memiliki konsesi berdasarkan SK.117/Menhut-II/2009 tanggal 19 Mei 2009 dengan luas 93.980 ha yang secara administratif terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Gambar 9 menunjukkan peta konsesi PT. Karya Jaya Berdikari. Saham mayoritas perusahaan ini dimiliki oleh Kevin Tobing dan Sik Romi Wongso. Perusahaan ini memiliki sertifikat PHPL yang dikeluarkan tahun 2020 oleh Alam Sentra Sertifikasi.



Gambar 9. Peta Konsesi PT. Karya Jaya Berdikari

Bupati Tanimbar Petrus Patlolon kembali mengeluarkan surat penghentian sementara atau moratorium IUPHHK-HA PT. Karya Jaya Berdikari melalui surat nomor 552/785/2019 tertanggal 26 Juni 2019. Surat ini menindaklanjuti surat pemberhentian atau moratorium Gubernur Provinsi Maluku (Satu Maluku, 2019).

PT. Karya Jaya Berdikari di duga telah melakukan penebangan hutan melebihi RKT yang telah ditentukan. Dugaan ini, berdasarkan hasil peninjauan langsung dilapangan dan penyelidikan Satuan Tim Pemerhati Lingkungan yang terbentuk di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, lewat alat GPS pengukur lokasi koordinat areal HPH, sesuai RKT terakhir. Dari hasil peninjauan dan GPS di ketahui bahwa pengeoperasian HPH telah melewati batas garis koordinat yang ditentukan dan memasuki wilayah hutan hak ulayat Desa Lelingluan di bagian Barat -Utara Pulau Yamdena (Pelita Maluku, 2019).

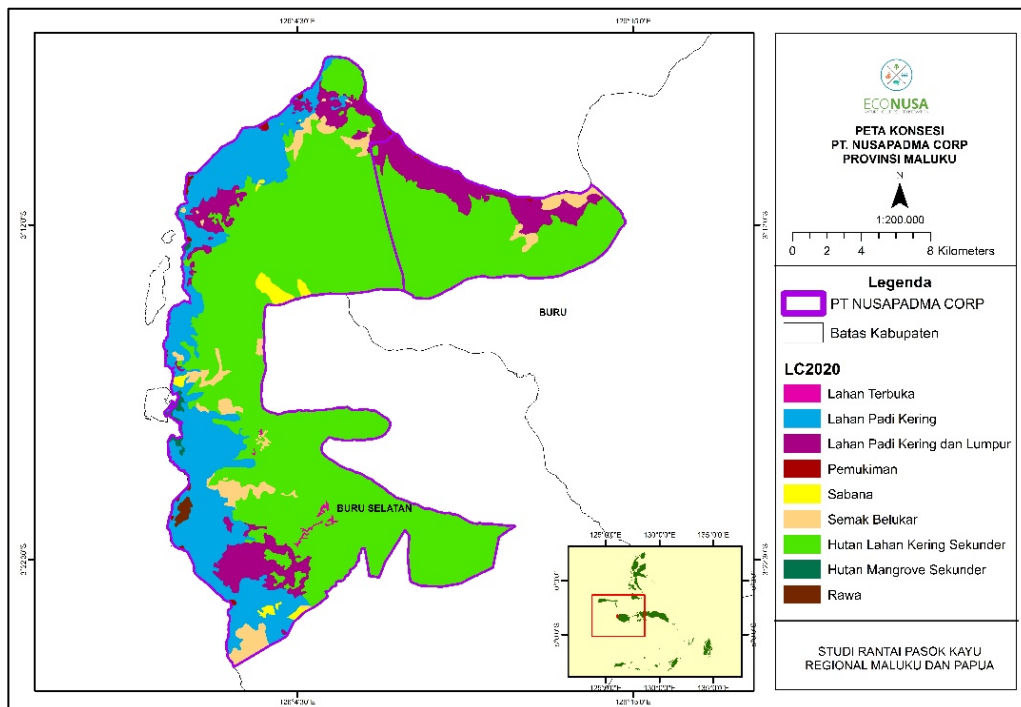
PT. Maluku Sentosa

Ijin PT. Maluku sentosa melalui SK IUPHHK-HA SK Bupati Baru Nomor: 522-11-72 Tahun 2001 tanggal 27 Agustus 2001 dan SK Menhut Nomor: 377/Menhut-VI/2004 tanggal 24 September 2004. Luas perusahaan ini ± 12.600 ha dan berlokasi di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Perusahaan ini diketahui pernah memiliki dokumen SVLK yang penilaiannya dilakukan tahun 2015.

PT. Maluku Sentosa Dituntut Selesaikan Hak Masyarakat Adat oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Garda NKRI Maluku (Tribun Maluku, 2019). Perusahaan ini memiliki sertifikat PHPL tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Ayamaru.

PT. Nusapadma Corp

Ijin PT. Nusapadma Corp melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.94/MenhutII/2005 tanggal 12 April 2005 dengan luas ± 39.920 ha. Secara administratif perusahaan ini berada di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Pada tahun 2016 perusahaan ini mendapatkan sertifikat PHPL dengan predikat sedang. Perusahaan ini diduga melakukan pengrusakan lingkungan di Areal Warumbia dan Anak Sungai Pajalale (Radar Tipikor, 2021). Saham mayoritas perusahaan ini dimiliki oleh Fery Tanaya. Fery Tanaya pernah diduga melakukan korupsi atas lahan PLN (iNews Maluku, 2021). Peta konsesi PT. Nusapadma Corp dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Peta Konsesi PT. Nusapadma Corp

PT. Prima Bumi Sakti

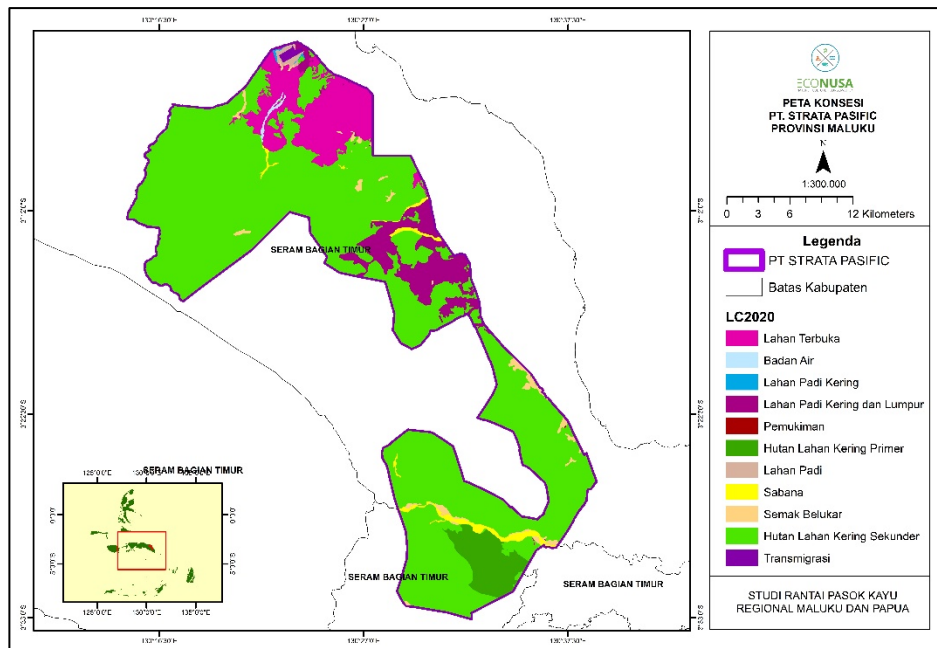
IUPHHK-HA PT Prima Bumi Sakti Daya (PBSD) yang berlokasi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Perusahaan ini tidak ditemukan di Ditjen AHU. (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, 2021) menemukan hal sebagai berikut:

- Pengaturan tata batas areal konsensi tidak dilakukan dan tidak melibatkan masyarakat Desa Tum Kecamatan Werinama Seram Bagian Timur.
- Ditengarai adanya penebangan yang dilakukan PT PBSD tidak sesuai RKT yang telah disahkan, bahkan ada yang berada di luar areal konsesi.
- Perusahaan melakukan penebangan di daerah hutan lindung dan pinggir sungai yang dapat menyebabkan erosi dan banjir yang parah. Perusahaan menggunakan Kali Fiaka dan Sungai Malal sebagai jalur transportasi kayu log hasil tebangan.
- Janji perusahaan kepada masyarakat tidak di tepati. Seharusnya masyarakat mendapatkan Rp. 5.000/pengapalan, namun hingga 11 kali pengapalan belum satupun dibayarkan. Kesepakatan pemberian 100 lembar seng dan 30 sak semen oleh perusahaan , sampai saat pemantauan dilakukan baru direalisasikan sejumlah tujuh lembar seng dan sembilan sak semen.

PT. Strata Pasific

PT. Strata Pasific memperoleh ijin melalui SK.774/Menhut-II/2013 seluas 73.365 ha di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Budi Yulianto dan Putri Permatasari Kardinal. Perusahaan ini mendapatkan sorotan karena tuntutan masyarakat dan OKP terhadap DPRD Kabupaten SBT atas izin operasi

yang saat ini di laksanakan di perusahaan tersebut (DPR Seram Bagian Timur, 2019). Gambar 11 menunjukkan peta konsesi PT. Strata Pasific.



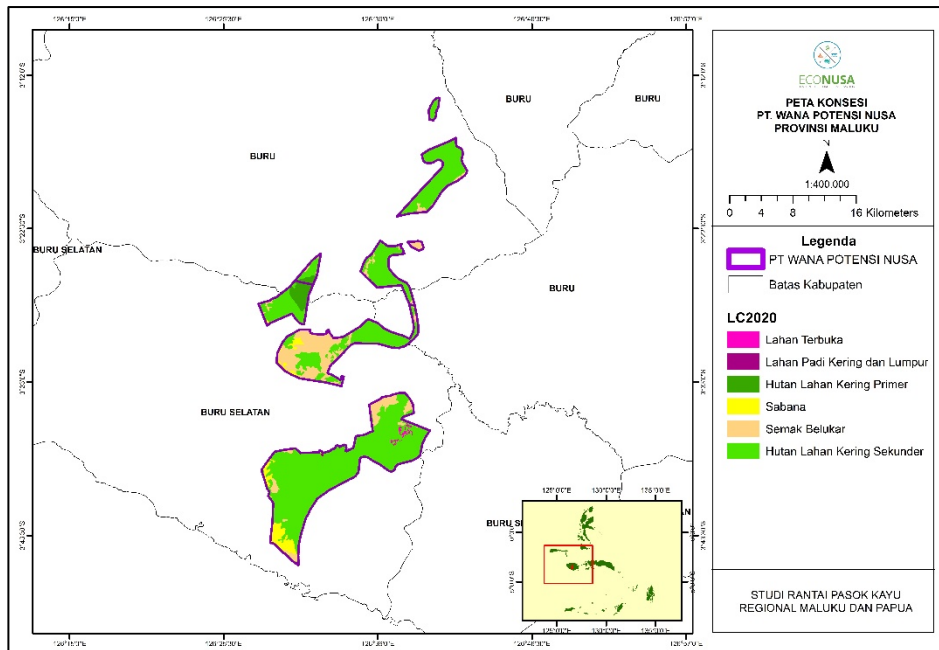
Gambar 11. Peta Konsesi PT. Strata Pasific

PT. Talisan Mas

Berdasarkan SK.346/Menhut-II/2008 PT. Talisan Mas memiliki konsesi seluas 54.750 ha yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah. Perusahaan ini memiliki dokumen SVLK tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Garda Mutu Prima. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Suzana Theodoria dan Sally Marisa Silitonga.

PT. Wana Potensi Nusa

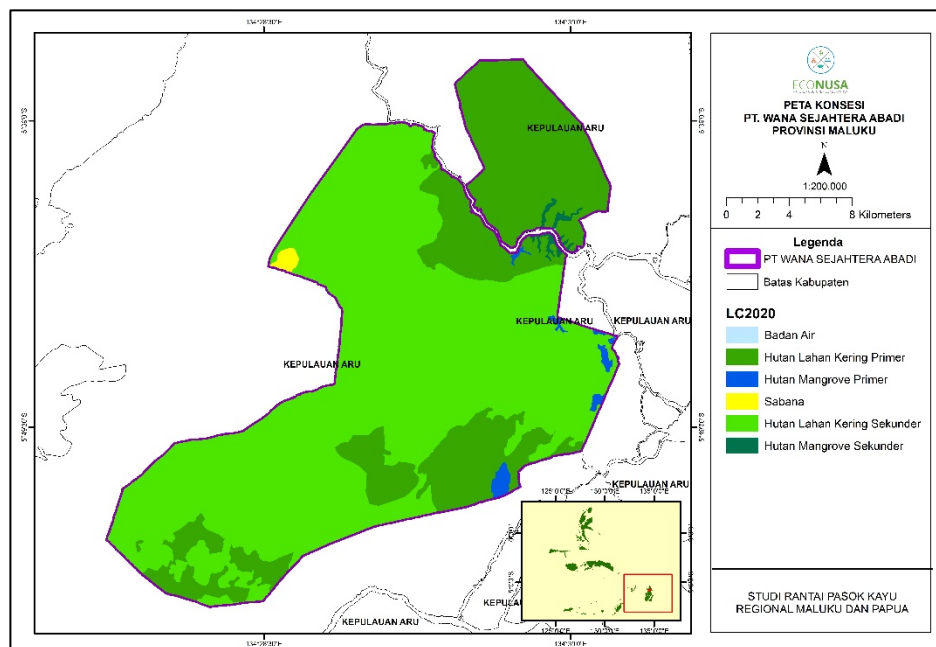
Perusahaan ini memperoleh ijin melalui SK Nomor 26/1/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016 dengan luas 28.950 ha. Secara administratif terletak di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Peta konsesi PT. Wana Potensi Nusa dapat dilihat pada Gambar 12. Perusahaan ini memperoleh sertifikat SVK yang berlaku mulai dari tahun 2007-2020. Selain itu memperoleh dokumen PHPL dengan predikat sedang. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Nugroho Hendarto.



Gambar 12. Peta Konsesi PT. Wana Potensi Nusa

PT. Wana Sejahtera Abadi

Perusahaan ini memperoleh izin melalui SK.426/Menhut-II/2012 dengan luas 54.560 ha dan terletak di Kabupaten Kepulauan Aru. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Johaners Setiawan Santosa. Gambar 13 menunjukkan peta konsesi PT. Wana Sejahtera Abadi.



Gambar 13. Peta Konsesi PT. Wana Sejahtera Abadi

PT. Waenibe Wood Industries

PT. Waenibe Wood Industries memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.4601/Menhut-VI/2005 tanggal 27 September 2005. Selanjutnya diperbaharui menjadi SK Nomor.79/VI/BPPHH-2/2009 26/02/2009. Kantor pusat PT. Waenibe Wood Industries beralamat di Wisma Barito Pasific, Jalan S.Parman Kavling 62-63, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk kantor cabang beralamat di Desa Waenibe, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. PT. Waenibe Wood Industries masih membayar PNBP pada tahun 2019 (KLHK, 2020). Saham mayoritas perusahaan ini dimiliki oleh Fery Nataya.

PT. Waenibe Wood Industries membutuhkan bahan baku kayu 3000 m³ dalam sebulan (Maluku Post, 2019). Pada tahun 2015 produksi kayu olahan PT. Waenibe Wood Industries yaitu 1.428,32 m³, pada tahun 2016 sebanyak 1.470,44 m³, pada tahun 2017 sebanyak 2.428,43 m³ dan pada tahun 2018 menjadi 0.00 m³ (BPS Maluku, 2019). Kapasitas produksi PT. Waenibe Wood Industries yaitu >6 000 m³ (Kayu Lapis 18.000 m³/tahun, Veneer 36.000 m³/tahun dan Kayu Gergajian 42.000 m³/tahun (Bidik News 2019).

Pada tanggal 14 Juni 2019, dikutip dari (Riza, 2019) kayu balok asal Ambon yang dikirim ke Aceh melalui PT. Waenibe Wood Industri, diangkut kapal tongkang jenis TK Sun Lion, dan TB. Cempaka Djaja, berhasil lolos tanpa ada pengukuran ulang oleh petugas Dinas Kehutanan, dan diduga merupakan hasil pembalakan liar. Log kayu tersebut untuk kebutuhan *plywood* dan pabrik triplek. PT. Waenibe Wood Industries mendapatkan peringatan Proper Hitam, artinya belum taat atau kurang taat dalam menjalankan peraturan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Training Proper, 2013).

Selama periode September 2014 s/d Agustus 2015, bahan baku kayu bulat PT. Waenibe Wood Industri dipasok oleh PT. Poleko Yubarsons dan Koperasi Wailo Wanalestari. Selain itu Antara Bulan November- Desember 2015 PT. Waenibe Wood Industri mendapat *supply* kayu sebanyak 338 kayu bulat, terdiri atas 297 batang kelompok Meranti dan 41 batang kelompok Rimba Campuran. Partai kayu pertama berasal dari PT. Maluku Sentosa. Partai kayu kedua sebanyak 268 batang kayu bulat, keseluruhannya dari kelompok Meranti. Partai kayu kedua berasal dari PT. Gema Hutani Lestari. Partai kayu ketiga sebanyak 264 batang kayu bulat, keseluruhannya dari kelompok Meranti (Siregar ET, 2017).

Pada tanggal 21 – 24 September 2021 perusahaan ini melakukan re-sertifikasi VLK dengan hasil baik. Sedangkan untuk PHPL hasilnya sedang. Perusahaan ini memiliki pabrik di Desa Waspait, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Dengan kapasitas izin 18.000 m³/tahun (Kayu Lapis), 36.000 m³/tahun (Veneer), dan 42.000 m³/tahun (Kayu Gergajian). Jenis produk perusahaan ini adalah Kayu lapis, Veneer dan Kayu Gergajian.

Empat IUPHHK perusahaan yang teridentifikasi seperti PT. Gema Hutani Lestari, PT. Wana Potensi Nusa, PT. Maluku Sentosa dan Koperasi Wailo Wanalestari menjual hasil hutan kayu kepada PT. Waenibe Wood Industries dan/atau PT. Surya Saritama dan/atau PT. Basirih Industrial.

PT. Basirih Industiral mendapatkan IUIPHHK No SK.119/ MENHUT-VI/BPPHH/2006 IUI No.I/63/IU/PMDN/2017 dan Pabrik Berlokasi di Jl. Telaga Biru, Trisakti, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Kapasitas Kayu Lapis PT. Basirih Industiral yaitu 55.000 m³/tahun, *Veneer*: 50.000 m³/tahun, Pengergajian Kayu: 24.000 m³/tahun, *Container Flooring Plywood* 15.000 m³/tahun, *Film Face Plywood* 36.000 m³/tahun, *Moulding* 3.000 m³/tahun.

Pemasok kayu Tahun 2018 ke PT. Basirih Industiral yaitu:

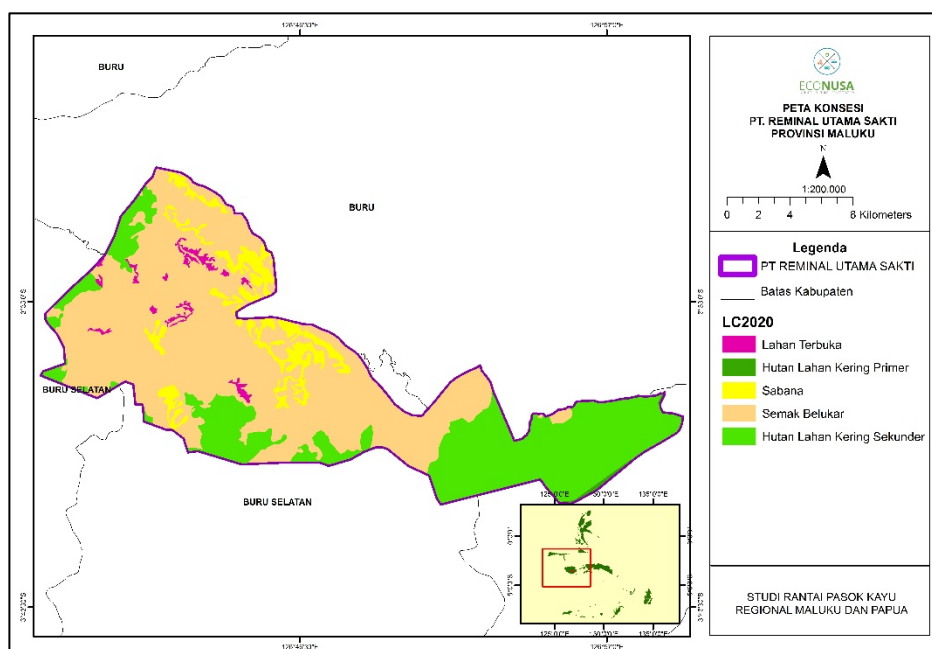
1. PT. Bumi Berkat Sejahtera (4.000 m³)
2. PT. Barito Putera (8.200 m³)
3. PT. Nusantara Alam Raya Sejahtera (7.164,40 m³)
4. PT. Central Kalimantan Abadi (2.002,49 m³)
5. PT. Intrado Jaya Intiga (1.514,92 m³)
6. PT. Olivera Iping (3.162,13 m³)
7. PT. Tanjung Redeb Hutani (2.867,05 m³)
8. PT. Attaubah Jaya Bersama (2.265,06 m³)
9. PT. Wana Potensi Nusa (2.540,68 m³)
10. PT. Mardhika Insan Mulia (2.662,96 m³)
11. PT. Inhutani I Unit Labanan (4.308,90 m³)
12. PT. Minas Pagai Lumber (6.607,55 m³)
13. Koperasi Wailo Wana Lestari (2.516,68 m³)
14. PT. Berau Agro Kusuma (2.122,71 m³)
15. PT. Kayu Tribuana Rama (2.644,39 m³)
16. PT. Aya Yayang Indonesia (5.700 m³)
17. PT. Gaung Satyagraha Agrindo (3.675,09 m³)
18. PT. Fitamaya Asmapara (604,42 m³)
19. PT. Hutan Mulya (211,36 m³)
20. PT. Dwimajaya Utama (1.012,42 m³)
21. PT. Carus Indonesia (716,53 m³)
22. PT. Kayu Waja (236,66 m³)
23. PT. Sarana Piranti Utama (236,80 m³)
24. PT. Graha Sentosa Permai (181,63 m³)
25. PT. Sikatan Wana Raya (74,27 m³)
26. PT. Hutan Domas Raya (243,43 m³)
27. PT. Gunung Meranti (8.864,20 m³)
28. Bapak Nur Ali (Kayu Rakyat) 30 m³/tahun)
29. PT. Dasa Intiga (Volume *veneer* 700 m³)
30. PT. Taiyoung Engreen (Volume *veneer* 500 m³)

PT. Katingan Timber Celebes (d/h PT. Sentosa Pratama)

Ijin perusahaan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : SK. 492/Menhut-II/2006 tanggal 07 November 2006 Jo. SK Gubernur Maluku No. 538.3/1508 tanggal 07 Juli 2010. Industri Primer Pengolahan kayu dengan produk kayu gergajian atau pemegang IUIPHHK (Izin Usaha Industri primer hasil hutan kayu) dengan kapasitas 6,000 m³/tahun. Jenis produk Kayu Gergajian. Jenis kayu yang digunakan Meranti (*Shorea spp*). Kapasitas Kayu Gergajian : 6.000 m³/tahun. Pemegang saham PT. Makassar Intisejahtera : 30.380 lembar saham (98 %) PT. Sinar Mamuju Ceria : 620 lembar saham (2%). Secara administratif berada di Kabupaten Buru, Propinsi Maluku. Factory : Dusun Waetabi, Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku, Indonesia. Kayu perusahaan ini kayu-kayu tersebut dipasok oleh PT Gema Hutani Lestari (GHL), di Desa Wamlana, Kecamatan Fena Leisela, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, 2019). Pada Mei 2021 sertifikat SVLK perusahaan ini dibekukan karena sampai waktu ditetapkan perusahaan ini tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan audit I. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Andy Indigo dan Jacqueline Sitorus.

PT. Reminal Utama Sakti

Perusahaan ini memperoleh ijin melalui SK-IUPHHK-HA Nomor 720/Menhut-II/2013 pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan luas konsesi 32.385 ha yang berlokasi di Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Peta konsesi PT. Reminal Utama Sakti dapat dilihat pada Gambar 14. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini adalah Amir Gaos Latuconsina.



Gambar 14. Peta Konsesi PT. Reminal Utama Sakti

5.2 Kepemilikan IUPHK-HA dan HT Provinsi Maluku Utara

IUPHHK-HA di Provinsi Maluku Utara yang terdeteksi berjumlah 14 yang terdiri dari PT. Bela Berkas Anugerah, PT. Tunas Pusaka Mandiri, PT. Nusa Niwe Indah, PT. Widuri Utama Timber, PT. Wana Kencana Sejati, PT. Nusapadma, PT. TAIWI, PT. Mangole Timber, PT. Telaga Bhakti Persada, PT. Wijaya Kencana Indonesia, PT. Poleko Yurbarson Trad, PT. Pusaka Agro Sejahtera, PT. Mahakarya Agra Pesona dan PT. Mohtra Agung Persada. Sedangkan IUPHHK-HT terdiri dari PT. Kalpika Wanatama dan PT. Kirana Cakrawala (Tabel 2).

Tabel 2 IUPHHK-HA Provinsi Maluku Utara

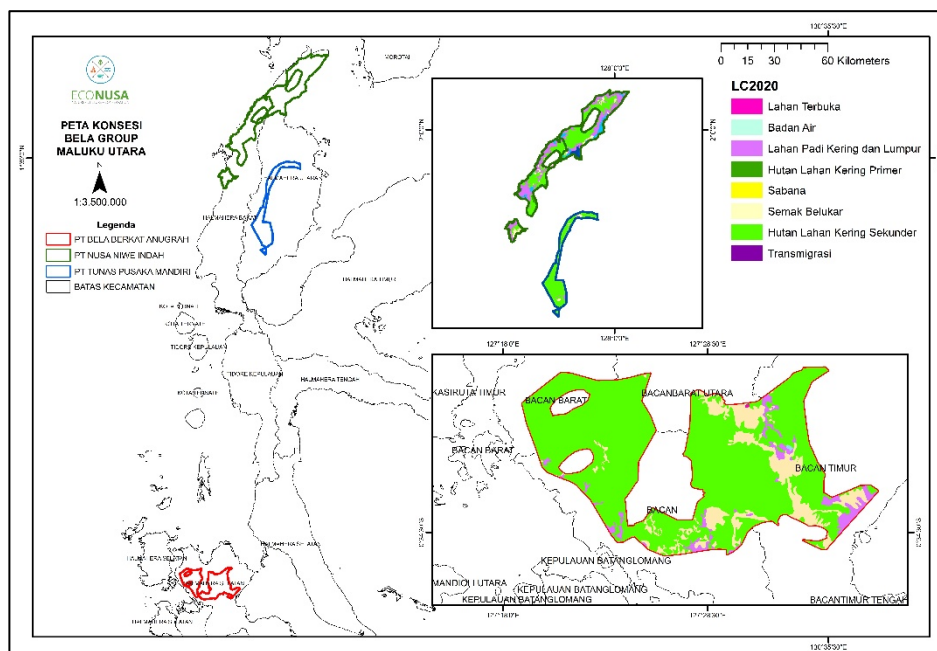
No	Nama Perusahaan	Group	Pemilik Grup	Luas Konsesi (ha)
1	PT. Bela Berkas Anugerah	Bela Group	Keluarga Benny Laos	33.880
2	PT. Tunas Pusaka Mandiri	Bela Group	Keluarga Benny Laos	24.430
3	PT. Nusa Niwe Indah	Bela Group	Keluarga Benny Laos	73.500
4	PT. Widuri Utama Timber	Bela Group	Keluarga Benny Laos	35.000
5	PT. Wana Kencana Sejati	Nusapadma Corp	Rusli Lohisto	47.410
	PT. Wana Kencana Sejati II			45.825
6	PT. Nusapadma	Nusapadma Corp	Rusli Lohisto	39.920
7	PT. TAIWI	Barito Pacific Grup	Prajogo Pangestu	73.375
8	PT. Mangole Timber	Barito Pacific Grup	Prajogo Pangestu	-
9	PT. Telaga Bhakti Persada	Non Group	Abu Permadi, Subli, Akhmad Faisal dan Noor Asyikin	63.405
10	PT. Wijaya Kencana Indonesia	Non Group	Sik, Ronny Wongso	38.695
11	PT. Poleko Yurbarson Trad.	Non Group	Rina Tanny	86.599
12	PT. Pusaka Agro Sejahtera	Non-Group	Tony Putra Yasa	-
13	PT. Mahakarya Agra Pesona	Akta tidak ditemukan	Akta tidak ditemukan	36.860
14	PT. Mohtra Agung Persada	Non Group	Afrizel	50.940
15	PT. Kalpika Wanatama	Barito Pacific	Prajogo Pangestu	11.242
16	PT. Kirana Cakrawala	Barito Pacific	Prajogo Pangestu	21.265

BELA GROUP

Bela Group adalah perusahaan milik keluarga Benny Laos dengan luas keseluruhan sekitar 166.810 ha yang terdiri dari PT. Widuri Utama Timber, PT. Tunas Pusaka Mandiri, PT. Nusa Niwe Indah dan PT. Bela Berkas Anugerah.

Gambar 15 menunjukkan peta konsesi Bela Group. Benny Laos adalah Bupati Kabupaten Morotai periode 2017-2022 dan pernah mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2013—2018. Diacu dalam (Timur, 2019) Benny Laos adalah bupati terkaya di Indonesia dengan harta kekayaan mencapai Rp. 523.537.427.644. Selanjutnya menurut (Dzulfaroh AN, 2021) yang didasarkan pada LHKPN 2020 tahun 2020 bahwa Benny Laos masih menjadi Bupati Terkaya No 1 dengan harta kekayaan Rp 510.510.014.904.

Berdasarkan hasil penelusuran pada dokumen yang didapatkan di Dirjen AHU. Perusahaan IUPHHK-HA milik Benny Laos sebagai sahamnya dimiliki oleh Istrinya Sherly Tjoanda dan Robbert Tjoanda yang diduga masih ada ikatan kekeluargaan dengan istri Benny Laos.

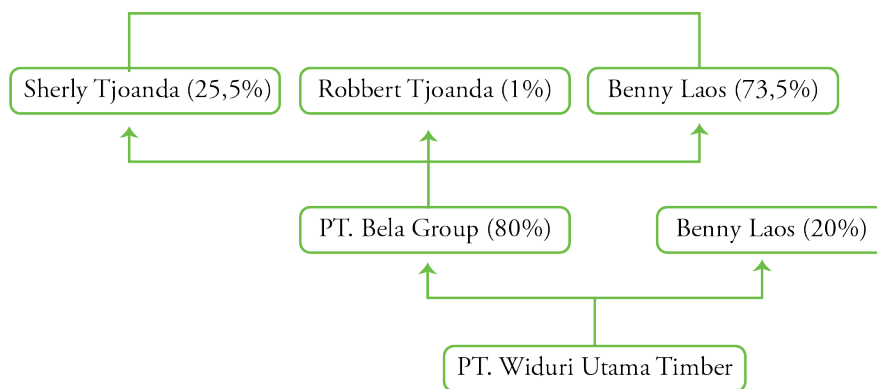


Gambar 15. Peta Konsesi Bela Group

PT. Widuri Utama Timber

PT. Widuri Utama Timber kepemilikan sahamnya 80% dimiliki oleh PT. Bela Group dan 20% dimiliki oleh Benny Laos. Sedangkan PT. Bela Group sahamnya dimiliki oleh Benny Laos sebanyak 73.5%, Sherly Tjoanda yang merupakan istri Benny Laos (25.5%) dan Robbert Tjoanda (1%). Struktur pemegang saham dapat dilihat pada Gambar 16.

Luas konsesi IUPPHK-HA PT. Widuri Utama Timber berdasarkan SK Nomor 1016/Kpts-I I/92 yaitu 35.000. Perusahaan ini berkedudukan di Jl. Setiabudi Tengah Nomor 35 Kota Administrasi Jakarta Selatan.

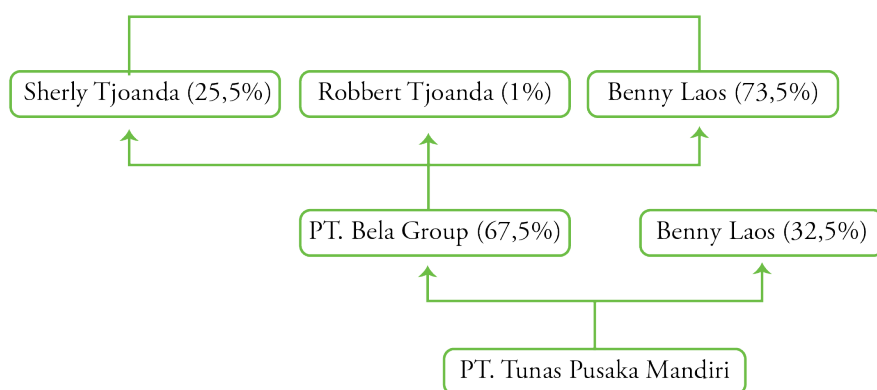


Gambar 16. Struktur Pemegang Saham PT. Widuri Utama Timber

PT. Tunas Pusaka Mandiri

Secara geografis PT. Tunas Pusaka terletak antara 1°23' 10,454" N dan 127°45' 51,108" E dan memiliki luas IUPPHK-HA sebesar 24.430 berdasarkan SK Nomor 351/Menhut-II/2006. Kedudukan perusahaan ini beralamat di Jl. Setiabudi Tengah Nomor 35 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Perusahaan ini telah melakukan Audit PHPL yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2013 s.d 22 April 2013 (Global Resource, 2016). Setelah sebelumnya pada tahun 2013 Global Resources telah mencabut sertifikat PHPL melalui Surat Keputusan Direktur PT. Global Resources Sertifikasi Nomor 017/Kpts-GRS/VII/2013 (Global Resources, 2013). Berdasarkan data yang didapatkan dari website KPK <https://acch.kpk.go.id/> PT. Tunas Pusaka Mandiri non aktif (Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2015). Berdasarkan penelusuran Akta Melalui Dirjen AHU tanggal akta PT. Tunas Pusaka Mandiri data perseroan dirubah pada tanggal 27 Maret 2018.

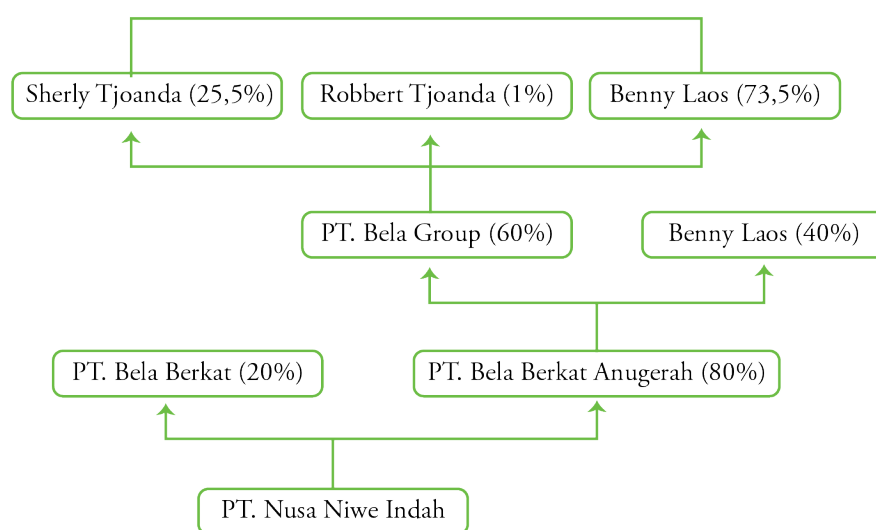
Saham PT. Tunas Pusaka Mandiri dimiliki oleh Benny Loas sebesar 32.5% dan PT. Bela Group sebesar 67.5%. Sedangkan PT. Bela Group sahamnya dimiliki oleh Benny Laos sebanyak 73.5%, Sherly Tjoanda yang merupakan istri Benny Laos (25.5%) dan Robbert Tjoanda memegang saham sebesar (1%).



Gambar 17. Struktur Pemegang Saham PT. Tunas Pusaka Mandiri

PT. Nusa Niwe Indah

Secara geografis PT. Nusa Niwe Indah terletak pada koordinat 1°54' 19,863" N dan 127°46' 51,614" E. PT. Nusa Niwe Indah mendapat ijin IUPHHK-HA berdasarkan SK Nomor 410/Menhut-II/04 dengan luas konsesi 73.500 ha. Saham PT. Nusa Niwe Indah dimiliki oleh PT. Bela Berkas Anugerah sebesar 80% saham dan PT. Bla Group sebesar 20%. PT. Bela Group sahamnya dimiliki oleh Benny Laos sebanyak 73.5%, Sherly Tjoanda yang merupakan istri Benny Laos (25.5%) dan Robbert Tjoanda memegang saham sebesar (1%). Sedangkan PT. Bela Berkas Anugerah sahamnya dimiliki oleh Benny Laos sebesar 40% dan PT Bela Group 60%.



Gambar 18. Struktur Pemegang Saham PT. Nusa Niwe Indah

Berdasarkan data yang didapatkan dari website KPK <https://acch.kpk.go.id/> PT. Nusa Niweh Indah statusnya Non Aktif (Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2015). Berdasarkan penelusuran Akta Melalui Dirjen AHU tanggal akta PT. Tunas Pusaka Mandiri data perseroan dirubah pada tanggal 12 Juni 2018. Kedudukan perusahaan ini beralamat di Jl. Mampang Prapatan XI Nomor 25 , Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

PT. Bela Berkas Anugerah

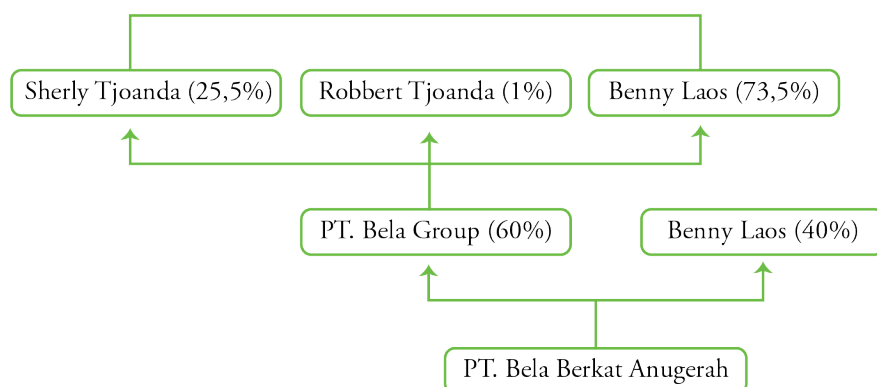
Secara geografis PT. Bela Berkas Anugerah terletak antara 0°30' 47,954" S dan 127°28' 25,719" E. PT. Bela Berkas Anugerah mendapatkan IUPHHK-HA melalui SK Nomor 389/Menhut-II/2006 dengna luas konsesi 33.880 ha. Penilaian PHPL dilakukan pada tanggal Tanggal 12 Juli 2016 dengan No SK 389/Menhut-II/2006 (Global Resources, 2006). Sampai tahun 2020 PT. Bela Berkas Anugerah masih membayar PNPB (KLHK, 2020).

JKPP atau Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JKPP, 2019) melaporkan bahwa terindikasi melakukan pelanggaran aktivitas produksi dengan menggunakan sungai Sayoang sebagai media untuk mengeluarkan kayu pada musim hujan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki penataan jalan produksi dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan menuju tempat mengumpulkan kayu atau log pond dengan melewati sungai dan kali. Pada bulan Mei 2019, JPIK Maluku

Utara lagi-lagi menemukan indikasi pelanggaran PT BBA. Kali ini terkait aktivitas pemuatan kayu yang dilakukan perusahaan di log pond atau dermaga angkut kayu, Desa Bori Kecamatan Bacan Barat. Dari proses pemantauan lapangan, ditemukan PT. BBA mengangkut kayu dengan menggunakan kapal Tuckboat Prasetya 10 dan Prasetya 15 dengan tujuan ke PT Sumber Graha Sejahtera, Palopo, Sulawesi Selatan. Jenis kayu yang berada di lokasi log pond sepintas terlihat adalah jenis kayu rimba campuran. Namun, setelah dilihat lebih teliti, ternyata terselip di dalam timbunan kayu tersebut ada jenis kayu merbau yang dilengkapi barcode. Tumpukan kayu merbau tersebut tersimpan rapi di sela-sela tumpukan kayu jenis rimba campuran sehingga tidak dikenali ketika hanya melihat dari jauh. “Ini mengindikasikan adanya upaya malpraktek perizinan yang dilakukan PT BBA dengan menyembunyikan kayu merbau dan dilaporkan hanya jenis kayu rimba campuran saja,” Bukan jumlah sedikit, pemantau menemukan tumpukan 40-100 pohon kayu merbau di lokasi penampungan PT BBA. Indikasi pelanggaran ini diperkuat saat menilik dokumen laporan perusahaan di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) KLHK yang tidak mencantumkan adanya jenis kayu merbau. Oleh karena itu, dugaan sementara pemantau, kayu merbau tersebut tidak dilaporkan ke SILK, atau memanipulasi laporan dengan menganggap kayu merbau sebagai jenis kayu rimba campuran. Selain bukti berupa tumpukan kayu merbau, pemantau juga memperoleh keterangan dari warga sekitar HPH perusahaan. Proses wawancara dengan warga setempat membenarkan bahwa sudah sejak lama PT BBA juga menebang kayu merbau.

Dalam proses penelusuran terkait informasi legalitas kayu tersebut, dinas terkait baik di Propinsi Maluku Utara maupun Halmahera Selatan belum juga mendapatkan data pemuatan kayu tersebut. Pihak yang ditemui beralasan operator yang bertugas mengakses data tersebut sedang tidak berada di tempat. Beberapa kali upaya mendatangi dinas terkait juga mengalami kendala yang sama. Selain itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh tim pemantau JPIK Sulawesi Selatan, PT SGS yang menjadi penerima kayu dari PT BBA memiliki pelabuhan khusus yang sangat tertutup. Kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh dua perusahaan tersebut untuk melakukan upaya pencucian kayu ilegal jenis merbau dari Maluku Utara. Saat ini tim pemantau belum bisa melaporkan pihak PT BBA ke pihak terkait. Saat ini pemantau masih mengumpulkan bukti untuk dilaporkan ke Kepada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara.

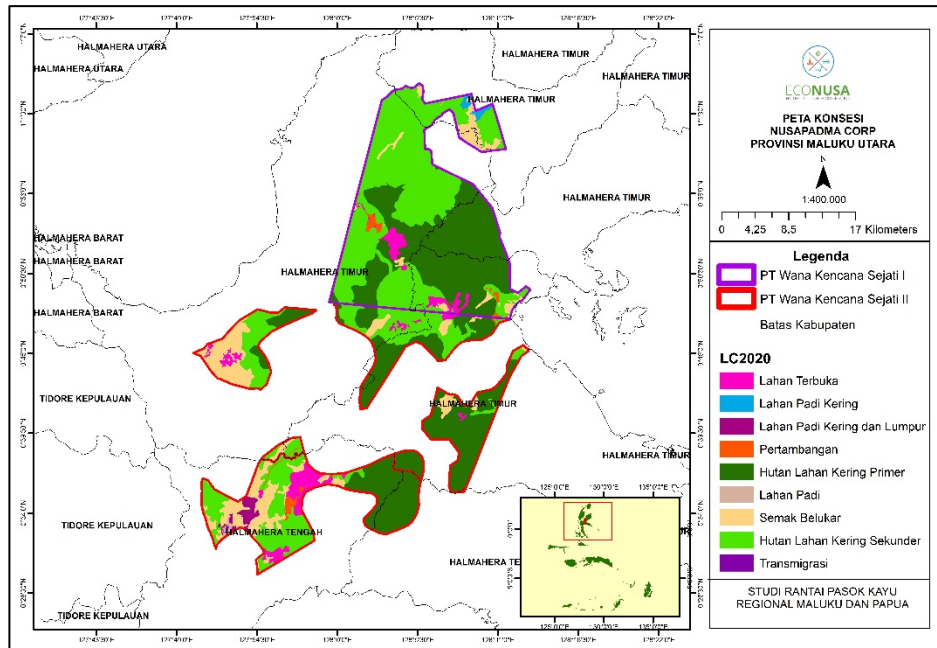
Pemegang saham PT. Bela Berkas Anugerah yaitu Benny Laos 40% dan PT. Bela Group 60%. Sedangkan Pemegang saham PT. Bela Berkas Anugerah sahamnya dimiliki oleh Benny Laos sebesar 40% dan PT Bela Group 60%.



Gambar 19. Struktur Pemegang Saham PT Bela Berkas Anugerah

NUSAPADMA CORPS

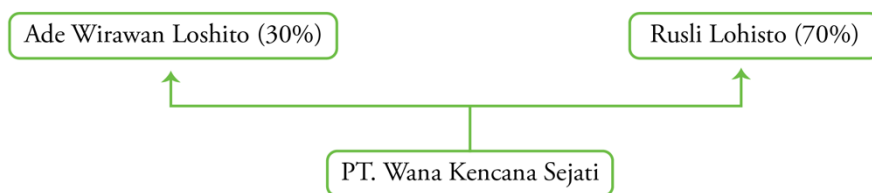
Pemilik Nusapadma Corps adalah Rusli Lohisto. IUPHHK-HA yang dimiliki oleh Rusli Lohisto di Maluku Utara adalah PT. Wana Kencana Sejati, PT. Nusapadma dan PT. Wana Kencana Sejati II. Rusli Lohisto juga pemegang saham dari PT. Halmahera Sukses Mineral sebanyak 6% (ESDM, 2021). Total luas konsesi Nusapadma Corps (3 IUPHHK-HA) yaitu sekitar 133.155 ha. Gambar 19 menunjukkan peta konsesi Nusapadma Corps.



Gambar 20. Peta Konsesi Nusapadma Corps

PT. Wana Kencana Sejati

Berdasarkan SK 95/Menhut-II/05 PT. Wana Kencana Sejati memiliki luas 47.410 ha. Pemegang saham PT. Wana Kencana Sejati yaitu Rusli Lohisto memegang 70% saham dan Ade Wirawan Loshito 30% saham.



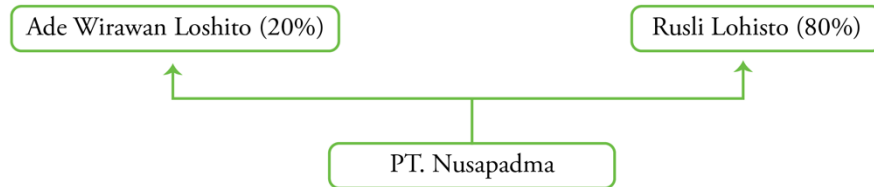
Gambar 21. Struktur Pemegang Saham PT. Wana Kencana Sejati

PT. Wana Kencana Sejati II

Berdasarkan SK Nomor 295/Menhut-II/07 memiliki luas sekitar 45.825 ha. Pemegang saham PT. Wana Kencana Sejati II.

PT. Nusapadma

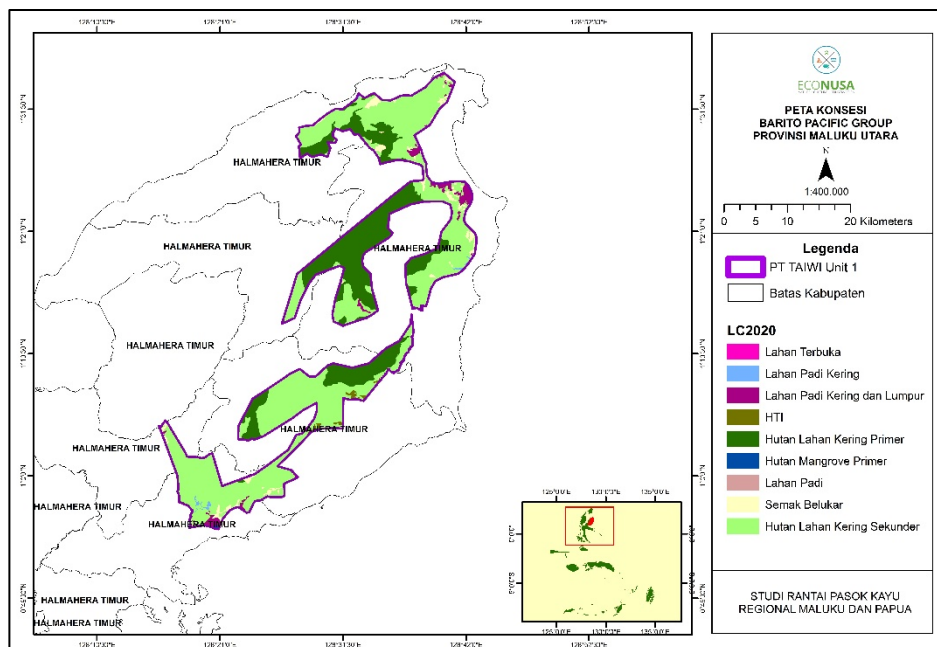
Berdasarkan SK Nomor 715/Kpts-II /93 memiliki luas 39.920 ha. Pemegang saham PT. Nusapadma yaitu Rusli Lohisto 80% dan Ade Wirawan Loshito 20%.



Gambar 22. Struktur Pemegang Saham PT. Nusapadma

BARITO PACIFIC GRUP

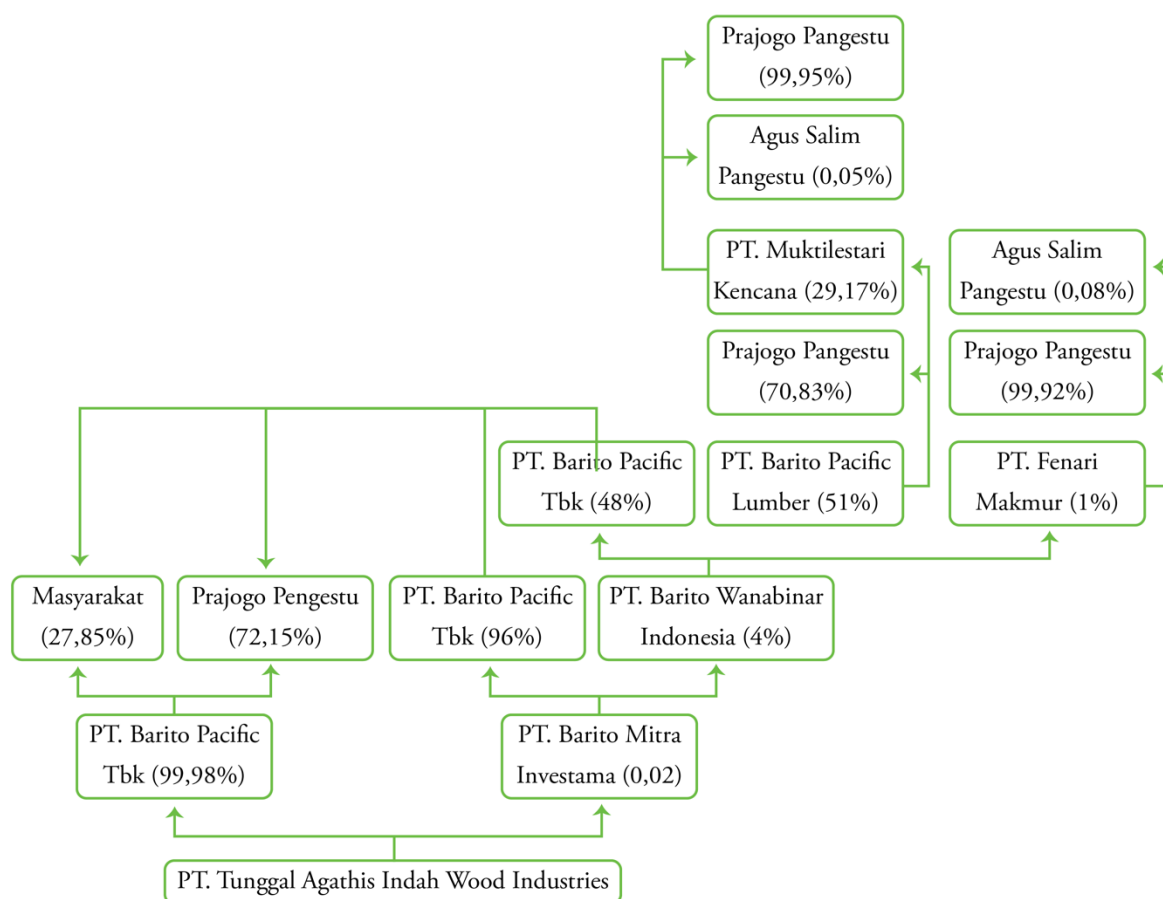
PT. Barito Pacific Tbk (IDX: BRPT) adalah perusahaan energi terintegrasi yang berbasis di Indonesia dengan berbagai aset di sektor energi dan industri (Barito Pasific, 2021). Perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah IPO dan melantai dibursa saham IDX. Perusahaan ini adalah milik Prajogo Pangestu dan lahir dengan nama Phang Djoem Phen di Sambas, Kalimantan Barat, pada tahun 1944 (Viva, 2021). IUPHHK milik PT. Barito Pacific di Provinsi Maluku adalah PT. TAIWI I, PT. TAIWI II, PT.Mangole Timber I dan PT. Mangole Timber II. Peta konsesi Barito Pacific Group dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 23. Peta Konsesi Barito Pacific Group

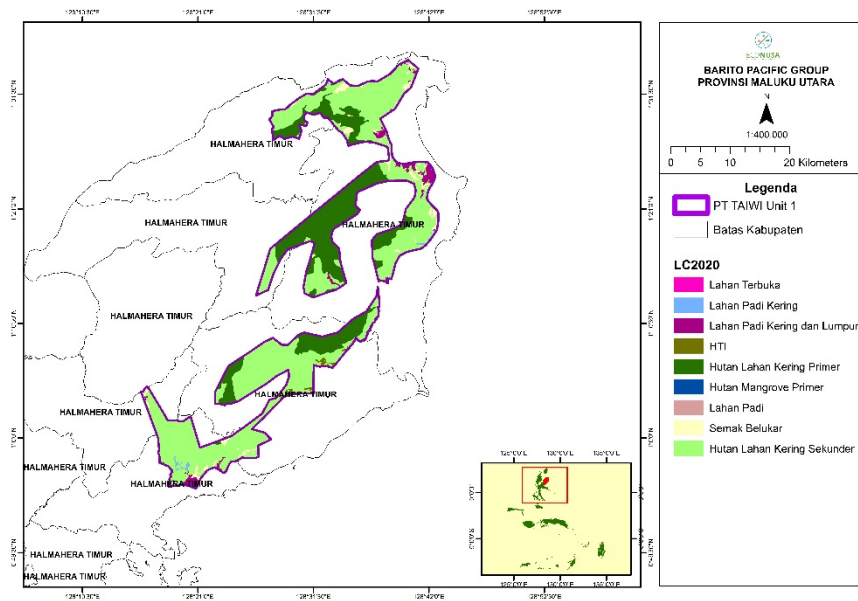
PT. TAIWI I dan II dan III

PT. TAIWI mendapatkan pembaharuan izin usaha indistri primer hasil hutan kayu di Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3147/MENHUT VI/BPPHH/2005 Tahun 2005 (Hukum Online, 2015). Berdasakan penelusuran akta notaris, kepemilikan saham mayoiertas PT. TAIWI dimiliki oleh Prajogo Pangestu.



Gambar 24. Struktur Pemegang Saham PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries

Berdasarkan SK Nomor 817/Kpts-II/1992 tanggal 19/08/1992 PT. TAIWI Unit 1 memiliki luas 160.000 ha, berdasarkan SK Nomor 394/Kpts-II/1992 PT. TAIWI unit 2 memiliki luas 42.300 ha dan berdasarkan SK Nomor No. 929/Kpts-II/1991 PT. TAIWI Unit 3 memiliki luas 55.000 ha. Total luas PT. TAIWI adalah 257.300 ha. Pada tahun 2009 PT. Taiwi Unit 1 melalui SK No. 368/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 memiliki luas 73.375 ha (Barito Pasific, 2019).



Gambar 25. Barito Pacific Group

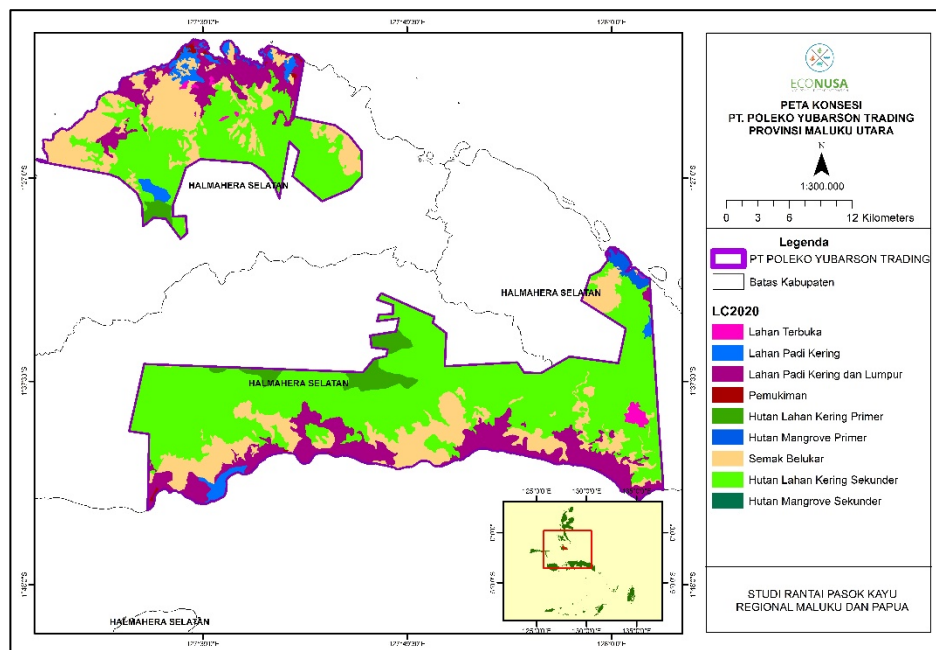
PT. Mangole Timber I, II dan III

Pada tahun 2006 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.364/MENHUT-IV/PRPHP/2006 tentang Persetujuan Dan Pengesahan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Ke Iv (2006 - 2010) atas nama PT. Mangole Timber Producers Unit II Propinsi Maluku. Pemegang saham perusahaan ini sebagai berikut

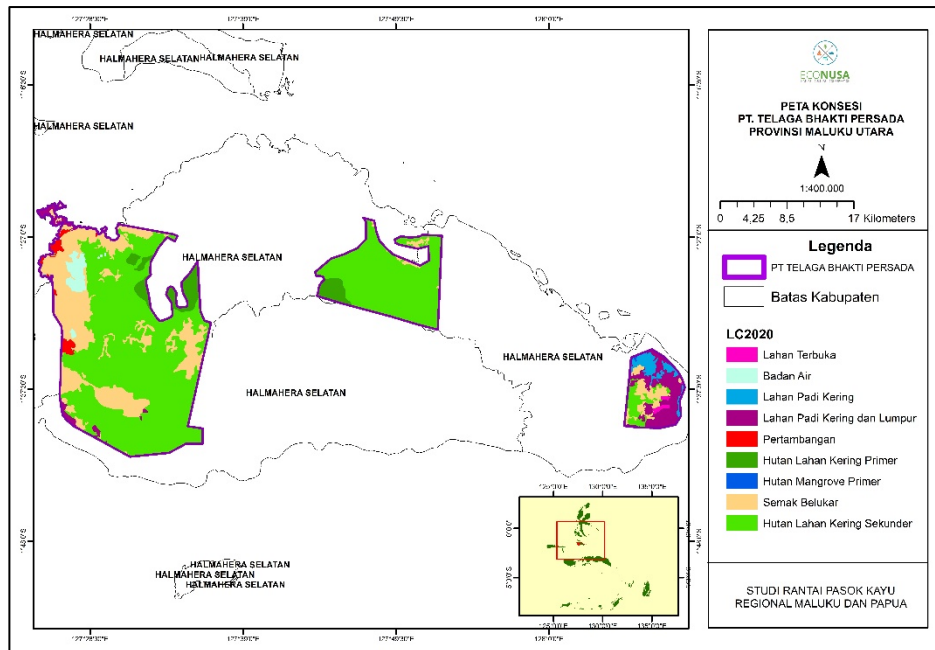
Perusahaan ini memiliki dokumen SVLK yang kegiatannya dilakukan pada tahun 2017 dan PHPL yang dilaksanakan pada tahun 2020 dan berpredikat sedang.

PT. Telaga Bhakti Persada

Perusahaan ini mendapatkan izin melalui SK Nomor SK.372/Menhut-II/2009 dengan luas 63.405 ha yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan. Gambar 24 menunjukkan peta konsesi PT. Telaga Bhakti Persada. Perusahaan ini memiliki dokumen PHPL pada tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Global Resources. Selain itu perusahaan ini memiliki sertifikat FSC yang dikeluarkan tahun 2021.



Gambar 27. Peta Konsesi PT. Poleko Yubarsons Trading Coy



Gambar 28. Peta Konsesi PT. Telaga Bhakti Persada

PT. Kalpika Wanatama

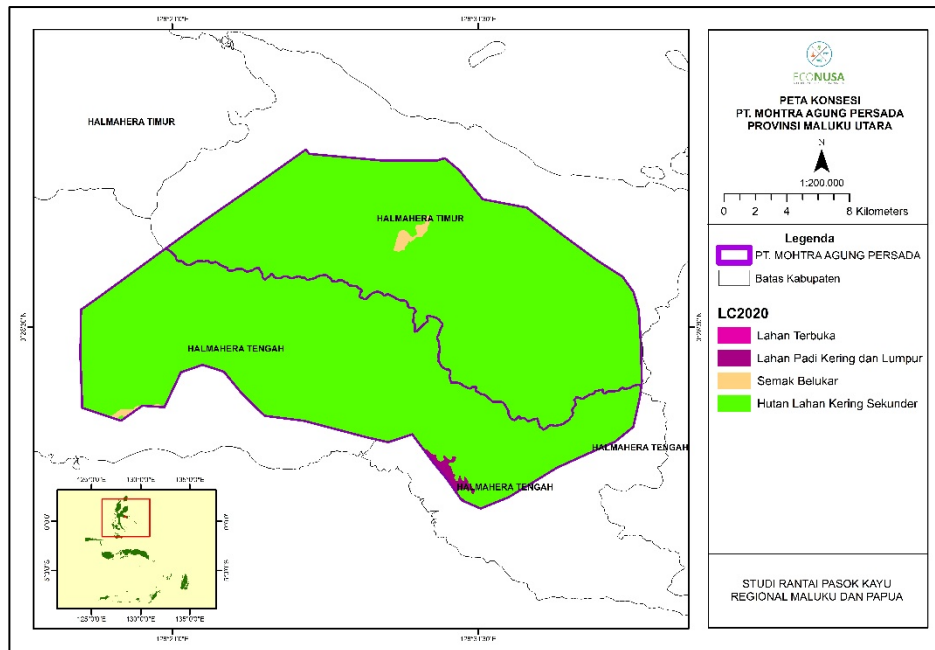
Berdasarkan SK Nomor 612/Menhut-II/2009 IUPHHK-HT ini memiliki luas 11.780 ha. Secara administrasi terletak di Kabupaten Pulau Talibu. Perusahaan tercatat memiliki dokumen SVLK tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Mutu Internasional.

PT. Kirana Cakrawala

Berdasarkan SK Nomor 184/KptsII/1997 perusahaan ini memiliki luas 21,265 ha dan secara administrasi terletak di Kabupaten Halmahera Timur.

PT. Mohtra Agung Persada

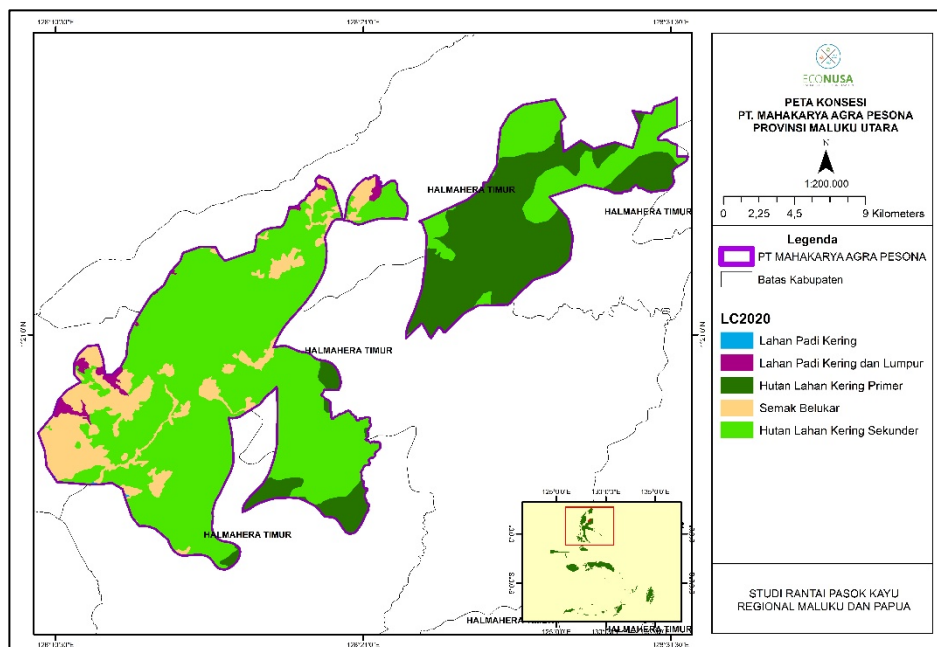
Berdasarkan SK 400/Menhut-II/06 perusahaan ini memiliki luas 50,940 ha dan secara administratif berada di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Peta konsesi PT. Mohtra Agung Persada dapat dilihat pada Gambar 25.



Gambar 29. Peta Konsesi PT. Mohtra Agung Persada

PT. Mahakarya Agra Pesona

Berdasarkan SK Nomor 9/1/IUPHHKHA/PMDN/2017 perusahaan ini memiliki luas 36.860 ha dan secara administrasi terletak di Kabupaten Halmehera Timur. Peta konsesi PT. Mahakarya Agra Pesona dapat dilihat pada Gambar 26.



Gambar 30. Peta Konsesi PT. Mahakarya Agra Pesona

5.3 Alur Perdagangan Kayu dan Provinsi Maluku dan Maluku Utara

Sumber bahan baku yang berasal dari IUPHHK di Provinsi Maluku teridentifikasi dikirim ke beberapa industri pengolahan (Tabel 3).

Tabel 3 Industri penerima bahan baku dari IUPHHK Provinsi Maluku

No	Sumber Bahan Baku	Industri Penerima	Tahun	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)
1	PT. Maluku Sentosa	PT. Waenibe Wood Industries	2019	2726,88	2.404,21
2	Kop. Waila Wana Lestari	PT. Waenibe Wood Industries	2019	4.683,03	1.777,00
3	PT. Wana Potensi Nusa	PT. Waenibe Wood Industries	2019	45,41	45,40
4	PT. Waenibe Wood Industries	PT. Waenibe Wood Industries	2019	5.988,99	4.099,09
5	PT. Albasi Priangan Lestari	PT. Karunia Rimba Makmur Semesta	2019	2.331,74	2.331,74
6	PT. Waenibe Wood Industries	PT. Karunia Rimba Makmur Semesta	2019	5.413,68	5.413,68
7	PT. Albasi Priangan Lestari	PT. Karya Wisesa	2019	2.250,47	2.250,47
8	PT. Waenibe Wood Industries	PT. Karya Wisesa	2019	5.113,38	5.113,38
9	PT. Bintang Lima Makmur	PT. Tanjung Timberindo Industri	2019	11.872,84	11.872,84
10	PT. Gema Hutani Lestari	PT. Tanjung Timberindo Industri	2019	18.383,29	18.383,29
11	PT. Maluku Sentosa	PT. Tanjung Timberindo Industri	2019	3.787,53	3.787,53
12	PT. Talisan Emas	PT. Tanjung Timberindo Industri	2019	1.964,51	1.964,51
13	PT. Waenibe Wood Industries	PT. Tanjung Timberindo Industri	2019	3.421,85	3.421,85
14	PT. Waenibe Wood Industries	PT. Pundi Indokayu Industri	2019	500,00	41,00
15	PT. Nusapadma Corporation	PT. Dutamas Satu	2019	16.314,35	4.952,69
16	PT. Nusapadma Corporation	PT. Haswin Hijau Perkasa	2019	2.748,17	2.748,17
17	PT. Strata Pacific	PT. Integra Indocabinet	2019	18.162,41	18.162,41
18	PT. Tawotu	PT. Integra Indocabinet	2019	16.474,81	16.474,81
19	PT. Karya Jaya Berdikari	PT. Kayu Merapi Internusa	2019	8.150,00	8.145,83
20	PT. Talisan Emas	PT. Kayu Multiguna Indonesia	2019	3.355,55	3.355,55
21	PT. Titian Hijrah	PT. Kayu Multiguna Indonesia	2019	1.559,11	1.559,11
22	Kop. Waila Wana Lestari	PT. Kutai Timber Indonesia	2019	9.823,18	9.823,18
23	PT. Waenibe Wood Industries	PT. Kutai Timber Indonesia	2019	8.160,23	8.160,23

24	PT. Karya Jaya Berdikari	PT. Sumber Mas Indah Plywood	2019	4.200,00	4.164,68
25	PT. Maluku Sentosa	PT. Sumber Mas Indah Plywood	2019	2.150,68	2.150,68
26	PT. Nusapadma Corporation	PT. Sumber Mas Indah Plywood	2019	4.000,00	3.754,05
27	PT. Waenibe Wood Industries	PT. Sumber Mas Indah Plywood	2019	2.361,08	2.361,08
28	PT. Bintang Lima Makmur	CV. Surabaya Trading And Co	2019	700,00	675,46
29	PT. Reminal Utama Sakti	PT. Surya Saritama	2019	871,56	871,56
30	PT. Waila Wana Lestari, Kop	PT. Surya Saritama	2019	6.128,44	3.671,38
31	PT. Bintang Lima Makmur	PT. Erna Djuliawati	2019	5.606,00	5.605,96
32	PT. Panca Karya, Pd	PT. Wijaya Tri Utama Plywood Industri	2019	56.125,04	56.124,94
33	PT. Strata Pacific	PT. Kayu Lapis Asli Murni	2019	13.300,00	13.144,74
34	PT. Gema Hutani Lestari	PT. Katingan Timber Celebes	2019	65.000,00	46.752,41
35	PT. Karya Jaya Berdikar	PT. Katingan Timber Celebes	2019	5.000,00	4.964,70
36	PT. Bintang Lima Makmur	PT. Panca Usaha Palopo Plywood	2019	1.400,00	1.325,01
37	PT. Nusapadma Corporation	PT. Panca Usaha Palopo Plywood	2019	14.000,00	12.581,01
38	CV. Titian Hijrah	PT. Panca Usaha Palopo Plywood	2019	2.741,15	2.741,15

Sumber bahan baku yang berasal dari IUPHHK di Provinsi Maluku Utara teridentifikasi dikirim ke beberapa industri pengolahan (Tabel 4).

Tabel 4 Industri penerima bahan baku dari IUPHHK Provinsi Maluku

No	Sumber Bahan Baku	Nama Industri	Tahun	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)
1	PT. Poleko Yurbarson Trad	PT. Waenibe Wood Industries	2019	8.450,00	7.995,55
2	PT. Mahakarya Agra Pesona	CV. Bintang Prima	2019	2.400,00	2.324,10
3	PT. Telaga Bhakti Persada	PT. Kayu Lapis Indonesia	2019	50.000,00	25.085,92
4	PT. Makurio Jaya Sentosa	PT. Kayu Lapis Indonesia	2019	5.038,60	5.038,60
5	PT. Mahakarya Agra Pesona	PT. Dewata Cipta Semesta	2019	3.900,00	3.895,97
6	PT. Wana Kencana Sejati	PT. Dewata Cipta Semesta	2019	600,00	538,08
7	PT. Wana Kencana Sejati	PT. Dewata Industrindo Forestry	2019	2.600,00	2.552,08
8	PT. Wana Kencana Sejati	PT. Dutamas Satu	2019	16.416,17	0,00
9	PT. Poleko Yurbarson Trad	PT. Kutai Timber Indonesia	2019	26.113,16	26.113,16
10	PT. Kepulauan Sula	PT. Mustika Buana Sejahtera	2019	1.500,00	1.014,24
11	PT. Mahakarya Agra Pesona	PT. Wana Andalan Bersama	2019	624,60	624,59
12	PT. Mahakarya Agra Pesona	PT. Slj Global	2019	5.000,00	4.021,92
13	PT. Bela Berkat Anugerah	PT. Panca Usaha Palopo Plywood	2019	32.500,00	27.759,56

14	PT. Mahakarya Agra Pesona	PT. Panca Usaha Palopo Plywood	2019	3.900,00	3.850,69
15	PT. Kalpika Wanatama	PT. Panca Usaha Palopo Plywood	2019	2.000,00	1.095,44
16	CV. Popodoi	PT. Panca Usaha Palopo Plywood	2019	7.000,00	6.919,19

Sedangkan alur penjualan kayu dan funding teridentifikasi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara sebagai berikut (Tabel 5 dan 6).

Tabel 5 Alur Penjualan Kayu Teridentifikasi di Provinsi Maluku dan Maluku Utara

No	IUPHHK-HA	Jual ke IUPHHK	Penjualan Online oleh IUPHHK	Export IUPHHK yang Teridentifikasi
1	PT. Gema Hutan Lestari	PT. Waenibe Wood Industries	Timberweb http://www.timberweb.com/ Import Genius https://www.importgenius.com/ ChinaRFA http://www.chinarfa.cn/ 52 WMB https://en.52wmb.com/	Korea Selatan
	PT. Maluku Sentosa			
	Koperasi Wailo Wanalestari			
2	PT. Maluku Sentosa	PT. Surya Saritama	Panjiva https://panjiva.com/	Amerika Serikat
	Koperasi Wailo Wanalestari			
	PT. Wana Potensi Nusa			
3	Koperasi Wailo Wanalestari	PT. Basirih Industiral	Panjiva https://panjiva.com/ Indonesia Chicago http://www.indonesiachicago.org/ Export Genius https://www.exportgenius.in/	Amerika, Mexico, United Kingdom, Germany, Antwerp, Belgium, Turey, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Pakistan, India, Singapura, Pakistan, Thailand, Cina, Korea, Jepang dan Austalia
	PT. Wana Potensi Nusa			
4	PT. Mohtra Agung Persada	PT. Panca Usaha Palopo Plywood	Panjiva	Amerika Serikat, Singapura

			https://panjiva.com/ Indonesia Chicago http://www.indonesiachicago.org/	
5	PT. Telaga Bhakti Persada	Kayu Lapis Indonesia	Panjiva https://panjiva.com/	Jepang

Tabel 6. Funding yang teridentifikasi

No	Nama Perusahaan	Funding
1	PT. Kayu Lapis Indonesia	Asian Development Bank
2	PD. Panca Karya	Pemerintah Provinsi Maluku

5.4 Sertifikasi IUPHHK-HA dan HTI Provinsi Maluku dan Maluku Utara

Sertifikasi dibangun sebagai bentuk pengendalian ekstraksi hasil kayu secara ilegal dan masif dan praktik *illegal logging*. Sertifikasi terkait produksi kayu pada hutan produksi yaitu SVLK (Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu), PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), FSC (*Forest Stewardship Council*), LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia) dan HCV (*High Conservation Value*).

1. SVLK merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multistakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia.
2. PHPL adalah bentuk pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan hutan produksi secara lestari.
3. FSC adalah bentuk pengelolaan hutan lestari yang bersifat global.
4. LEI adalah Organisasi non-profit berbasis konsituen yang mengembangkan sistem hutan untuk mengembangkan misi pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
5. HCV adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah kawasan baik itu lingkungan maupun sosial, seperti habitat satwa liar, daerah perlindungan resapan air atau situs arkeologi (kebudayaan) dimana nilai-nilai tersebut diperhitungkan sebagai nilai yang sangat signifikan atau sangat penting secara lokal, regional atau global.

IUPHHK-HA dan HT yang teridentifikasi memiliki sertifikasi SVLK dan PHPL di Provinsi Maluku sebagai berikut (Tabel 7).

Tabel 7 Sertifikasi IUPHHK-HA Provinsi Maluku

No	Nama Perusahaan	SVLK	PHPL	FSC	LEI	HCV
1	Koperasi Wailo Wanalestari	√	√	-	-	-
2	PD. Panca Karya	-	√	-	-	-
3	PT. Albasi Priangan Lestari	√	-	-	-	-

4	PT. Bintang Lima Makmur	√	√	-	-	-
5	PT. Gema Hutan Lestari	-	√	√	-	-
6	PT. Karya Jaya Berdikari	-	√	-	-	-
7	PT. Maluku Sentosa	√	√	-	-	-
8	PT. Mangole Timber	-	-	-	-	-
9	PT. Nusapadma Corporation	-	-	-	-	-
10	PT. Prima Bumi Sakti	-	-	-	-	-
11	PT. Strata Pasific	-	-	-	-	-
12	PT. Talisan Mas	√	-	-	-	-
13	PT. Wana Potensi Nusa	√	√	-	-	-
14	PT. Wana Sejahtera Abadi		-	-	-	-
15	PT. Waenibe Wood Industries	√	-	-	-	-
16	PT. Katingan Timber	√	-	-	-	-
17	PT. Reminal Utama Sakti	√	-	-	-	-

IUPHHK-HA dan HT yang teridentifikasi memiliki sertifikasi SVLK dan PHPL di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut (Tabel 8).

Tabel 8. Sertifikasi IUPHHK-HA Provinsi Maluku Utara

No	Nama Perusahaan	SVLK	PHPL	FSC	LEI	HCV
1	PT. Tunggal Agathis Indah Wood Industries Unit 1	-	-	-	-	-
2	PT. Bela Berkat Anugerah	-	√	-	-	-
3	PT. Nusa Niwe Indah	-	-	-	-	-
4	PT. Tunas Pusaka Mandiri	-	√	-	-	-
5	PT. Widuri Utama Timber	-	-	-	-	-
6	PT. Mohtra Agung Persada	-	-	-	-	-
7	PT. Telaga Bhakti Persada	-	√	√	-	-
8	PT. Wijaya Kencana Indonesia	√	-	-	-	-
9	PT. Wana Kencana Sejati	-	-	-	-	-
10	PT. Mahakarya Agra Pesona	-	-	-	-	-
11	PT. Poleko Yurbarson Trad.	√	√	-	-	-
12	PT. Taliabu Luna Timber	-	√	-	-	-
13	PT. Kalpika Wanatama	√	-	-	-	-
14	PT. Kirana Cakrawala	-	-	-	-	-

6. Pembahasan Regional Papua

6.1 Kepemilikan IUPHHK-HA dan HT Provinsi Papua

Jumlah IUPHHK yang teridentifikasi terdiri dari 61 yang berbadan hukum PT dan CV yang tergabung dalam beberapa group diantaranya adalah Djajanti Group, KLI Group, Artha Graha Group, Korindo Group, Sinar Wijaya Group, Medco Group, Mega Masindo Group, Moorin Group, Kodeco Group, Teknix Capital Group dan Hanurata Group, Serta sisanya belum teridentifikasi (Tabel 9).

Tabel 9. Kepemilikan dan luas konsesi IUPHHK-HA Provinsi Papua

No	Nama Perusahaan	Group	Saham Mayoritas	Luas Konsesi (ha)
1	PT Agoda Rimba Irian	Djajanti	Burhan Uray	155.000
2	PT. Alas Tirta Kencana	Djajanti	Burhan Uray	155.000
3	PT. Artika Optima Inti Unit I	Djajanti	Burhan Uray	153.000
4	PT. Centarico	Djajanti	Burhan Uray	95.000
5	PT. Diadyani Timber	Djajanti	Burhan Uray	205.160
6	PT. Digul Dayasakti	Djajanti	Burhan Uray	347.000
7	PT. Kamundan Raya	Djajanti	Burhan Uray	187.800
8	PT. Salaki Mandiri Sejahtera	Djajanti	Burhan Uray	79.130
9	PT. Semarak Dharma Timber	Djajanti	Burhan Uray	84.000
10	PT. Sagindo Sari Lestari	Djajanti	Burhan Uray	980.000
11	PT. Prasarana Marga	KLI	Keluarga Sutanto	98.000
12	PT. Risana Indah Forest	KLI	Keluarga Sutanto	197.000
13	PT. Kayu Ekaria	Artha Graha	Tomy Winata	407.350
14	PT. Wapoga Mutiara Tbr. I	Artha Graha	Tomy Winata	178.800
15	PT. Wapoga Mutiara Tbr. II	Artha Graha	Tomy Winata	169.100
16	PT. Phonik Harapan Tbr	Artha Graha	Tomy Winata	150.000
17	PT. Wapoga Mutiara Industries	Artha Graha	Tomy Winata	-
18	PT. Inocin Abadi	Korindo	Eun-ho Seung	99.665
19	PT. Korindo	Korindo	Eun-ho Seung	5.000
20	PT. Tunas Timber Lestari	Korindo	Eun-ho Seung	204.935
21	PT. Jati Dharma	Sinar Wijaya	Wijaya Sentosa	139.470
22	PT. Kaltim Utama	Sinar Wijaya	Wijaya Sentosa	161.670
23	PT. Medco Papua Alam Lestari	Medco	Arifin Panigoro	2.800
24	PT. Selaras Inti Semesta	Medco	Arifin Panigoro	169.400
25	PT. Bio Inti Agrindo	Daewoo	Kim Woo choong	34.196,72
26	PT. Mamberamo Alasmandiri	Kodeco	Choi Gye-wol	677.310
27	PT. Bade Makmur Orissa	Kodeco	Choi Gye-wol	462.600
28	PT. Arfak Indra	Mega Masindo	Paulus George Hung	153.000
29	PT. Plasma Nutfah Marind Papua	Moorim	Lee Do-Kyun	2.000
30	PT. Muting Mekar Hijau	Teknix Capital	Andrew Purcell	300.000
31	PT. Merauke Rayon Jaya	Texmaco	Marimutu Sinivasan	206.800
32	PT. Hanurata Unit Jayapura	Hanurata	Probosutedjo	56.325
33	PT. Papua Timber Jaya	Non Group	-	110.700
34	PT. Batasan	Non Group	-	106.643
35	PT. Sedia Mulia Utama	Non Group	-	87.500
36	PT. Perdana Waropen	Non Group	-	170.000
37	PT. Barito Cendrawasih	Non Group	-	106.643
38	PT. Bina Balantak Raya Utama	Non Group	-	325.300
39	PT. Budhi Nyata	Non Group	-	95.000
40	PT. Citra Lembah Kencana	Non Group	-	167.000
41	PT. Crown Pacific Abadi	Non Group	-	-
42	PT. Damai Setiatama Tbr	Non Group	-	315.475
43	PT. Darmali Mahkota Tbr	Non Group	-	133.000

44	PT. Global Parters Indonesia	Non Group	-	144.940
45	PT. Hasrat Wira Mandiri	Non Group	-	333.000
46	PT. Kebun Sari Putra	Non Group	-	187.800
47	PT. Mondialindo Setya Pratama	Non Group	-	94.800
48	PT. Mukti Artha Yoga	Non Group	-	200.000
49	PT. Papua Hutan Lestari Makmur	Non Group	-	103.510
50	PT. Rimba Mafin	Non Group	-	200.000
51	PT. Rimba Megah Lestari	Non Group	-	212.000
52	PT. Victory Ciwi Unit III	Non Group	-	150.000
53	PT. Victory Ciwi Unit II	Non Group	-	-
54	PT. Wana Galang Utama	Non Group	-	182.000
55	PT. Wanatirta Ediwibowo	Non Group	-	150.000
56	PT. China Gate Agriculture Development	Non Group	-	50.000
57	PT. Cipta Papua Agri Lestari	Non Group	-	90.225
58	PT. Kertas Nusantara	Non Group	-	50.000
59	PT. Wahana Samudra Sentosa	Non Group	-	79.006
60	PT. Wanamulia Sukses Sejati Unit I dan II	Non Group	-	61.000
61	CV. Rizki Mandiri Timber	Non Group	-	-
Total				10.187.857

DJAJANTI GROUP

Burhan Uray adalah seorang Tionghao Indonesia sekaligus pendiri Djajanti Group. Burhan yang berasal dari Kabupaten Minqing, Provinsi Fujian China memulai bisnisnya sebagai penyadap karet di Indonesia. Selanjutnya, Burhan dikenal sebagai taipan kayu yang kemudian melakukan diversifikasi ke bisnis lain (Kontan.id, 2018). Anak usaha yang bergerak dibidang perkayuan group ini antara lain adalah PT Agoda Rimba Irian, PT. Alas Tirta Kencana, PT. Artika Optima Inti Unit I, PT. Centarico, PT. Diadyani Timber, PT. Digul Dayasakti, PT. Kamundan Raya, PT. Salaki Mandiri Sejahtera, PT. Sagindo Sari Lestari dan PT. Semarak Dharma Timber.

PT. Agoda Rimba Irian-(IUPHHK-HA)

PT Agoda Rimba Irian adalah anak perusahaan Djajanti Group dan kepemilikannya saham mayoritas dimiliki oleh Abdurachman Abdulkadir Assegaf. Perusahaan ini memiliki luas 155.000 ha berdasarkan SK 759/Kpts-II/89 tahun 1989. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki dokumen PHPL dan SVLK.

PT. Alas Tirta Kencana (Skrng: PT. Mutiara Alas Khatulistiwa)- (IUPHHK-HA)

PT. Alas Tirta Kencana adalah anak perusahaan Djajanti Group mengantongi izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) di wilayah Kaporaya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika. Luas konsesi perusahaan ini adalah 155.000 ha berdasarkan SK 759/Kpts-II/89 tahun 1989. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki dokumen PHPL dan SVLK.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Mimika, Maryana menyampaikan bahwa PT. Mutiara Alas Khatulistiwa dulunya merupakan PT. Alas Tirta Kencana yang berkegiatan di Kaporaya sehingga saat ini berganti nama menjadi PT. Mutiara Alas Khatulistiwa namun saat ini sudah berpindah lokasi. Pihak perusahaan dalam hal ini pimpinan perusahaan Mr. Ting kurang dapat bekerjasama walaupun telah diberikan teguran. Adanya sistem *online self assesment* saat ini menjadikan pengawasan kurang melekat terhadap kegiatan perusahaan, seperti pada kegiatan pengiriman kayu sekarang dokumennya di tandatangani sendiri oleh pihak perusahaan (Imigrasi Mimika, 2021). Setelah berganti nama menjadi PT. Mutiara Alas Khatulistiwa Perusahaan ini memiliki luas 81.885 ha berdasarkan SK Nomor 676/Menhut-II/2014 yang secara administratif terletak di Kabupaten Timika dan Kabupaten Dogiyai. Perusahaan ini pernah diaduit SVLK oleh PT. Intishar Sadira Eshan pada tahun 2019 dengan hasil baik. Dokumen PHPL perusahaan ini tidak teridentifikasi.

Menurut (Koalisi Penyelamatan Hutan Papua, 2015) perusahaan ini diduga berhubungan dimiliki, dikelola dan dikendalikan oleh Mr. Ting Hung (Mega Masindo Group).

PT. Artika Optima Inti Unit I-(IUPHHK-HA)

PT. Artika Optima Inti Unit I adalah anak usaha Djayanti Group yang memiliki luas 153.000 ha. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.384/MENHUT-II/2004 Tahun 2004 mengeluarkan SK tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 132/Kpts-Ii/1989 Tanggal 18 Maret 1989 Jo Nomor 1104/Kpts-Ii/1992 Tanggal 10 Desember 1992 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Artika Optima Inti Nusantara (Unit I) Di Kabupaten Merauke, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.

PT. Artka Optima Inti Unit I diduga pailit karena memiliki hutang pajak (Aruan AR, 2010). Perusahaan ini adalah produsen kayu lapis. Perusahaan ini memiliki hutan tunggakan 11 bulan gaji, pesangon dan uang koperasi senilai Rp 46 miliar (Kompas, 2008). Perusahaan ini milik Heru Budiyo.

Pada tahun 2020 Polres Pulau Buru, mengamankan oknum pengusaha bernama Rusly (38) bersama empat truk bermuatan kayu balsa gelondongan yang diduga hasil curian dari arel Hutan Tanaman Industri (HTI), milik salah satu anak perusahaan Jayanti Group PT. Artika Optima Inti (Kompas, 2020).

PT. Centarico-(IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 95.000 ha berdasarkan SK Nomor 154/Kpts-II/93 tahun 1993. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Diadyani Timber-(IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 205.160 ha berdasarkan SK Nomor SK.292/Menhut-II/2009 tahun 2009. Perusahaan ini telah diaudit PHPL yang dilakukan oleh PT TÜV Rheinland Indonesia tahun 2018. Tidak ditemukan dokumen SVLK perusahaan ini. Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Berdasarkan dokumen SVLK perusahaan lain, perusahaan ini teridentifikasi memasok kayu ke PT. Henrizon Iriana.

PT. Digul Dayasakti-(IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 347.000 ha berdasarkan SK Nomor 614/Kpts-II/95 tahun 1995 dan secara administratif terletak di Kabupaten Merauke. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Kamundan Raya-(IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 187.800 ha berdasarkan SK Nomor 392/Kpts-II/92. Secara administratif perusahaan ini berada di Kabupaten Mimika. Informasi perusahaan ini sangat terbatas.

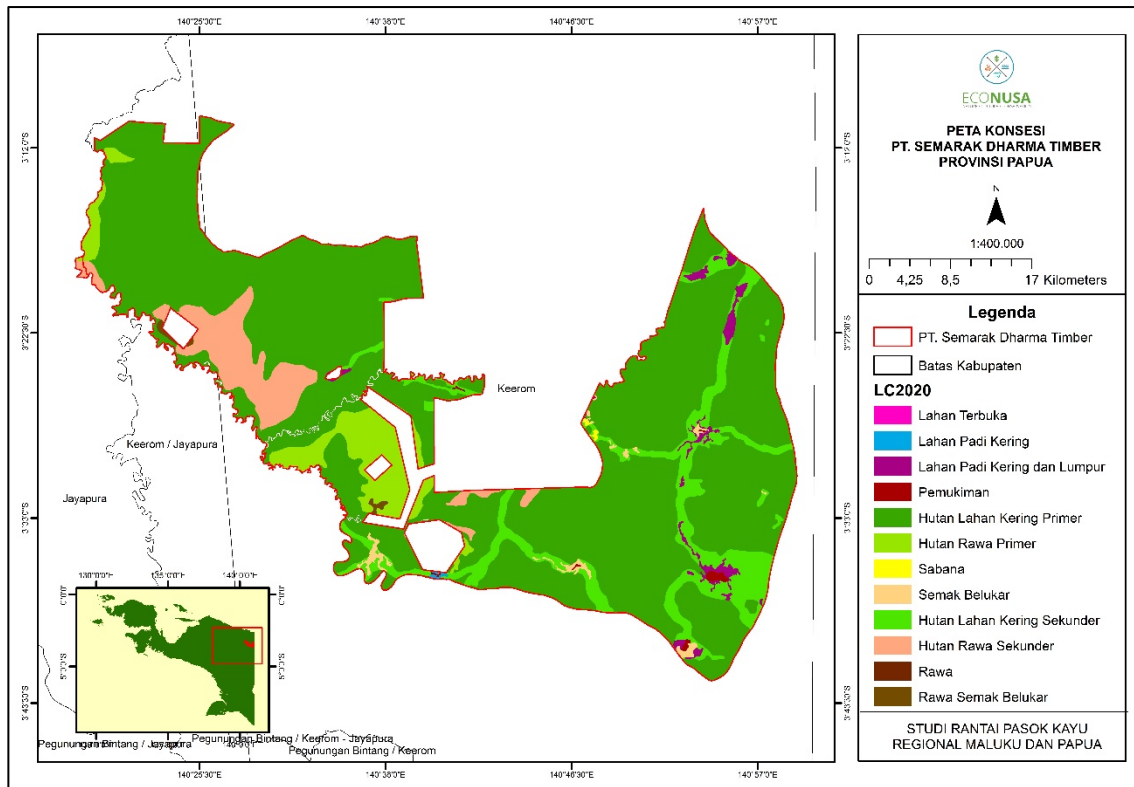
PT. Salaki Mandiri Sejahtera-(IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 79.130 ha berdasarkan SK Nomor 396/MENHUT-II/2006. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Sarmi. Perusahaan ini telah diaudit PHPL pada tahun 2018 oleh PT. Inti Multitama Sertifikasi dengan predikat kinerja sedang dengan masa berlaku sampai tahun 2023. Dokumen SVLK perusahaan tidak ditemukan. Berdasarkan dokumen SVLK perusahaan ini telah menjual log kayu kepada PT. Wapoga Mutiara Industries.

PT. Semarak Dharma Timber-(IUPHHK)

Perusahaan ini memiliki luas 84.000 ha. SK perusahaan ini melalui SK Nomor SK.1371Menhut-II/2013 yang terletak di Kabupaten Keroom. Kapasitas dan produk perusahaan ini adalah 36.000 m³/tahun, Kayu Gergajian. Perusahaan ini telah diaudit SVLK oleh PT. Ayamaru dengan predikat memenuhi yang berlaku mulai tahun 2016 sampai tahun 2019. Selanjutnya audit yang sama telah dilakukan oleh PT. Equality Indonesia dengan predikat memenuhi yang berlaku sampai Desember 2020. Sedangkan untuk dokumen PHPL tidak teridentifikasi.

Berdasarkan dokumen SVLK (kontrak supply bahan baku kayu bulat Nomor 01/KS/BTS-SDT/1/2018) bahan baku yang diterima oleh perusahaan ini berasal dari PT. Batasan sebesar $\pm 30.000 \text{ m}^3$.



Gambar 31. Peta Konsesi PT. Semarak Dharma Timber

PT. Sagindo Sari Lestari (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 980.000 ha. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas. Informasi IUPHHK perusahaan ini sangat terbatas.

KAYU LAPIS INDONESIA(KLI) GROUP

PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI) dibangun tahun 1978 di Desa Mororejo, Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pembangunan PT. Kayu Lapis Indonesia selesai tahun 1979 dan resmi sebagai perusahaan yang mengolah perkayuan menjadi sebuah produk *plywood* pada tanggal 23 Agustus 1979. Anak usaha KLI Group dari yang beroperasi di Provinsi Papua terdiri dari PT. Prasarana Marga, dan PT. Risana Indah Forest.

PT. Prasarana Marga (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 98.000 ha melalui SK Nomor 1142/Kpts-II/92. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Risana Indah Forest (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 197.000 ha berdasarkan SK Nomor 18/Kpts-II/90. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

ARTHA GRAHA GROUP

Artha Graha Network (disingkat AG Network), atau sering juga disebut Artha Graha Group, adalah salah satu konglomerasi atau kelompok bisnis (grup) di Indonesia. Kelompok yang dirintis oleh Tomy Winata dan yayasan ABRI (dibantu juga oleh rekan Tomy, Sugianto Kusuma) ini dianggap sebagai salah satu konglomerasi besar di Indonesia, dengan lingkup bisnis melingkupi properti, keuangan, agroindustri, perhotelan, pertambangan, media & hiburan, retail, IT & telekomunikasi dan lainnya. Anak usaha yang bergerak dalam usaha kayu di Provinsi Papua terdiri dari PT. Kayu Ekaria, PT. Wapoga Mutiara Timber I dan II, PT. Phonik Harapan Tbr dan PT Wapoga Mutiara Industries.

PT. Kayu Ekaria- (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 407.350 ha berdasarkan SK Nomor 169/Kpts/Um/11/97. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas.

PT. Wapoga Mutiara Tbr. I (IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 178.800 ha berdasarkan SK Nomor 744/Kpts-II/90. Perusahaan ini berkedudukan di Kabupaten Jayapura. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas.

PT. Wapoga Mutiara Tbr. II-(IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 169.100 ha berdasarkan SK Nomor SK.625/Menhut-II/2012. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Sarmi.

Berdasarkan laporan (JPIK, 2014) pada Mei 2012, PT Ayamaru membekukan S-PHPL yang diberikan kepada PT.Wapoga Mutiara Timber. Berdasarkan Informasi dari PT. Ayamaru, PT. WMT belum mendapatkan izin perpanjangan dari Kementerian Kehutanan, dan berdasarkan hasil penilaian sebelumnya PT. WMT di Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan nilai buruk, sedangkan PT. WMT di Kabupaten Sarmi mendapatkan nilai baik. Pada November 2012, PT. Ayamaru mencabut pembekuan S-PHPL terhadap PT.WMT, dan akan melakukan penilikan. Pada Desember 2012, PT. Ayamaru memberikan sertifikat hanya pada PT WMT unit Kabupaten Sarmi. Pengalaman dari hasil pemantauan sertifikasi PT. WMT dirangkum dalam masukan JPIK untuk perbaikan sistem verifikasi legalitas kayu mengenai komitmen pemegang izin.

Pada tahun 2019 PT. Wapoga Mutiara Tbr. II perusahaan ini diaudit PHPL oleh PT. Inti Multima Sertifikasi dan mendapatkan nilai baik.

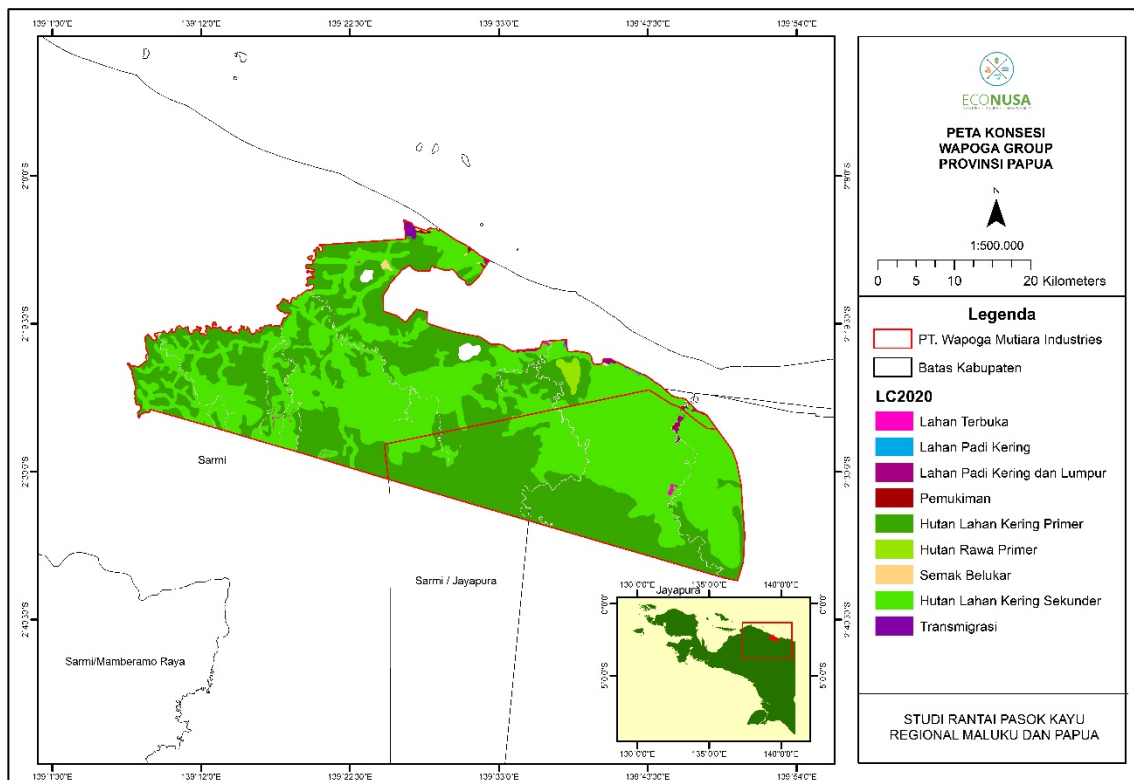
PT. Phonik Harapan Tbr-(IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 150.000 ha berdasarkan SK Nomor 368/Kpts-IV/85. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Wapoga Mutiara Industries-(IUIPHHK)

Ijin Industri kayu perusahaan ini berdasarkan SK Nomor SK.4026/Menhut-VI/BPPHH/2006 Tanggal 11 September 2006 dengan produk Kayu Gergajian (kapasitas: 90.000 m³/tahun) dan Kayu Lapis (kapasitas: 100.000 m³/tahun). Perusahaan ini telah diaudit SVLK oleh PT. Equality Indonesia pada tahun 2019.

Supply kayu perusahaan ini dari PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II yang berkedudukan di Jayapura dengan volume sebanyak 130,6660 m³ dengan nomor surat perjanjian No.01/WMI- WMT II/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan PT. Salaki Mutiarandiri Sejahtera berkedudukan di Jayapura dengan volume sebanyak 71,4200 m³ dengan nomor surat perjanjian No.02/WMI-SMS/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.



Gambar 32. Peta Konsesi PT. Wapoga Mutiara Industries

KORINDO GROUP

KORINDO Grup, perusahaan yang didirikan pada tahun 1969, terdiri lebih dari 30 perusahaan afiliasi yang bergerak di bidang sumber daya alam, pembuatan kertas, industri berat (manufaktur padat modal), keuangan, properti, bahan kimia, dan logistik. Chairman KORINDO Group adalah Eun Ho Seung. Anak usaha Korindo di Provinsi Papua yang bergerak dalam perusahaan kayu terdiri dari PT. Inocin Abadi, PT. Korindo Abadi dan PT. Tunas Timber Lestari (dl: PT. Tunas Sawaerma).

PT. Inocin Abadi (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 99.665 ha melalui SK Nomor 606/Menhut-II/2011 tahun 2021 dan secara administratif terletak di Kabupaten Merauke. Perusahaan ini telah diaudit PHPL oleh Equality Indonesia pada tahun 2016 dan berpedikat lulus. Tidak ditemukan dokumen SVLK atas nama perusahaan ini.

PT. Korindo Abadi (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 5.000 ha berdasarkan SK Nomor 522.2/76/DISHUT/2015. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Boven Digoel. Perusahaan ini pernah diaudit SVLK oleh PT. Equality Certification pada tahun 2016 dan berlaku sampai 7 Maret 2017 dan dinyatakan memenuhi standar SVLK. Sedangkan dokumen PHPL perusahaan ini tidak teridentifikasi.

PT. Tunas Timber Lestari (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini dulu bernama PT. Tunas Sawaerma dan diubah menjadi PT. Tunas Timber Lestari berdasarkan SK Nomor SK.711/MENHUT-II/2010 dengan luas 204.935 ha. Secara administratif perusahaan ini terletak di Distrik Jair, Distrik Kombut, Distrik Mindiptana dan Distrik Sesnukt Kabupaten Boven Digoel. Perusahaan ini telah diaudit PHPL oleh PT. Ayamaru dengan hasil baik dan memenuhi yang berlaku mulai tahun 2017 sampai tahun 2022. Dokumen SVLK perusahaan ini belum teridentifikasi.

SINAR WIJAYA GROUP

Grup Sinar Wijaya, kelompok usaha yang bergerak dalam industri berbasis kayu di Papua dan Papua Barat. Adapun Grup Sinar Wijaya merupakan induk dari empat perusahaan pemegang konsesi pemanfaatan hutan alam, yakni PT. Jati Dharma Indah Plywood, dan PT. Kaltim Utama.

PT. Jati Dharma Indah (IUPHHK-HA)

PT. Jati Dharma Indah adalah anak usaha dari Sinarwijaya Group. Perusahaan ini memiliki luas 139.470 ha berdasarkan SK Nomor 8/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016. Perusahaan ini memiliki dokumen PHPL yang diaudit oleh PT. Transtra Permada dan disahkan pada tanggal 14 Desember 2019. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki dokumen SVLK. Secara administratif perusahaan terletak di Kabupaten Nabire.

Berdasarkan dokumen SVLK CV. Puspa Yoga, PT. Jati Dharma Indah menjual kayu ke CV. Puspa Yoga dengan jenis kayu bulat Merbau. Penerimaan kayu bulat hutan alam hanya terjadi 1 (satu) kali yaitu bulan Oktober 2016 yang berasal dari IUPHHK-HA PT. Jati Dharma Indah Plywood Industries sebanyak 517,54 m³.

PT. Kaltim Hutama (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 161.670 ha berdasarkan SK Nomor SK.652/Menhut-II/2009. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan Nabire, Papua. Perusahaan pernah diaudit SVLK oleh PT. Inti Ultima Sertifikasi pada tahun 2020 dan dinyatakan memenuhi. Berdasarkan audit sertifikat PHPL

perusahaan ini dibekukan melalui surat pada 18 Desember 2017 oleh PT. Lambodja Sertifikasi karena tidak memenuhi standar PHPL.

Berdasarkan dokumen SVLK perusahaan ini memasok kayu ke CV. Rimba Bahari Jaya sebanyak 536,6196 m³.

MEDCO GROUP

Grup Medco adalah sebuah konglomerat bisnis yang dimiliki oleh keluarga Panigoro yang juga mencakup Medco Energi Internasional, Medco Agro, dan Bank Saudara selain perusahaan-perusahaan lain. Aktivitas minyak dan gas buminya dapat ditemukan di Sumatra, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan di Indonesia, dan juga dengan lisensi eksplorasi di Libya, Kamboja, Yaman, Tunisia, dan Amerika Serikat. Grup Medco didirikan oleh Arifin Panigoro, dan hingga saat ini masih merupakan bagian dari usaha keluarga, dengan adik dari Arifin yaitu Hilmi Panigoro menjadi Presiden Komisaris dari Medco Energi. Kakak beradik ini pernah tercatat di peringkat 21 di daftar Forbes tentang orang-orang terkaya di Indonesia tahun 2010. Anak usaha Korindo di Provinsi Papua yang bergerak dalam bperusahaan kayu terdiri dari PT. Medco Papua Alam Lestari dan

PT. Medco Papua Alam Lestari (IUPHHK-HT)

Perusahaan ini memiliki luas 2.800 ha berdasarkan SK Nomor 67/MenhutII/2009. Secara administrasi perusahaan ini terletak di kabupaten Merauke.

Menurut (Tempo, 2011) PT Medco Papua Industri Lestari di Merauke, Papua ditutup paksa oleh warga masyarakat sekitar. Langkah itu diambil karena tuntutan ganti rugi pemilik tanah Rp. 65 miliar belum diselesaikan. Beroperasi sejak 2007 dalam bidang pengelolaan kayu di Buepe, Distrik Kaptel, perusahaan milik Arifin Panigoro. Tokoh Masyarakat adat Sanggase, Merauke, Ronald Mahuze menegaskan, jika perusahaan tak memenuhi janjinya, warga akan mengambil seluruh aset perusahaan. "Mereka telah beroperasi tiga tahun, tapi kita tidak dapat apa-apa," kata Ronald. "Medco hanya mau bayar Rp 3 Miliar dari tuntutan kita sebesar Rp 65 Miliar.". Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Selaras Inti Semesta (IUPHHK-HA)

Perusahaan hutan tanaman ini memiliki luas 169.400 ha berdasarkan SK No. 18/MENHUT-II/2009. Secara administarasi perusahaan ini terletak di Kabupaten Merauke. Perusahaan ini pernah diaduit SVLK oleh PT. Equality Indonesia pada tahun 2014. Produksi perusahaan ini adalah kayu bulat. Perusahaan ini memiliki dokumen PHPL yang diaudit oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia yang berlaku tanggal 13 Oktober 2021 s/d 12 Oktober 2027.

Pada dokumen yang berbeda perusahaan ini memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 06/SK.IUIPHHK/2020 tanggal 02 Maret 2020. Kapasitas kayu gergajian perusahaan ini sebanyak kapasitas produksi 5.900 m³/tahun. Perusahaan ini telah diaudit oleh PT. Borneo Wanajaya Indonesia dengan predikat lulus dan berlaku mulai 04 November 2021 s/d 03 November 2027. Dokumen penilaian SVLK dan PHPL yang dilakukan

oleh PT. Borneo Wanajaya tidak ditemukan, hanya pemberitahuan dalam website bahwa perusahaan yang dimaksud sudah lulu audit SVLK atau PHPL.

DAEWOO GROUP

Daewoo adalah sebuah perusahaan konglomerat Korea Selatan. Perusahaan ini didirikan pada 22 Maret 1967 oleh Kim Woo-choong dengan nama Daewoo Industrial. Anak usaha Daewoo yang bergerak di bidang industri kayu yang berorasi di Propinsi Papua adalah PT. Bio Inti Agrindo.

PT. Bio Inti Agrindo (IUPHHK-HA dan IUIPHHK)

PT. Bio Inti Agrindo memiliki luas 34.196,72 ha berdasarkan SK Nomor 81/HGU/BPN RI/2011 dan 104/HGU/BPN RI/2013 yang terletak di Kabupaten Merauke. Perusahaan ini hanya memiliki dokumen SVLK yang diaudit oleh SCS Global Service. Perusahaan ini memiliki IUIPHHK dengan nomor ijin 238/Menhut-II/2012 dengan kapasitas : Penggajian Kayu 30.000 m³/tahun.

KODECO GROUP

Dilansir Bisnis Indonesia edisi 23 Februari 1995, raksasa investasi dari Korea Selatan, Korea Development Corp (Kodeco) memutuskan membangun pabrik plywood berkapasitas 100.000 meter persegi di Mamberamo, Papua. Proyek ini akan menyerap investasi US\$72 juta. Kepastian rencana investasi perusahaan dari Korea itu telah disetujui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada akhir Januari 1995. Anak usaha Kodeco yang memiliki konsesi kayu di Provinsi Papua adalah PT. Mamberamo Alasmandiri dan PT. Bade Makmur Orissa.

PT. Mamberamo Alasmandiri (IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 677.310 ha berdasarkan SK Adendum Nomor 910/Kpts-II/1999 yang secara administratif berada di Kabupaten Mamberamo Raya. Perusahaan ini pernah diaudit PHPL oleh PT. Equality Indonesia pada tahun 2012. Dokumen SVLK perusahaan ini tidak ditemukan.

PT. Bade Makmur Orissa (IUPHHK-HA)

PT. Bade Makmur Orissa memiliki luas 462.600 ha berdasarkan SK Nomor 57/KPTS-II/93 tahun 1993 dan terletak di Kabupaten Boven Gigoel. Perusahaan ini memiliki dokumen PHPL dengan nilai baik yang disertifikasi oleh PT. Ayamuru tahun 2011.

MEGA MASINDO GROUP

Mega Masindo Group merupakan sebuah grup perusahaan yang mempunyai berbagai bidang usaha antara lain : kehutanan (hutan alam), penyewaan alat berat dan konsultan, manajemen, pertambangan, serta bidang usaha pelayaran. Mega Masindo Group adalah grup perusahaan yang dikendalikan oleh Paulus George Hung, seorang pengusaha pembalakan kayu di Tanah Papua. Hung masuk dalam daftar pelaku usaha yang diduga melakukan pembalakan liar dan menjadi sasaran Operasi Hutan Lestari pada 2006 (Project Multatuli, 2021). Anak usaha grup

yang bergerak di bidang kayu dan berlorasi di Provinsi Papua yaitu PT. Arfak Indra dan PT. Alas Tirta Kencana (Djajati Group/Mega masindo group).

PT. Arfak Indra (IUPHHK-HA)

PT. Arfak Indra memiliki luas 153.000 ha berdasarkan SK Nomor 553/Kpts-II/89 tahun 1989. Sedangkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.333/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 Tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu- Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Arfak Indra Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 177.900 (seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus) Hektar di Kabupaten Fak-fak, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini memiliki luas \pm 177.900 ha. Perusahaan ini memiliki dokumen SVLK tahun 2021 yang dikerjakan oleh PT. Kreasi Prima Sertifikasi dan dinyatakan memenuhi/layak dan ditetapkan pada tanggal 18 Juni 2021. Selain SVLK perusahaan ini memiliki dokumen PHPL yang dikerjakan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi dengan predikat sedang yang ditetapkan pada tanggal 5 September 2016.

MOORIM GROUP

Moorim Group adalah perusahaan asal Korea Selatan. Presiden Moorim group adalah Yeong Sik Kim. Moorim Group adalah perusahaan kertas besar Korea Selatan. Pendapatan tahun 2020 setara dengan 305 juta Euro. Anak perusahaan Moorim di Provinsi Papua yang bergerak di bidang perKayuan adalah PT. Plasma Nutfah Marind Papua.

PT. Plasma Nutfah Marind Papua (IUPHHK-HT)

Perusahaan ini memiliki luas 2000 ha berdasarkan SK Nomor 276 tahun 2010. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Merauke. PT. Plasma Nutfah Marind Papua Adalah Salah Satu Unit Usaha, pada pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Kelas Perusahaan Kayu Serat Di Kabupaten Merauke, Papua Beroperasi Berdasarkan SK -648/Men - HUT - II/2011 Tanggal 14 November 2011, Melakukan Pengelolaan Kawasan Hutan Seluas 64.050 hektar. Wilayah Kerja Meliputi 2 Distrik, Yaitu Distrik Okaba dan Distrik Kaptel (PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA, 2019). Menurut (Aidenviroment, 2021) PT. Plasma Nutfah Marind Papua, memiliki konsesi hutan tanaman industri seluas 64.000 hektar di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Antara Januari hingga Mei 2021, mereka membuka 600 hektar hutan. Deforestasi pada periode 2016-2020 sebesar 3.200 hektar. Deforestasi terdeteksi dengan melapisi citra satelit dengan peta tutupan hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.

TEKNIX CAPITAL GROUP

Menurut (Potager.org, 2013a) Teknix Capital adalah sebuah perusahaan yang berbasis di Indonesia tapi dikelola oleh warga Australia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 dengan modal dari sumber yang tidak diketahui dari Australia. Dua orang yang mendirikan perusahaan ini adalah Andrew Purcell, mantan bankir investasi di Credit Suisse di Hong Kong dan Michael Black, yang sebelumnya adalah wakil presiden direktur dari Asia Pulp and Paper yang terkenal sebagai perampok hutan. Pada tahun 2007 Teknix Capital memiliki rencana super besar untuk menggunakan lahan 540 ribu hektar di Merauke untuk berbagai bisnis, termasuk kayu, sawit, dan tebu, melalui perusahaan-

perusahaan yang dibentuk untuk proyek ini PT Muting Mekar Hijau, PT Sawit Nusa Timur dan PT. Tebu Nusa Timur, semuanya dipimpin oleh Michael Black. Rencana ini kemudian diturunkan targetnya kemungkinan karena tidak mendapat izin dari Pemerintah Provinsi Papua. Pada akhirnya hanya PT Sawit Nusa Timur yang melanjutkan rencananya, yaitu lahan 35 ribu hektar untuk kelapa sawit. Perusahaan kayu yang berada di Provinsi Papua yang merupakan milik group ini adalah PT. Muting Mekar Hijau.

PT. Muting Mekar Hijau (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 300.000 ha berdasarkan SK Nomor 1294/II/PMA/2008. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

TEXMACO GROUP

Texmaco adalah perusahaan milik Marimutu Sinivasan. Marimutu Sinivasan adalah pendiri dari grup Texmaco. Ia dekat dengan Presiden Suharto, dan punya hubungan bisnis dengan anggota keluarga Suharto, termasuk Siti Hediati Hariyadi yang juga terkait dengan PT Maharani Rayon Jaya (Potager.org, 2013b). Anak usaha group ini yang bergerak dalam bidang usaha perikanan di Papua adalah PT. Merauke Rayon Jaya.

PT. Merauke Rayon Jaya (IUPHHK-HT)

Perusahaan ini memiliki luas 206.800 ha berdasarkan SK Nomor No.251/Menhut-II/2008. Perusahaan ini berlokasi di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel. Selama tahun 2019 dan 2020 perusahaan dikabarkan melakukan pendekatan dengan masyarakat adat di sekitar konsesi, namun mendapat tentangan dari suku Marind di sekitar desa Selouw di Kabupaten Merauke, dan masyarakat Wambon Tekamerop yang tinggal di beberapa desa di Distrik Subur, Kabupaten Boven Digoel dan Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke (Greenpeace, 2021).

HANURATA GROUP

PT. Hanurata Unit Jayapura (IUPHHK-HA)

Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu) pada IUPHHK Dalam Hutan Alam seluas ± 56.325 Hektar di Kabupaten Keerom, Papua berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012. Perusahaan ini memiliki dokumen SVLK yang diaudit oleh PT. Trustindo Prima Karya yang berlaku dari tahun 2015 sampai 2018. Jenis Kayu perusahaan ini terdiri dari Merbau, Meranti, Rimba Campuran dan Kayu Indah. Selain SVLK perusahaan ini memiliki dokumen PHPL yang diaudit oleh Lambodja Sertifikasi pada tahun 2020 dengan predikat lulus sedang. Perusahaan ini adalah anak usaha dari Hanurata Group.

NON GROUP

PT. Papua Timber Jaya (IUPHHK-HA)

PT. Papua Timber Jaya bergerak dalam bidang perdagangan kayu, batu bara, dan bijih besi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 dan berbasis di Jakarta, Indonesia (Digitaps, 2021). Perusahaan ini memiliki luas 110.700 ha berdasarkan SK Nomor 650/Kpts-II/95 tahun 1995. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki dokumen PHPL dan SVLK. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Batasan (IUPHHK-HA)

PT. Batasan memiliki luas 106.643 ha berdasarkan SK Nomor 342/Kpts-II/97 tahun 1997 yang secara administratif terletak di Kabupaten Kerom. Perusahaan ini memiliki dokumentasi SVLK yang dengan predikat terpelihara dan berlanjut yang diaudit oleh PT. Ayamaru Sertifikasi pada tahun 2017. Selain mengaudit SVLK PT. Ayamaru juga mengaudit PHPL perusahaan ini, hanya saja dokumen hasil auditnya tidak ditemukan, yang ditemukan hanya dokumen rencana audit dengan nomor dokumen Nomor : 530/A-SERT/X/2019 dalam dokumen tersebut rencana audit akan dilakukan pada 4 s/d 15 November 2019. Berdasarkan dokumen SVLK perusahaan ini memasok kayu ke PT. Semarak Dharma Timber Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

PT. Sedia Mulia Utama (IUPHHK-HA)

PT. Sedia Mulia Utama memiliki luas 87.500 ha berdasarkan SK 449/Kpts-II/95 tahun 1995. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Perdana Waropen (IUPHHK-HA)

PT. Perdana Waropen memiliki luas 170.000 ha berdasarkan 678/Kpts-II/89 tahun 1989. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Barito Cendrawasih (IUPHHK-HA)

PT. Barito Cendrawasih memiliki luas 106.643 ha berdasarkan SK Nomor 342/Kpts-II/97 tahun 1997. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas

PT. Bina Balantak Raya Utama (IUPHHK-HA)

PT. Bina Balantak Raya Utama memiliki luas 325.300 ha berdasarkan SK Nomor 40/Kpts-II/91 tahun 1991 yang terletak di Kabupaten Sarmi. Perusahaan ini memiliki dokumen PHPL yang diaudit oleh Global Resources dan SVLK oleh Nusa Kelola Lestari. Selain itu perusahaan ini memiliki sertifikat FSC yang berlaku mulai tanggal 13 Juni 2016 sampai 12 Juni 2022. Perusahaan ini teridentifikasi menjual hasil kayunya ke PT. Henrizon Iriana.

PT. Budhi Nyata (IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 95.000 ha berdasarkan SK 154/Kpts-II/93 tahun 1993. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Citra Lembah Kencana (IUPHHK-HA)

Perusahaan yang memiliki luas 167.000 ha ini dicabut ijinnya karena areanya masuk PIPPIB (Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain) berdasarkan Revisi kesembilan ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Nomor SK.5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Berita Satu, 2015).

PT. Crown Pacific Abadi (IUIPHHK)

Ijin industri perusahaan ini melalui SK Nomor 15/1/IUPHHK/PMDN/2017 tahun 2017. Aliansi Masyarakat Adat Pemilik Hutan Adat wilayah Mamberamo Tami melancarkan aksi protes di Dinas Kehutanan Provinsi Papua guna mempertanyakan izin Hak Pengusaha Hutan (HPH) dan pengelolaan hutan yang dinilai merugikan. masyarakat adat juga mendesak Dinas Kehutanan Provinsi Papua untuk mencabut izin dari PT. Bio Budi daya Nabati, PT. Crown Pasifik Abadi, PT. Patria Agri Lestari, sebab diduga telah menyalahgunakan izin yang ada (Seputar Papua, 2019). Industri perusahaan ini berada di Kupaten Keerom dengan kapasitas produksi 75.000 m³/tahun, Kayu Gergajian. Perusahaan ini telah diaudit SVLK (Remote Audit) oleh PT. Ayamaru dengan predikat memenuhi yang disahkan pada tanggal 3 Juni 2021. Dokumen PHPL perusahaan ini tidak teridentifikasi.

PT. Damai Setiatama Tbr (IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 315.475 ha berdasarkan SK Nomor 565/Menhut-II/2013 tahun 2013 tahun 2013 yang berlokasi di Desa Sokanggo, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi Provinsi Papua. Perusahaan ini telah diaudit oleh PT. Ayamaru dengan predikat baik. Dokumen SVLK atas nama perusahaan ini tidak teridentifikasi.

PT. Darmali Mahkota Tbr (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 133.000 ha berdasarkan SK Nomor 448/Kpts-II/88 tahun 1988. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Global Parters Indonesia (IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 144.940 ha berdasarkan SK SK.39/Menhut-II/2009 tahun 2009. Kemudian ijin perusahaan dicabut oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK.109/Menlhk/Setjen/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.39/Menhut-II/2009 Tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Global Partners Indonesia Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 144.940 (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) Hektar Di Provinsi Papua. Putusan kementerian LHK digugat ke Mahkamah Agung. Putusan tertuang dalam putusan nomor 285 K/TUN/LH/2019 dan mengabulkan gugatan PT. Global Partners Indonesia dengan isi putusan berupa Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.109/Menlhk/Setjen/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.39/Menhut-II/2009 Tanggal 9 Februari 2009 dan mewajibkan KLHK mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.109/Menlhk/Setjen/HPL.1/2/2018 tanggal 27 Februari 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.39/Menhut-II/2009 Tanggal 9 Februari 2009 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT. Global Partners Indonesia Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 144.940 (seratus empat puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh) Hektar Di Provinsi Papua, terhadap Penggugat.

PT. Hasrat Wira Mandiri (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 333.000 ha, berdasarkan SK Nomor 30/Kpts-II/89 tahun 1989. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas. Perusahaan ini memiliki luas 99.665 ha berdasarkan SK Nomor 606/Menhut-II/2011 tahun 2011 yang secara administratif berada di Kabupaten Merauke. Perusahaan ini telah dilakukan audit PHPL pada tahun 2016 oleh PT. Equality Indonesia dan dinyatakan lulus. Tidak ditemukan dokumen SVLK.

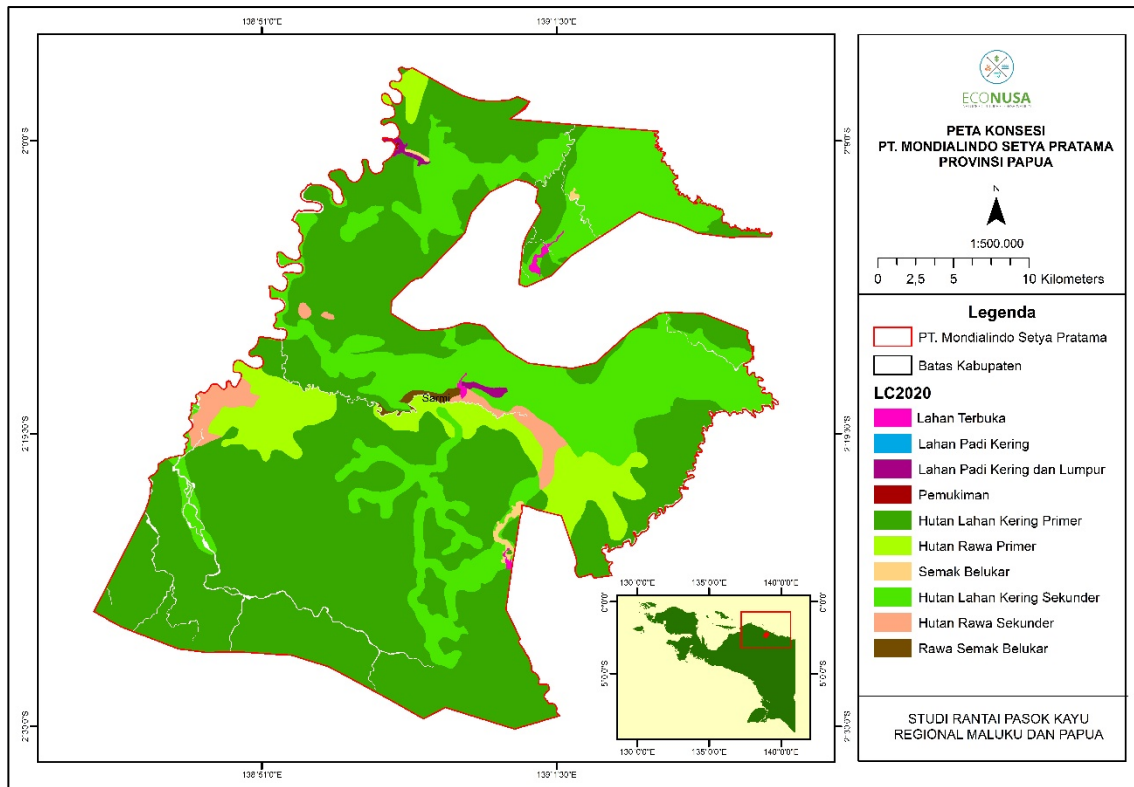
PT. Kebun Sari Putra (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 187.800 ha berdasarkan SK Nomor 392/Kpts-II/92. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas.

PT. Mondialindo Setya Pratama (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 94.800 ha berdasarkan SK Nomor 466/Menhut-II/2006. Secara administratif perusahaan berada di Kabupaten Sarimi. Perusahaan ini telah diaudit PHPL oleh PT. Sarbi pada tahun 2015 dengan predikat lulus. Dokumen SVLK perusahaan ini tidak teridentifikasi.

Berdasarkan dokumen SVLK pada perusahaan lain, perusahaan ini teridentifikasi menjual kayu ke CV. Rizki Mandiri Timber sejumlah 3 btg = 5,49 m³ yang diterbitkan melalui SIPUHH On line tanggal 21 Mei 2016 Penerbit Sunar Sunda No. Reg 00323- 17IPKB-R/XXXII/2014 dan memasok kayu ke PT. Henrizon Iriana. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki sertifikat SVLK.



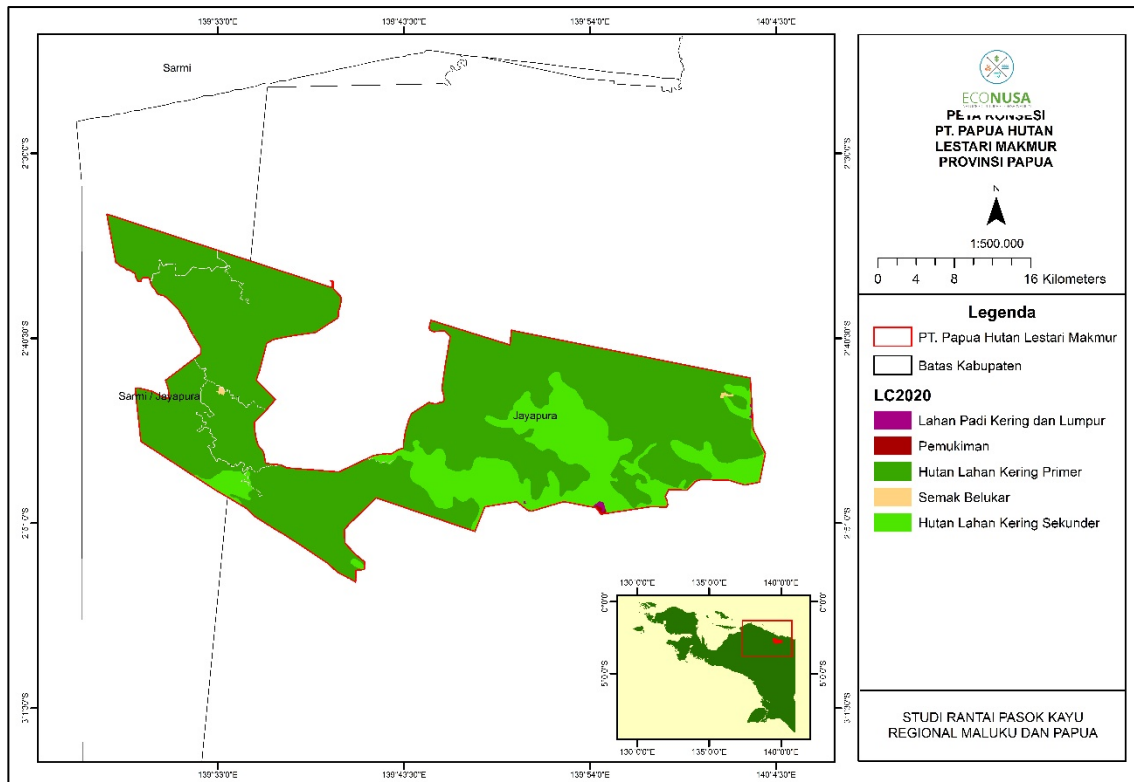
Gambar 33. Peta Konsesi PT. Mondialindo Setya Pratama

PT. Mukti Artha Yoga (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 200.000 ha berdasarkan SK Nomor 32/Kpts-II/92. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Papua Hutan Lestari Makmur (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 103.510 ha berdasarkan SK Nomor SK.334/Menhut-II/2009. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Jayapura. Perusahaan ini pernah diaudit PHPL oleh PT. Transtra Permada pada tahun 2020 dengan predikat baik. Selain itu perusahaan ini pernah diaudit SVLK oleh PT. Trusindo Certification pada tahun 2018.



Gambar 34. Peta Konsesi PT. Papua Hutan Lestari Makmur

PT. Rimba Mafin (PT. Sumalindo III)- (IUPHHK-HT)

Perusahaan ini memiliki luas 200.000 ha berdasarkan SK Nomor 76/Kpts-II/89. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Rimba Megah Lestari (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 212.000 ha berdasarkan SK Nomor 464/Kpts-II/92. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Victory Ciwi Unit III (IUIPHHK)

Perusahaan ini memiliki luas 150.000 ha berdasarkan SK Nomor 396/Kpts-II/90. Nomor SK IUIPHHK perusahaan ini adalah 13/1/IUIPHHK-PL/PMDH/2017 dengan produk dan kapasitas (1)Kayu Gergajian (16.668 m³/Tahun); dan 2. Veneer (2.564 m³/Tahun). Perusahaan ini telah diaudit SVLK oleh PT. Trusindo Certification dengan pada tahun 2017. Perusahaan ini terletak di Kota Jayapura, Papua. IUIPHHK CV. Rizki Mandiri Timber Mei 2018 melakukan penerimaan kayu bulat pada Bulan November 2017 yang berasal dari PT. Victory CIWI Unit III. Perusahaan ini menerima kayu dari IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura.

PT. Victory Ciwi Unit II (IUPHHK)

Secara administratif perusahaan ini berada di Kabupaten Jayapura. Nomor SK IUPHK adalah SK.522.2/1415 tanggal 17 Juni 2004. Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT. Victory Cemerlang Wood Industry Unit II adalah sebanyak: 3.927,87 m³, seluruhnya dipayungi kontrak suplai bahan baku dengan IUPHHK PT. Hanurata Unit Jayapura.

PT. Wana Galang Utama (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 182.000 ha berdasarkan SK Nomor 811/Kpts-II/91. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Wanatirta Ediwibowo (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 150.000 ha berdasarkan SK Nomor 588/Kpts-II/95. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Jayapura. Menurut (Tempo.co, 2010) menurut Wiwiek Pada Februari 1995, keluarga Soeharto mendirikan PT. Wanatirta Edhie Wibowo, yang menggarap bisnis perdagangan, pertambangan, dan perkebunan. Dalam akta pendirian perusahaan, Sunarti menjadi salah satu pendiri yang menyetor modal Rp 100 juta. Sang ibu menjadi direktur utama, sementara Wiwiek jadi komisaris perusahaan. Perusahaan ini memperoleh konsesi lahan 206 ribu hektar di Kabupaten Mappi, Papua. Perusahaan ini adalah milik keluarga Presiden SBY. Pada tahun 2010 pada era presiden SBY, MS Kaban mencabut izin HPH PT. Wanatirta Edhie Wibowo (Media Indonesia, 2021)

PT. China Gate Agriculture Development (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 50.000 ha berdasarkan SK Nomor 522.2/1787/2010. Secara administrative perusahaan ini terletak di Kabupaten Merauke. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas.

PT. Cipta Papua Agri Lestari (IUPHHK-HA)

Perusaahaan ini memiliki luas 90.225 ha berdasarkan SK Nomor 522.2/1616/2010. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas.

PT. Kertas Nusantara (IUPHHK-HA)

Perusahaan memiliki luas 50.000 ha berdasarkan SK Nomor .522.2/1787/2010. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas.

PT. Wahana Samudra Sentosa (IUPHHK-HT)

Perusahaan ini memiliki luas 79.006 ha berdasarkan SK Nomor S.576/Menhut-VI/2013. Secara adminsitratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Merauke. Menurut WWF Kabupaten Merauke menilai analisa dampak lingkungan lokasi PT. Wahana Samudra Sentosa perusahaan yang bergerak di bidang hutan tanaman industri (HTI),

yang terletak di Distrik Nguti Kabupaten Merauke tidak sesuai dengan tata ruang Kabupaten Merauke (Potager, 2014).

PT. Wanamulia Sukses Sejati Unit I dan II (IUPHHK-HT)

Perusahaan ini memiliki luas 61.000 ha berdasarkan Surat Rekomendasi Gubernur Papua: Rek.522.2/1098, tanggal 26 April 2008. Perusahaan ini berkomitmen untuk pengembangan bioenergi.

CV. Rizki Mandiri Timber (IUPHHK)

IUPHHK No.522.2/1462 Tanggal 3 November 2007 DPMDPT Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2018 Tanggal 1 Februari 2018. Kapasitas Izin <6.000 m³/tahun (Pengolahan Kayu). Sertifikat SVLK perusahaan ini telah dibekukan oleh Lambodja Sertifikasi melalui surat pada tanggal 25 Maret 2019. Perusahaan ini mendapatkan supply kayu dari PT. Mondialindo Setya Pratama sejumlah Kayu Kelompok lainnya 3 btg = 5,49 m³ yang diterbitkan melalui SIPUHH On line tanggal 21 Mei 2016 Penerbit Sunar Sunda No. Reg 00323-17IPKB-R/XXXII/2014. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki sertifikat PHPL.

6.2 Kepemilikan IUPHHK-HA dan HT Provinsi Papua Barat

Sejak 2015, Papua Barat mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi. Ini mengingat, kekayaan flora dan fauna endemik di Tanah Papua menyumbang setengah dari total jumlah keanekaragaman hayati Indonesia. Seiring berjalan waktu, Papua Barat pun beralih dari Provinsi Konservasi menjadi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan prinsip konservasi (MongabayIndonesia, 2008).

Selanjutnya Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Charlie Heatubun, menjelaskan bila melihat nomenklatur memakai provinsi konservasi, kewenangan berada di pemerintah pusat, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini membuat Pemerintah Provinsi Papua Barat memilih menjadi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan dengan tetap memakai prinsip konservasi. Hutan tetap lestari, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakatnya (MongabayIndonesia, 2008). Pemerintah Provinsi Papua Barat mempersilakan investor untuk membuka industry kayu olahan di daerahnya. Hingga saat ini terdapat 22 perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan. Produksi kayu bulat di Provinsi Papua Barat ditargetkan dua hektar/tahun (Antaraneews, 2019). Berikut list group konsesi di Papua Barat (Tabel 10).

Tabel 10. Kepemilikan dan luas konsesi IUPHHK-HA Provinsi Papua Barat

No	Nama Perusahaan	Group	Pemilik Grup	Luas Konsesi (ha)
1	PT. Bangun Kayu Irian	Bumi Teknokulura	Mitra Pembangunan Global	139.970
2	PT. Prabu Alaska	Alamindo	Kim Johannes Mulia.	322.780
3	PT. Rimbakayu Arthamas	Alamindo	Kim Johannes Mulia.	130.400
4	PT. Karas Industri Papua	Alamindo	Kim Johannes Mulia.	-
5	PT. Kurniatama Sejahtera	Artha Graha	Tomy Winata	115.800
6	PT. Wijaya Sentosa	Sinar Wijaya	Wijaya Sentosa	130.755

7	PT. Wukirasari	Mega Masindo	Paulus George Hung	116.320
8	PT. Wana Kayu Hasilindo	Mega Masindo	Paulus George Hung	65.520
9	PT. Arfak Indra	Non Group	-	177.900
10	PT. Hasrat Wira Mandiri	Non Group	-	119.700
11	PT. Intimpura Timber	Non Group	-	333.000
12	PT. Bintuni Utama Murni Wood in	Non Group	-	78.669,29
13	PT. Henrizon Iriana	Non Group	-	-
14	PT. Wana Kayu Haslindo	Non Group	-	367.000
15	PT. Yotefa Sarana Timber	Non Group	-	123.565
16	PT. Hanurata Co. Ltd	Non Group	-	119.700
17	PT. Asco Prima Nusantara	Non Group	-	171.270
18	PT. Irmasulindo	Non Group	-	70.348
19	PT. Intimpura Timber	Non Group	-	174.540
20	PT. Mancaraya Agro Mandiri	Non Group	-	97.820
21	PT. Multi Wahana Wijaya	Non Group	-	107.740
22	PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya	Non Group	-	237.750
23	PT. Kaltim Utama	Non Group	-	161.670
24	PT. Manokwari Mandiri Lestari	Non Group	-	90.980
25	PT. Wana Irian Perkasa	Non Group	-	76.900
26	PT. Papua Satya Kencana	Non Group	-	195.420
	Total			3.646.848

BUMI TEKNOKULURA GROUP

PT. Bangun Kayu Irian (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memperoleh ijin berdasarkan SK.623/Menhut-II/2014, tanggal 14 Juli 2014 dengan luas konsesi 139.970 ha. Secara administrasi perusahaan ini berada di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini telah diaudit SVLK oleh PT. Lambodja Sertifikasi pada tahun 2021 dengan predikat memenuhi yang berlaku sampai tahun 2024. Dokumen PHPL perusahaan ini tidak teridentifikasi.

Menurut (Aman, 2015) perusahaan ini memiliki masalah lahan karena digugat oleh 7 Marga Pemilik Hak Ulayat di Kampung Bagaraga, Wardik Dan Tokas Distrik Wayer-Moswaren Kabupaten Sorong.

ALAMINDO GROUP

PT. Alamindo Lestari Sejahtera Tbk, adalah perusahaan induk (Holding Company) yang memiliki anak perusahaan yaitu PT Prabu Alaska dan PT. Rimbakayu Arthamas yang bergerak di bidang pengusahaan hutan dan Pemegang IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam) serta PT. Karas Industri Papua yang

bergerak di bidang Industri kayu yang semuanya berlokasi di wilayah Papua Barat. Group usaha ini milik Kim Johanes Mulia.

PT. Prabu Alaska (IUPHHK-HA)

Ijin perusahaan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 15/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 19 September 2016 322.780 ha. Secara administratif konsesi perusahaan ini berada di Kabupaten Fak-fak dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini telah diaduit PHPL oleh PT. Lambodja dengan predikat baik yang berlaku sampai tahun 2021. Dokumen SVLK perusahaan ini tidak teridentifikasi

PT. Rimbakayu Arthamas (IUPHHK-HA)

Perusahaan memiliki luas 130.400 ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 16/I/IUPHHK-HA/PMDN/2016, Tanggal 21 September 2016. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini telah diaduit SVLK oleh PT. Garda Mutu Prima pada Januari 2021 dan dinyatakan tidak memenuhi standar penilaian. Pada November 2020 pemantau independen dari masyarakat adat “Moskona” melakukan pemantauan pelaksanaan SVLK pada lokasi/konsesi PT RKA mendapatkan temuan:

1. Penebangan kayu di luar konsesi PT RKA.
2. Masyarakat menuntut pembayaran kompensasi kayu kepada PT KPM.
3. PT RKA Mengolah Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergaji.

Atas laporan pemantauan, JPIK telah melaporkan ke Gakum KLHK pada awal tahun 2021.

PT. Karas Industri Papua (IUPHHK)

Mengacu pada website Alamindo Consortium Group (<https://alamindo.co/pt-karasindustri-papua-2/>) menyatakan bahwa PT. Karas Industri Papua adalah perusahaan yang bergerak dibidang Industri kehutanan dan saat ini dalam proses pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap. Tahap I Pengembangan industri Sawmill dan Veener, dan Tahap II pengembangan industri Wood Pallet & Flooring. PT Karas Industri Papua berlokasi di Distrik Karas, Kabupaten Fakfak (Papua Barat) memiliki 10 Line Produksi dan Pelabuhan Samudra (Laut Dalam). Menurut (Lapan Enam Online, 2021) perusahaan ini diduga membangun pabrik tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

ARTHA GRAHA GROUP

PT. Kurniatama Sejahtera (IUPHHK-HA)

Ijin perusahaan ini melalui SK Menteri Kehutanan No. 648/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Pemberian IUPHHK-HA kepada PT. KTS areal Hutan Produksi seluas ± 115.800 ha di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini telah diaduit PHPL oleh PT. Inti Multima pada tahun 2019. PT. KTS merupakan salah satu anak perusahaan dibawah Artha Graha Group, milik Tommy Winata (TW).

SINAR WIJAYA GROUP

PT. Wijaya Sentosa (IUPHHK-HA)

PT. Wijaya Sentosa merupakan perusahaan di bidang pengusahaan hutan sebagai supplier utama bahan baku industri PT. Sinar Wijaya Plywood Industries dalam naungan Sinar Wijaya Group. Perusahaan ini memiliki luas 130.755 ha berdasarkan SK.33/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013. Perusahaan ini telah diaudit SVLK dan PHPL oleh PT. TUV Rheinland Indonesia dengan nilai baik yang berlaku dari 03 Maret 2019 sampai 09 Maret 2024. Perusahaan ini memiliki dokumen FSC sejak 03 Maret 2016.

MEGA MASINDO GROUP

JASOIL menemukan jaringan mafia penebangan kayu dan juga jaringan peredaran kayu yang melibatkan PT. Mega Masindo Group berkedudukan di Kelapa Gading Jakarta Utara ini. Perusahaan ini pun diketahui memiliki banyak anak perusahaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat seperti PT. Alas Tirta Kencana, PT. Masindo Mitra Papua di Timika, PT. Korindo di Merauke, PT. Wukirasari di Bintuni, PT. Arfak Indra di Goras Fakfak, PT. Bagus Jaya Abadi dan PT. Masindo Mitra Papua di Sorong serta PT. Wanakayu Hasilindo di Kamana.

Dari hasil investigasi ini pun terungkap bahwa Mr. Huung juga sudah memperluas jaringannya melalui PT. Wanakayu Hasilindo Kaimana yang merupakan salah satu anak perusahaan Sinar Wijaya Group. Ada petunjuk bahwa kayu yang berasal dari konsesi Wanakayu Hasilindo pun dikirim ke Pulau Yapen melalui Wondama dan Nabire melalui sistem Group Sinar Wijaya. Bahkan kayu dari konsesi Wanakayu Hasilindo Kaimana pun dikirim ke Timika dan Merauke. Hal ini membuktikan juga bahwa Mr. Huung juga telah memperluas jaringannya dengan membangun kerjasama dengan PT. Korindo Group di Merauke dan sekitarnya

PT. Wukirasari (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 116.320 ha berdasarkan SK Nomor 447/Menhut-II/2008. Secara administratif konsesi perusahaan ini berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kaimana, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini pernah diaudit SVLK oleh PT. Sarbi pada tahun 2020 dengan nilai Baik. Berdasarkan dokumen SVLK IUPHHK PT. Moulding Utama Semesta, PT. Wukirasari menjual bahan baku kayu dengan nomor kontrak 003/PK-WKS/KP/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 sebanyak 170,84 m³.

Awalnya, PT. WKS dimiliki oleh perusahaan industri kayu lapis PT. Kayu Lapis Indonesia (KLI), milik Keluarga Sutanto. Pada periode perpanjangan HPH PT. WKS, terjadi perubahan manajemen dan pengolahan hutan dari pemegang ijin PT. Wukirasari, kepada group perusahaan Mega Masindo Group, milik Paulus George Hung atau dikenal panggilan Mr. Ting ting Hung. Berdasarkan dokumen Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dikeluarkan PT. Equality Indonesia, diketahui alamat PT. WKS berada di Jl. Kampung Lama Bintuni Timur, Provinsi Papua Barat.

PT. Wana Kayu Hasilindo (IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 65.520 ha berdasarkan SK Nomor 547/Kpts-II/1997. PT. Wanakayu Hasilindo mensuplay atau mengirim kayu ke PT. Sinar Wijaya Plywood-Industries di Kabupaten Kepulauan Yapen Papua. Sinar Wijaya Group diketahui mengirim kayu plywood dan kayu log jenis merabau ke Surabaya, Sulawesi, Australia, Selandia Baru, Yaman, Timur Tengah dan USA. Sinar Wijaya Group mempunyai beberapa anggota yakni PT. Sinar Wijaya Plywood_industries di Yapen, PT. Jadi Dharma Indah di Nabire, PT. Wijaya Sentosa di Wondama dan PT. Wana Kayu Hasilindo di Kaimana. Ada dugaan bahwa ada hubungan kerjasama antara Sinar Wijaya Group (SWG) dengan Mega Masindo Group (MMG). Hal ini diketahui dari keberadaan MMG yang beroperasi sebagai sub-kontraktor penebangan dan pengapalan kayu di wilayah Konsesi PT. Wana Kayu Hasilindo, Kaimana. Lebih dari itu untuk mendokumentasikan kondisi pengelolaan hasil hutan kayu dan mengumpulkan bukti-bukti baru yang berhubungan dengan kegiatan illegal logging yang dilakukan oleh Mr. Huung melalui Mega Masindo Group dengan memanfaatkan ketidakberdayaan IUPHHK-HA yang tersebar di Papua Barat. Bahkan sebuah dokumen kayu yang ditemukan pada akhir tahun 2016 menunjukkan bahwa MMG mengirim kagu log jenis merbau dari wilayah konsesi Wana Kayu Hasilindo ke PT. Korindo Group di Merauke. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki dokumen SVLK dan PHPL.

UNGROUP

PT. Arfak Indra (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memperoleh ijin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.333/MENHUT-II/2009 tanggal 15 Juni 2009 Tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Arfak Indra Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 177.900 ha di Kabupaten Fakfak.

Perusahaan ini telah diaudit SVLK oleh PT. Kreasi Prima pada tahun 2021 dengan hasil memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat SVLK. Selain itu perusahaan ini telah diaudit PHPL Oleh PT. Ayamaru dengan predikat sedang pada tahun 2016 dan berlaku sampai tahun 2018. Sebelumnya pada tahun 2015 Dewan Adat menuntut perusahaan ini untuk angkat kaki dari Fakfak (Infofakfak, 2015).

PT. Hasrat Wira Mandiri (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 119.700 ha dan secara administrative berada di Kabupaten Sorong. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Intimpura Timber (IUPHHK-HA)

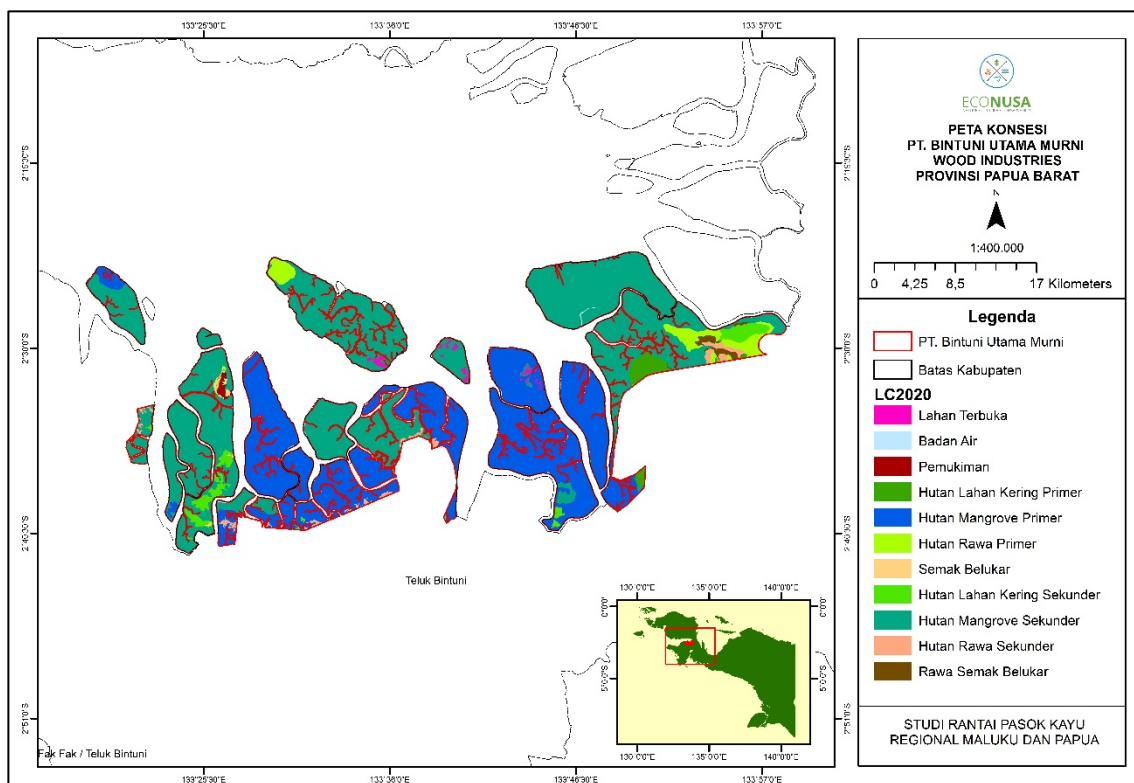
Berdasarkan SK Nomor 069/Kpts-II/1989 6 Pebruari 1989 perusahaan ini memiliki luas 333.000 ha. Jenis kayu di perusahaan ini terdiri dari Meranti, Merbau dan Rimba campuran. Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/G/2010/PTUN.JKT yang berisi : (a) Pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S-128/Menhut-VI/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang berakhirnya PT. Intimpura Timber Co di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat; (b) mencabut Surat Keputusan Nomor :S-128/Menhut-VI/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Berakhirnya

PT. Intimpura Timber Co di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat; serta (c) Mewajibkan Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang meneruskan proses penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai surat permohonan PT. Intimpura Timber Co selaku Penggugat Nomor : 11/Prc.e/ITP-D/2/07 tanggal 1 Februari 2007 perihal Permohonan Perpanjangan IUPHHK, adanya putusan MA tersebut yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut akan berdampak terhadap masalah kepastian kawasan dan pola kerjasama pengelolaan hutan di dalam wilayah kerja KPHP Model Sorong, dimana sebagian besar wilayah KPHP Model Sorong merupakan areal IUPHHK-HA PT. Intimpura Timber (Raya et al., 2014).

PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 78.669,29 ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 213/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 jo. SK.872/MENHUT-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan terletak di Kabupaten Teluk Bintuni. Perusahaan ini memiliki dokumen SVLK yang diadit oleh PT. Sarbi. Selain SVLK perusahaan ini telah diaudit PHPL oleh Sarbi pada tahun 2016 dengan predikat baik. Selanjutnya pada tahun 2021 Sarbi melakukan audit PHPL dan SVLK pada tahun 2021 dengan metode audit jarak jauh (remote audit) dengan predikat baik dan berlaku sampai tahun 2027. Perusahaan ini juga telah mengantongi sertifikat FSC pada tahun 2015 (Bisnis.com, 2015).

Menurut (Bumwimangrove, 2021) PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries (disingkat PT. BUMWI) didirikan pada tanggal 1 Februari 1980. PT. BUMWI adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, khususnya pemanfaatan dan pengolahan kayu bakau-bakauan/Rhizophoraceae (mangrove). Komoditas utama perusahaan ini adalah *chips wood*.



Gambar 35. Peta Konsesi PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries

PT. Henrizon Iriana (IUIPHHK)

Perusahaan ini memiliki ijin industry melalui SK.61/Menhut-VI/BPPHH/2006. Produksi dan kapasitas industry perusahaan ini terdiri dari Kayu Lapis (612.000 m³), Veneer (180.000 m³), Kayu Gergajian (6.000 m³). Perusahaan ini telah diaduit SVLK pada tahun 2012 oleh PT. Mutu Hijau. Secara administrasi perusahaan ini terletak di Kabupaten Sorong. Perusahaan ini mengekspor kayu ke Amerika Serikat pada tahun 2008 (Panjiva, 2008). Perusahaan ini diduga menghindari pajak retribusi (Sorongpos, 2021). Berdasarkan dokumen SVLK perusahaan ini adalah salah satu pemasok PT. Gema Lestari Indonesia, Surabaya. Perusahaan ini telah diaduit SVLK oleh PT. Mutu Hijau pada tahun 2021 dan berlaku sampai tahun 2025.

Berdasarkan dokumen SVLK pemasok perusahaan ini terdiri dari PT. Mondialindo Setya Pratama, PT. Bina Balantak Utama, PT. Yotefa Sarana Timber dan PT. Diadyani Timber. Selama periode Januari - Desember 2020 yang dilengkapi dengan kontrak/perjanjian jual beli kayu. Total penerimaan bahan baku kayu bulat yaitu: 43.496,67 m³ untuk kayu Merbau dan 148,77 m³ untuk kayu Rimba Campuran.

PT. Wana Kayu Haslindo (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 367.000 ha berdasarkan SK Nomor 147/Kpts-IV/84. Selanjutnya diperbaharui melalui SK Nomor SK.547/Kpts-II/1997, Tanggal 27 Agustus 1997 dengan luas 84.000 ha. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini memiliki dokumen SVLK yang diaduit oleh Sarbi dengan predikat lulus yang terbit tahun 2016.

PT. Yotefa Sarana Timber (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 123.565 ha berdasarkan SK. 570/Menhut-II/2011, tanggal 03 Oktober 2011. Konsesi perusahaan ini secara administratif berada di Kabupaten Teluk Bintuni. Perusahaan ini telah diaduit PHPL oleh PT. Global Resources pada tahun 2020. Berdasarkan dokumen SVLK perusahaan lain, perusahaan ini teridentifikasi memasok kayu ke IUIPHHK PT. Dewata Cipta Semesta, Surabaya dengan Kontrak kerjasama suplai bahan baku kayu bulat No. 001/KSBBI/YTF-DCS/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 kayu bulat sebanyak 2.848,54 m³. Tidak ditemukan dokumen SVLK atas nama perusahaan ini.

PT. Hanurata Co. Ltd (Sorong)- IUPHHK-HA

Perusahaan ini memiliki luas 119.700 ha berdasarkan SK Nomor 735/Kpts-II/93 tahun 1993 secara administratif di Kabupaten Sorong Papua Barat. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas.

PT. Asco Prima Nusantara (IUPHHK-HA)

PT. Asco Prima Nusantara memiliki luas 171.270 ha berdasarkan SK 82/MENHUT-II/2009 tahun 2009 dan secara administrasi berada di Kabupaten Kaimana. Hasil penilaian PHPL yang dilakukan oleh PT. Inti Multima Sertifikasi dengan predikat sedang yang ditetapkan pada 31 Mei 2018. Selain PHPL perusahaan ini memiliki dokumen SVLK yang dikeluarkan oleh PT. Trusindo Certification pada 30 Desember 2015.

PT. Irmasulindo (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 70.348 ha berdasarkan SK Nomor 04/Kpts-II/2011 dan secara administratif terletak di Kabupaten Kaimana. Perusahaan ini telah diaudit SVLK oleh PT. Ayamaru dengan predikat lulus yang berlaku mulai tahun 2015-2018. Hasil audit PHPL untuk perusahaan ini tidak ditemukan.

PT. Intimpura Timber (IUPHHK-HA)

Luas perusahaan ini adalah 174.540 ha berdasarkan SK Nomor 08/Kpts-II/2001 tahun 2001. Informasi tentang perusahaan ini masih sangat terbatas.

PT. Mancaraya Agro Mandiri (IUPHHK-HA)

Berdasarkan SK Menhut No.SK. 55/Menhut-II/2006, tanggal 14 Maret 2006, perusahaan ini memiliki luas 97.820 ha yang secara administratif terletak di Kabupaten Sorong. Perusahaan ini telah diaudit PHPL oleh PT. Sarbi pada tahun 2015 dengan predikat sedang. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki dokumen SVLK.

Perusahaan ini teridentifikasi menjual kayu bulat ke CV. Bintang Tiurma o Kab. Sorong, Papua Barat sebanyak 3.200 m³ dengan Nomor kontrak : 001/MAM-BT/I/2016 tanggal 03 Januari 2016.

PT. Multi Wahana Wijaya (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 107.740 ha berdasarkan SK Nomor 159/Menhut-II/2011. Secara administratif terletak di Kabupaten Tambora. Perusahaan ini telah diaudit PHPL oleh PT. Ayamaru pada tahun 2019 dengan predikat sedang.

PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 237.750 ha berdasarkan SK Nomor 509/MENHUT-II/2012. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana. Perusahaan ini telah diaudit PHPL oleh PT. Lambodja pada tahun 2020 dengan predikat baik. Perusahaan ini teridentifikasi menjual kayu bulat merbau ke IUPHHK dan IUI PT. Seng Fong Moulding Perkasa, Provinsi Jawa Timur sebanyak 10.513.5900 m³ pada tahun 2014 dan 4.497.4300 m³ pada tahun 2018.

PT. Kaltim Utama (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki luas 161.670 ha berdasarkan SK Nomor SK.652/Menhut-II/2009. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Kaimana, Papua Barat dan Nabire, Papua. Perusahaan pernah diaudit SVLK oleh PT. Inti Ultima Sertifikasi pada tahun 2020 dan dinyatakan memenuhi. Berdasarkan audit sertifikat PHPL perusahaan ini dibekukan melalui surat pada 18 Desember 2017 oleh PT. Lambodja Sertifikasi karena tidak memenuhi standar PHPL.

Berdasarkan dokumen SVLK perusahaan ini memasok kayu ke CV. Rimba Bahari Jaya sebanyak 536,6196 m³.

PT. Manokwari Mandiri Lestari (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini memiliki ijin berdasarkan SK Nomor SK. 366/Menhut-II/2011 dengan luas 90.980 ha. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini telah diaduit PHPL oleh PT. Equality dengan predikat lulus pada tahun 2017. Pada 12 Juni 2012, perusahaan ini bekerjasama dengan The Borneo Initiative (TBI) berhasil memperoleh sertifikat *Forest Stewardship Council* (FSC). Tidak teridentifikasi dokumen SVLK perusahaan ini.

PT. Wana Irian Perkasa (IUPHHK-HA)

Perusahaan ini yang berlokasi di Kabupaten Maybrat, Propinsi Papua Barat. Perusahaan ini memiliki ijin konsesi seluas 76.900 hektar. PT Wana Irian Perkasa ini telah beroperasi sejak tahun 1992. Informasi tentang perusahaan ini sangat terbatas.

PT. Papua Satya Kencana (IUPHHK-HA)

Ijin perusahaan ini melalui SK.647/Menhut-II/2009, 15 Oktober 2009 dengan luas 195.420 ha. Secara administratif perusahaan ini terletak di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini telah diaduit PHPL oleh PT. Mutu pada tahun 2015. Perusahaan ini tidak teridentifikasi memiliki dokumen SVLK. Perusahaan ini adalah Pemasok/Supplier bahan baku kayu bulat ke industri PT. Bumi Meyado Iriando pada Periode Bulan April 2018 – Maret 2019.

6.3 Alur Perdagangan Kayu dari Provinsi Papua dan Papua Barat

IUPHHK-HA di Provinsi Papua yang teridentifikasi menjadi sumber bahan baku hanya 7 perusahaan (Tabel 11). Sedangkan IUPHHK-HA di Provinsi Papua Barat yang teridentifikasi menjadi sumber bahan baku hanya 12 perusahaan (Tabel 12).

Tabel 11. Industri penerima bahan baku dari IUPHHK Provinsi Papua

No	Sumber Bahan Baku	Industri Penerima	Tahun	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)
1	PT. Diadyani Timber	PT. Uni Raya Timber	2018	6,069.52	6,069.52
2	PT. Salaki Mandiri Sejahtera	PT. Wapoga Mutiara Industries	2018	59,152.94	11,424.79
3	PT. Semarak Dharma Timber	-	2018	1,717.64	2,287.86
4	PT. Wapoga Mutiara Tbr. II	PT. Wapoga Mutiara Industries	2018	120,373.99	36,220.47
5	PT. Inocin Abadi	PT. Korindo Abadi	2018	54,389.22	56,743.27
6	PT. Tunas Timber Lestari	PT. Korindo Abadi	2018	57,800.95	90,021.55
7	PT. Jati Dharma	PT. Sinar Wijaya PI	2018	175,600.00	148,401.21
8	PT. Bio Inti Agrindo	PT. Bio Inti Agrindo	2018	51,147.23	17,803.70

Tabel 12. Industri penerima bahan baku dari IUPHHK Provinsi Papua Barat

No	Sumber Bahan Baku	Industri Penerima	Tahun	Rencana (m ³)	Realisasi (m ³)
1	PT. Kurniatama Sejahtera	PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa	2018	6,050.00	6,004.91
2	PT. Wijaya Sentosa	PT. Sinar Wijaya Plywood Industries	2018	135,500.00	114,856.09
3	PT. Wukirasari	PT. Sinar Wijaya Plywood Industries	2018	76,000.00	74,914.21
4	PT. Bintuni Utama Murni Wood in	PT. Bintuni Utama Murni Wood in	2018	111,918.66	96,909.55
5	PT. Yotefa Sarana Timber	PT. Henrison Iriana	2018	42,000.00	10,773.46
6	PT. Hanurata Co. Ltd	PT. Aneka Rimba Indonusa	2018	24,842.71	24,842.71
7	PT. Asco Prima Nusantara	PT. Indo Furnitama Raya	2018	25,000.00	7,472.83
8	PT. Mancaraya Agro Mandiri	PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa	2018	1,700.00	1,700.00
9	PT. Multi Wahana Wijaya	PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa	2018	4,000.00	3,694.40
10	PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya	PT. Seng Fong Moulding Perkasa	2018	25,000.00	21,785.57
11	PT. Manokwari Mandiri Lestari	PT. Berau Karya Indah	2018	31,392.23	18,233.24
12	PT. Papua Satya Kencana	PT. Hutan Lestari Mukti Perkasa	2018	9,600.00	9,556.87

6.4 Sertifikasi IUPHHK-HA dan HTI Provinsi Papua dan Papua Barat

Di Provinsi Papua, perusahaan yang teridentifikasi memiliki sertifikat SVLK hanya 13 dari 61, PHPL 17 dari 61 dan FSC hanya 1 dari 61 (Tabel 13). Di Provinsi Papua Barat, perusahaan yang teridentifikasi memiliki SVLK sebanyak 11 dari 26, PHPL 10 dari 26 dan FSC 1 dari 26 (Tabel 14).

Tabel 13. Kepemilikan sertifikat SVLK, PHPL dan FSC di Provinsi Papua

No	Nama Perusahaan	Jenis Ijin	SVLK	PHPL	FSC
1	PT Agoda Rimba Irian	IUPHHK-HA	-	-	-
2	PT. Alas Tirta Kencana	IUPHHK-HA	√	-	-
3	PT. Artika Optima Inti Unit I	IUPHHK-HA	-	-	-
4	PT. Centarico	IUPHHK-HA	-	-	-
5	PT. Diadyani Timber	IUPHHK-HA	-	√	-
6	PT. Digul Dayasakti	IUPHHK-HA	-	-	-
7	PT. Kamundan Raya	IUPHHK-HA	-	-	-
8	PT. Salaki Mandiri Sejahtera	IUPHHK-HA	-	√	-
9	PT. Semarak Dharma Timber	IUPHHK-HA	√	-	-
10	PT. Sagindo Sari Lestari	IUPHHK-HA	-	-	-

11	PT. Prasarana Marga	IUPHHK-HA	-	-	-
12	PT. Risana Indah Forest	IUPHHK-HA	-	-	-
13	PT. Kayu Ekaria	IUPHHK-HA	-	-	-
14	PT. Wapoga Mutiara Tbr. I	IUPHHK-HA	-	-	-
15	PT. Wapoga Mutiara Tbr. II	IUPHHK-HA	-	-	-
16	PT. Phonik Harapan Tbr	IUPHHK-HA	-	-	-
17	PT. Wapoga Mutiara Industries	IUPHHK	√	-	-
18	PT. Inocin Abadi	IUPHHK-HA	-	√	-
19	PT. Korindo	IUPHHK-HA	√	-	-
20	PT. Tunas Timber Lestari	IUPHHK-HA	-	√	-
21	PT. Jati Dharma	IUPHHK-HA	-	√	-
22	PT. Kaltim Utama	IUPHHK-HA	√	√	-
23	PT. Medco Papua Alam Lestari	IUPHHK-HT	-	-	-
24	PT. Selaras Inti Semesta	IUPHHK-HA	√	√	-
25	PT. Bio Inti Agrindo	IUPHHK-HA& IUPHHK	√	-	-
26	PT. Mamberamo Alasmandiri	IUPHHK-HA	-	√	-
27	PT. Bade Makmur Orissa	IUPHHK-HA	-	√	-
28	PT. Arfak Indra	IUPHHK-HA	√	√	-
29	PT. Plasma Nutfah Marind Papua	IUPHHK-HT	-	-	-
30	PT. Muting Mekar Hijau	IUPHHK-HA	-	-	-
31	PT. Merauke Rayon Jaya	IUPHHK-HT	-	-	-
32	PT. Hanurata Unit Jayapura	IUPHHK-HA	√	√	-
33	PT. Papua Timber Jaya	IUPHHK-HA	-	-	-
34	PT. Batasan	IUPHHK-HA	√	√	-
35	PT. Sedia Mulia Utama	IUPHHK-HA	-	-	-
36	PT. Perdana Waropen	IUPHHK-HA	-	-	-
37	PT. Barito Cendrawasih	IUPHHK-HA	-	-	-
38	PT. Bina Balantak Raya Utama	IUPHHK-HA	-	√	√
39	PT. Budhi Nyata	IUPHHK-HA	-	-	-
40	PT. Citra Lembah Kencana	IUPHHK-HA	-	-	-
41	PT. Crown Pacific Abadi	IUPHHK	√	-	-
42	PT. Damai Setiatama Tbr	IUPHHK-HA	-	√	-
43	PT. Darmali Mahkota Tbr	IUPHHK-HA	-	-	-
44	PT. Global Parters Indonesia	IUPHHK-HA	-	-	-
45	PT. Hasrat Wira Mandiri	IUPHHK-HA	-	√	-
46	PT. Kebun Sari Putra	IUPHHK-HA	-	-	-
47	PT. Mondialindo Setya Pratama	IUPHHK-HA	-	√	-
48	PT. Mukti Artha Yoga	IUPHHK-HA	-	-	-
49	PT. Papua Hutan Lestari Makmur	IUPHHK-HA	√	√	-
50	PT. Rimba Mafin	IUPHHK-HT	-	-	-
51	PT. Rimba Megah Lestari	IUPHHK-HA	-	-	-
52	PT. Victory Ciwi Unit III	IUPHHK	√	-	-
53	PT. Victory Ciwi Unit II	IUPHHK	-	-	-
54	PT. Wana Galang Utama	IUPHHK-HA	-	-	-
55	PT. Wanatirta Ediwibowo	IUPHHK-HA	-	-	-
56	PT. China Gate Agriculture Development	IUPHHK-HA	-	-	-

57	PT. Cipta Papua Agri Lestari	IUPHHK-HA	-	-	-
58	PT. Kertas Nusantara	IUPHHK-HA	-	-	-
59	PT. Wahana Samudra Sentosa	IUPHHK-HT	-	-	-
60	PT. Wanamulia Sukses Sejati Unit I dan II	IUPHHK-HT	-	-	-
61	CV. Rizki Mandiri Timber	IUPHHK	-	-	-

Tabel 14. Kepemilikan sertifikat SVLK, PHPL dan FSC di Provinsi Papua Barat

No	Nama Perusahaan	Jenis Ijin	SVLK	PHPL	FSC
1	PT. Bangun Kayu Irian	IUPHHK-HA	√	-	-
2	PT. Prabu Alaska	IUPHHK-HA	-	√	-
3	PT. Rimbakayu Arthamas	IUPHHK-HA	√	-	-
4	PT. Karas Industri Papua	IUPHHK	-	-	-
5	PT. Kurniatama Sejahtera	IUPHHK-HA	-	-	-
6	PT. Wijaya Sentosa	IUPHHK-HA	√	√	-
7	PT. Wukirasari	IUPHHK-HA	√	-	-
8	PT. Wana Kayu Hasilindo	IUPHHK-HA	-	-	-
9	PT. Arfak Indra	IUPHHK-HA	√	-	-
10	PT. Hasrat Wira Mandiri	IUPHHK-HA	-	-	-
11	PT. Intimpura Timber	IUPHHK-HA	-	-	-
12	PT. Bintuni Utama Murni Wood in	IUPHHK-HA	√	√	-
13	PT. Henrizon Iriana	IUPHHK	√	-	-
14	PT. Wana Kayu Hasilindo	IUPHHK-HA	√	-	-
15	PT. Yotefa Sarana Timber	IUPHHK-HA	-	√	-
16	PT. Hanurata Co. Ltd	IUPHHK-HA	-	-	-
17	PT. Asco Prima Nusantara	IUPHHK-HA	√	√	-
18	PT. Irmawulindo	IUPHHK-HA	√	-	-
19	PT. Intimpura Timber	IUPHHK-HA	-	-	-
20	PT. Mancaraya Agro Mandiri	IUPHHK-HA	-	√	-
21	PT. Multi Wahana Wijaya	IUPHHK-HA	-	√	-
22	PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya	IUPHHK-HA	-	√	-
23	PT. Kaltim Utama	IUPHHK-HA	√	-	-
24	PT. Manokwari Mandiri Lestari	IUPHHK-HA	-	√	√
25	PT. Wana Irian Perkasa	IUPHHK-HA	-	-	-
26	PT. Papua Satya Kencana	IUPHHK-HA	-	√	

DAFTAR PUSTAKA

- Ayamuru Sertifikasi. (2018). PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK.
- Barito Pasifik. (2019). *Prospektus PT BARITO PACIFIC Tbk.*
- Barito Pasifik. (2019). *Annual Report Tahun 2019 PT. Barito Pasifik Tbk.*
- Barito Pasifik. (2021). *Sekilas Perusahaan.*
- Barri, M. F., Setiawan, A. A., Oktaviani, A. R., Prayoga, A. P., & Ichsan, A. C. (2018). 1 Deforestasi Tanpa Henti. 2018. *Forest Watch Indonesia*, 1–62.
- BPS Maluku. (2019). *Provinsi Maluku Dalam Angka 2019.*
- DPR Seram Bagian Timur. (2019). *Aktivitas PT. STRATA PACIFIC Kembali Jadi Sorotan DPRD SBT.*
- Dzulfaroh AN. (2021). 10 Kepala Daerah Terkaya di Indonesia 2021 Menurut LHKPN.
- ESDM. (2021). *Profil Perusahaan- HALMAHERA SUKSES MINERAL.*
- Global Resource. (2016). *Rencana Audit Penilaian Kinerja PHPL PT. Tunas Pusaka Mandiri.*
- Global Resources. (2006). *Laporan Kinerja PHPL.*
- Global Resources. (2013). *Surat Keputusan Direktur PT. Global Resources Sertifikasi Nomor 017/Kpts-GRS/VIII/2013.*
- Hukum Online. (2015). Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3147/MENHUT-VI/BPPHH/2005 Tahun 2005.
- iNews Maluku. (2021). *Kasus Korupsi Lahan PLN, Pengusaha Ferry Tanaya dan Abdul Gofur Divonis Bebas.*
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. (2019). *MENELUSURI LEGALITAS BAHAN BAKU PT KATINGAN TIMBER CELEBES.*
- Jaringan Pemantau Independen Kehutanan. (2021). *Pemantauan Pada Perusahaan yang Belum Mengajukan Sertifikasi.*
- JKPP. (2019). *SELUNDUPKAN KAYU MERBAU, PERUSAHAAN KAYU DI MALUKU UTARA MANIPULASI DOKUMEN PELAPORAN.*
- JPIK. (2016). *Laporan Pemantauan SVLK PT. Surya Saritama.*
- JPIK. (2017). *7 Tahun Memantau Industri Pengolahan Kayu (Hasil Pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas*

Kayu/SVLK di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2017.

Jubi. (2018). *Sejarah penguasaan tanah Orang Asli Papua.*

Kejaksaaan Tinggi Maluku. (2021). *PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KEJATI MALUKU DENGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PANCA KARYA.*

KLHK. (2020). *PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI PT. BELA BERKAT ANUGERAH (IUPHHK-HA) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA.*

Kompas.id. (2021). *Pemegang Sertifikat Legalitas Kayu Ditemukan Menebang di Luar Konsesi.*

Laboja Sertifikasi. (2016). *Pengumuman Publik Hasil S1 VLK Koperasi Wailo Wanalestari.*

Lamboja Sertifikasi. (2015). *RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT WAENIBE WOOD INDUSTRIES.*

Linansera. (2021). *Tolak Bayar Hak Mantan Karyawannya, Direktur PD PK Di Gugat.*

Maluku Post. (2019). *Peserta Rakor Pengawasan Tenagakerjaan se-Maluku Tinjau Pabrik Plywood.*

Pelita Maluku. (2019). *PT. KARYA BERDIKARI MANDIRI, DIDUGA LAKUKAN PENEBAANGAN HUTAN YAMDENA MELEBIHI RKT.*

Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (2015). *Progres Implementasi 6 Sasaran Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) atas Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kehutanan di Aceh. 1–27.*

Poros Timur. (2021). *BPD Falabisahaya Tolak Pembahasan AMDAL PT. Mangole Timber Producers.*

Radar Tipikor. (2021). *PT. NPC Diduga Melakukan Pengrusakan Lingkungan di Areal Warumbia dan Anak Sungai Pajalale.*

Riza. (2019). *Ribuan Ton Kayu Balok Illegal Masuk Dermaga Belawan.*

Satu Maluku. (2019). *Bupati Kepulauan Tanimbar Menghentikan Sementara Ijin HPH Yamdena Milik PT. Karya Jaya Berdikari.*

Siregar ET. (2017). *Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Pengukuran Kayu Bulat terhadap Penerimaan Kayu Bulat pada Satu Perusahaan Industri Kayu di Kabupaten Buru.*

Siwaluma. (2020). *Polisi Kesulitan Ungkap Dugaan Korupsi PD. Panca Karya.*

Srianto. (2016). *LAPORAN PEMANTAUAN SVLK PT SURYA SARITAMA.*

Timur, P. (2019). Ternyata Benny Laos Bupati Terkaya di Indonesia.

Training Proper. (2013). *Peraih Peringkat Proper Hitam Tahun 2013*.

Tribun Maluku. (2019). *PT. Maluku Sentosa Dituntut Selesaikan Hak Masyarakat Adat*.

Viva. (2021). Pendiri Barito Group ini memulai kariernya dari mulai sopir angkot. Jatuh bangun, ia rasakan.

Puncaknya, Sang Raja Kayu Prajogo Pangestu pernah masuk salah satu orang kaya Indonesia.

Wahyudi. (2015). *Perkembangan Industri Perkayuan di Tanah Papua*.